




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

  Disbunkaltim

 Dinas Perkebunan Prov.Kaltim

 <https://disbun.kaltimprov.go.id>





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* dapat diselesaikan, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara substantif *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)* ini merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan anggaran dalam waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKjIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, evaluasi dan anggaran, termasuk didalamnya faktor-faktor pendorong, penghambat, permasalahan dan solusinya.

Dalam menyusun *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas (LKjIP)* tahun 2023 dimana tahun ini merupakan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra) 2019–2023, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integratif instrumen kinerja instansi pemerintah dengan indikator masing-masing. Instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja. LKjIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrumen tersebut. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Samarinda, Februari 2024

Kepala,



Ahmad Muzakkir, S.T, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19751001 200112 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan instansi pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2023 berpedoman Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang berarti Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

hususnya dalam sasaran strategis peningkatan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan), jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan NTP perkebunan rakyat. Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	21.997	17.890,80*	81,33
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	111	176,19
3	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	112	166,92	149,04

*) Sumber: BPS angka sangat sementara tahun 2023

Pencapaian sasaran strategis di atas didukung oleh program pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019-2023. Terdapat 4 program strategis di Dinas Perkebunan yang mendukung ketercapaian sasaran strategis, dari 4 program telah **TERCAPAI** sesuai target.

Dari hasil evaluasi yang disampaikan pada LKjIP ini penting untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan kinerja Dinas Perkebunan tahun berikutnya agar lebih baik lagi.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	23
E. Aspek Strategis Organisasi	26
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	29
G. Sarana dan Prasarana Kerja	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	44
A. Perencanaan Strategis	44
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	64
C. Perjanjian Kinerja (PK)	66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	69
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	69
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	73
C. Analisis Capaian Kinerja	75
D. Capaian Kinerja SDGs Lingkungan Hidup	205
E. Realisasi Anggaran	210
BAB IV PENUTUP	222



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023	23
Tabel 1.2.	Asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	30
Tabel 2.1.	Korelasi Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	47
Tabel 2.2.	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	49
Tabel 2.3.	Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran	51
Tabel 2.4.	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	53
Tabel 2.5.	Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	65
Tabel 2.6.	Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	66
Tabel 2.7.	Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	68
Tabel 2.8.	Anggaran per Sasaran Strategis	68
Tabel 3.1.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	69
Tabel 3.2.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	69
Tabel 3.3.	Pengukuran Indikator Kinerja	74
Tabel 3.4.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	75
Tabel 3.5.	Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2023	81
Tabel 3.6.	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini, n-1 dan n-2 ..	91
Tabel 3.7.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Prov. Kaltim 2019-2023.....	94
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2023	94



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2023	95
Tabel 3.10.	Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	111
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.....	128
Tabel 3.12.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kakao 180 Ha	129
Tabel 3.13.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa 20 Ha	131
Tabel 3.14.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Sawit 200 Ha	132
Tabel 3.15.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 200 Ha	133
Tabel 3.16.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Karet 200 Ha	135
Tabel 3.17.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Karet 136 Ha	136
Tabel 3.18.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Aspirasi)	138
Tabel 3.19.	Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	143
Tabel 3.20.	Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	150
Tabel 3.21.	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	151
Tabel 3.22.	Rekapitulasi Perluasan Komoditi Perkebunan Tahun 2023	153
Tabel 3.23.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Tahun 2023	153
Tabel 3.24.	Luas Perluasan dengan Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2023..	157



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.25.	Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK	159
Tabel 3.26.	KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2023.....	167
Tabel 3.27.	Rekapitulasi Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT Tahun 2023	171
Tabel 3.28.	Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	173
Tabel 3.29.	Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur	176
Tabel 3.30.	Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2023	180
Tabel 3.31.	Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2023.....	184
Tabel 3.32.	ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.....	184
Tabel 3.33.	Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2023	186
Tabel 3.34.	Kelompok Tani yang mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan Tahun 2023.....	198
Tabel 3.35.	Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2023	199
Tabel 3.36.	Pelatihan Sekolah Lapang Kelompok Tani (SL) Komoditi Perkebunan Tahun 2023	204
Tabel 3.37.	Tujuan SDGs Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	208
Tabel 3.38.	Target, Indikator dan Capaian SDGs Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	209
Tabel 3.39.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDGs	209
Tabel 3.40.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	210
Tabel 3.41.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2023	211



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	22
Gambar 3.1.	Harga Referensi CPO Januari-Desember 2022-2023	78
Gambar 3.2.	Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2023	79
Gambar 3.3.	Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2023.....	88
Gambar 3.4.	NTP tanaman perkebunan Rakyat Tahun 2023	89
Gambar 3.5.	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2023	90
Gambar 3.6.	Perbandingan NTP Provinsi Provinsi Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Provinsi Provinsi Timur Rakyat Tahun 2021-2023	93
Gambar 3.7.	Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	97
Gambar 3.8.	Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2023	144
Gambar 3.9.	Produk Komoditi Aren yang Dipromosikan dan Dipasarkan.....	192
Gambar 3.10.	Produk Komoditi Lada yang Dipromosikan dan Dipasarkan.....	193
Gambar 3.11.	Produk Komoditi Kopi yang Dipromosikan dan Dipasarkan.....	194
Gambar 3.12.	Produk Komoditi Kakao yang Dipromosikan dan Dipasarkan.....	194



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Gambar 3.13	Produk Komoditi Kelapa yang Dipromosikan dan Dipasarkan.....	195
Gambar 3.14.	Produk Komoditi Kelapa Sawit yang Dipromosikan dan Dipasarkan.....	195
Gambar 3.15.	Produk Komoditi Kelapa Kopyor yang Dipromosikan dan Dipasarkan.....	196



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan 2023
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 4	Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Lampiran 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran 6	Penghargaan yang Diterima pada Tahun 2023



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada suatu Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur pada awal Pelita I (April 1969). Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1984 nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Perubahan tugas pokok dan



fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Dan pada tanggal 6 September tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Tugas Pokok Dinas Perkebunan seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perkebunan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;



- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan komoditi;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang usaha;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perkebunan berkelanjutan;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut:

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a) Merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Membina dan mengelola kegiatan pengelolaan kebun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi hasil perkebunan;
- f) Membina kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- g) Membina dan mengelola pengembangan komoditi dan usaha perkebunan berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- h) Membina dan mengelola pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- i) Membina, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;



- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan gubernur baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas:



- a) Menghimpun perencanaan program kegiatan dinas dan menyusun perencanaan program sekretariat pada dinas sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka penilaian kinerja bawahan;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan subbagian umum sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- g) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat membawahi Subbagian yaitu Subbagian Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat. Dalam



melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional/program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f) Melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g) Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik Negara/Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan operasional unit kerja;
- h) Melakukan fasilitasi kegiatan bidang/bagian lingkup unit kerja;
- i) Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan dan indeks kepuasan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk evaluasi Pelayanan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan



- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Pengembangan Komoditi

Bidang Pengembangan Komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan komoditi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan komoditi;
- b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang pengembangan komoditi;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan rencana perkebunan tingkat provinsi dan neraca sumber daya komoditi serta pengembangan kelembagaan perkebunan;
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyiapan dan perluasan lahan;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis budidaya tanaman;
- f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- g) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengembangan komoditi;



- h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan dan perluasan lahan, budidaya tanaman dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
- i) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f) Menyiapan rumusan kebijakan rencana perkebunan tingkat provinsi dan neraca sumber daya komoditi serta pengembangan kelembagaan perkebunan berdasarkan renstra dinas untuk meningkatkan produktifitas hasil Perkebunan;
- g) Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian pengembangan komoditi berdasarkan renstra dinas untuk peningkatan produktivitas hasil perkebunan;



- h) Memberikan pertimbangan teknis pengembangan komoditi berdasarkan renstra dinas untuk meningkatkan produktifitas hasil perkebunan;
- i) Menyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja pengembangan komoditi berdasarkan renstra dinas meningkatkan produktifitas hasil perkebunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan komoditi berdasarkan renstra dinas meningkatkan produktifitas hasil perkebunan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang usaha. Dalam melaksanakan tugas Bidang Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha perkebunan besar;
- b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang usaha perkebunan besar;



- c) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis usaha perkebunan besar;
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembinaan usaha;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penanganan konflik usaha;
- f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembinaan kebun kemitraan;
- g) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang usaha;
- h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan usaha, penanganan konflik usaha dan pembinaan kebun kemitraan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Usaha mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bidang usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;



- e) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha perkebunan besar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan usaha perkebunan;
- f) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan usaha perkebunan dan kemitraan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan informasi yang akurat;
- g) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pembinaan/pengawasan usaha perkebunan dan kemitraan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan informasi yang akurat;
- h) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan gangguan usaha perkebunan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kinerja usaha perkebunan;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan renstra dinas agar sesuai dengan capaian target;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengolahan dan



Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengolahan dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengolahan dan pemasaran;
- b) Penyusunan kebijakan, penyusunan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pengolahan dan pemasaran
- c) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran;
- d) Penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan pasca panen;
- f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bimbingan usaha;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis promosi dan pemasaran;
- h) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengolahan dan pemasaran;
- i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan pengolahan pasca panen, bimbingan usaha dan promosi dan pemasaran; dan
- j) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.



Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengolahan dan pemasaran berdasarkan renstra dinas untuk mencapai target Kinerja yang diharapkan;
- f) Menyelenggarakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pengolahan dan pemasaran berdasarkan peraturan menteri pertanian untuk mencapai mutu dan harga komoditi yang pantas;
- g) Mengendalikan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran berdasarkan usulan kabupaten/ kota dan kelompok tani agar terpenuhi alat pengolahan sesuai standar;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan



- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang perkebunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perkebunan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan berkelanjutan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang perkebunan berkelanjutan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- d) Pengoordinasian dan pencegahan terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- e) Pengoordinasian upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
- f) Pengoordinasian upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
- g) Pelaksanaan pemberian masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usahaperkebunan;
- h) Pemberian bimbingan kepada usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;



- i) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang fasilitasi perkebunan berkelanjutan;
- j) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan pengendalian kebakaran kebun, mitigasi emisi gas rumah kaca serta konservasi lahan dan air; dan
- k) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Melaksanakan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan Berdasarkan pedoman pelaksanaan agar tercapai target yang diharapkan;
- f) Melaksanakan koordinasi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan berdasarkan Tupoksi dan regulasi agar berjalan sesuai kaidah yang berlaku;



- g) Melaksanakan koordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*) berdasarkan tupoksi dan Peraturan untuk menjadikan perkebunan yang berkelanjutan;
- h) Menyiapan bahan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan berdasarkan tupoksi dan peraturan untuk menjadi Perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- i) Menyiapan bahan bimbingan kepada usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan berdasarkan tupoksi dan regulasi agar menjadikan perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, bahan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian berdasarkan fungsi tugas bawahan agar tertib administrasi, bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan renstra dinas agar sesuai dengan capaian target;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala



Dinas. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih, pemantauan, evaluasi program, dan melaksanakan urusan ketatausahaan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan pengawasan benih perkebunan;
- b. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
- c. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- d. Pengendalian pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
- e. Pengsertifikasian bibit kebun plasma/ kemitraan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- g. Pengkoordinasian kegiatan, pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
- h. Pengkoordinasian tugas penanganan kasus benih ilegal;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, yaitu:

- a. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
- b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



8. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 14, UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan perlindungan terhadap tanaman perkebunan;
- b. Penyebaran dan pemasaran Bio Pestisida dan APH;
- c. Penyiapan bahan dalam memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosi OPT;
- d. Penyiapan bahan dalam produksi dan pengembangan biopestisida dan Agens Pengendali Hayati;
- e. Penyiapan bahan dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terhadap pengembangan Bio Pestisida dan APH;
- f. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- g. Pengembangan teknologi pengendalian OPT;
- h. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian OPT;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, yaitu:



- a. Seksi Pengendalian OPT;
- b. Seksi Pengembangan Bio Pesticida dan APH;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 25, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu menyiapkan bahan tanam perkebunan dan pemantauan, evaluasi program kerja serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kerja sama dengan sumber benih;
- c. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- d. Pelaksanaan pengendalian, perumusan kebijakan pelayanan kebutuhan benih masyarakat;
- e. Pelaksanaan penyebaran informasi/ sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyak pembibitan tanaman;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;
- g. Pelaksanaan produksi, pemeliharaan dan pengembangan kebun koleksi, kebun induk, Pohon Induk Terpilih, dan Blok Penghasil Tinggi; dan
- h. Penyiapan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman tahunan dan penyegar serta semusim dan rempah.

UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

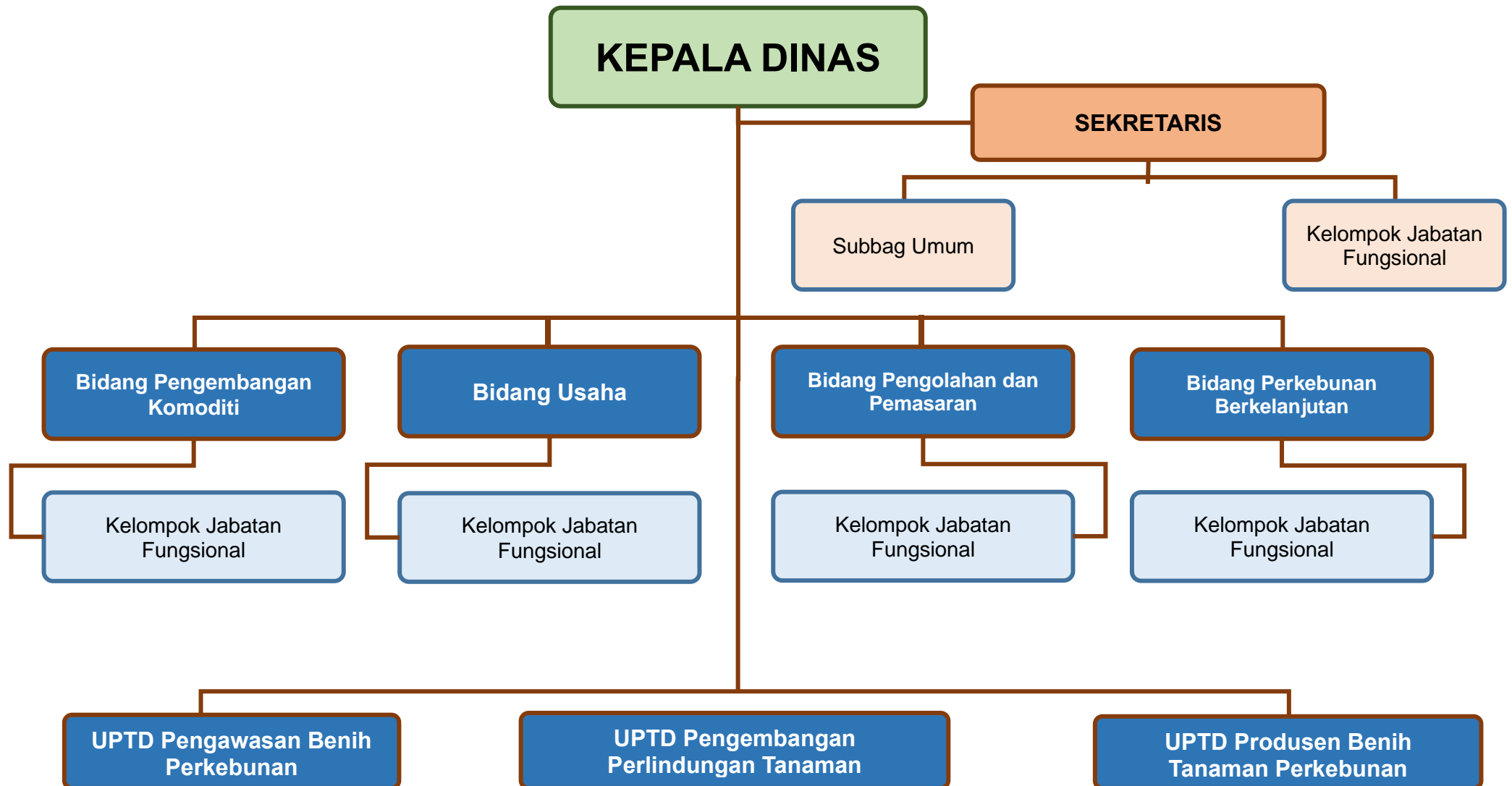
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP), yaitu:

- a. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- b. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil sejumlah 124 (Seratus Dua Puluh Empat) orang, dimana 75 (Tujuh Puluh Lima) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif, 6 (Enam) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 43 Tenaga Teknis/Non Teknis dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Prov. Kaltim per 31 Desember 2023

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Kepala Dinas	1		1			1				
Sekretaris	1		1			1				
Kasubbag. Umum	1			1			1			
Pengadministrasi Umum	2			1			1			1
Pranata Kearsipan		1		1			1			
Pengadministrasi Kepegawaian	1			1						1
Pengadministrasi Persuratan	1				1					1
Arsiparis Terampil	1				1				1	
Pengelola Kepegawaian	1	1					2			
Pengelola Sarana Dan Prasarana		2					2			
Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran		2		1			2			
Pengelola Program Dan Laporan	1			1			1			
Pengadministrasi Umum		1			1					1
Pengelola Data	1	1		1			2			
Pengelola Monitoring Dan Evaluasi	1						1			
PPID Pembantu	1						1			
Perencana Ahli Muda	1		1			1				
Pengelola Data		1		1			1			
Pengelola Barang Milik Negara	1			1			1			
Pengelola Keuangan	1	1		1			1	1		
Pengadministrasi Keuangan	1	2		1	1					3
Penyusun Laporan Keuangan		1						1		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Kabid Perkebunan Berkelanjutan		1	1			1				
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	1		3		2	1			
Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana Dan Prasarana Pertanian	1	1		1		1	1			
Pengadministrasi Keuangan	1			1						1
Pengadministrasi Umum	1			1			1			
Petugas GIS	1						1			
Kabid Pengembangan Komoditi		1	1			1				
Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda	2	1		3			3			
Pengadministrasi Keuangan		1		1						1
Pengadministrasi Umum	1			1						1
Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	1				1					1
Pengelola Data Bimbingan Ekstensifikasi	2						2			
Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	1						1			
Penyusun Teknis Usaha Budidaya	1	1					2			
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran	1		1			1				
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda		1		1			1			
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda		1		1		1				
Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik	1			1		1				
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama		1		1			1			
Pengadministrasi Umum	2				2					2
Penyusun Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen		1					1			
Pengelola Data Pasca Panen		1					1			
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	1						1			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Kepala Bidang Usaha	1		1			1				
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	3			3			3			
Pengadministrasi Umum		2		2			1			1
Pengelola Data	1			1			1			
Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	3	1					4			
Analisis Kemitraan		1					1			
Kepala Uptd Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1		1			1				
Kasi Tanaman Semusim dan Rempah	1		1				1			
Kasi Tanaman Tahunan Dan Penyegar	1			1			1			
Kasub Bagian Tata Usaha		1		1			1			
Pengelola Keuangan	1	1		2			2			
Pengadministrasi Umum		1		1						1
Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan Atau Perkebunan	4	5		1		1	8			
Kepala Uptd Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1		1			1				
Kasub Bagian Tata Usaha		1	1			1				
Kasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	1			1			1			
Kasi Pengembangan Bio Pestisida Dan Aph		1		1			1			
Pengelola Kepegawaian	1			1			1			
Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil Dan Kultur		1		1			1			
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Pertama	1			1			1			
Pengadministrasi Umum	2	1		2	1					3
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Terampil	1				1				1	
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Penyelia	3									3
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan		1					1			
Pengelola Laboratorium		2					2			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	1						1			
Kepala Uptd Pengawasan Benih Perkebunan (Pbp)		1		1			1			
Kasi Pengawasan Dan Peredaran Benih		1	1				1			
Kasubbag. Tata Usaha		1		1			1			
Kasi Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Benih		1		1			1			
Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	6			3			3			3
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan		1		1			1			
Pengadministrasi Keuangan		1		1						1
Pengadministrasi Umum		1		1						1
Penelaah Data Sumber Benih	1						1			
Pengelola Data Kelembagaan Benih		1					1			
Analisis Laboratorium Tumbuhan Dan Sarana		1					1			
Pengelola Kelembagaan Benih		1					1			
JUMLAH PNS	45	30	12	54	9	16	78	2	2	26
JUMLAH PPPK	6	0	0	0	0	0	3	0	0	3
JUMLAH HONOR/PTT	19	24	0	0	0	0	37	4	0	2
JUMLAH PNS DAN HONOR/PTT	70	54	12	54	9	16	118	6	2	31

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai dinas teknis yang sebagian besar tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani pekebun, Dinas Perkebunan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan para mitra kerjanya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang mutlak dan harus diutamakan agar Dinas Perkebunan dapat berkembang dan menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik.



Kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki:

- a. Ketersediaan ruang/lahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk pengembangan subsektor perkebunan;
- b. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
- c. Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
- d. Kualitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
- e. Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;
- f. Tersedianya kawasan areal perkebunan yang cukup luas; dan
- g. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembangunan daerah cenderung meningkat.

2. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki:

- a. Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
- b. Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan tranformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
- c. Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
- d. Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
- e. Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
- f. Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi;
- g. Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru; dan



- h. Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki :
- a. Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;
 - b. Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
 - c. Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
 - d. Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
 - e. Lemahnya penegakan hukum;
 - f. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;
 - g. Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
 - h. Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat;
 - i. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah;
 - j. Lambatnya regenerasi untuk menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun; dan
 - k. Rendahnya produktivitas kebun dan rendahnya nilai tambah hasil perkebunan.
4. Ancaman (*Threats*) yang dimiliki :
- a. Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik;
 - b. Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal;
 - c. Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
 - d. Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
 - e. Isu kehilangan keanekaragaman hayati akibat pembukaan



lahan untuk perkebunan;

- f. Infrastruktur jalan pada areal perkebunan masih terbatas;
- g. Berkurangnya tenaga kerja subsektor perkebunan;
- h. Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang tidak dapat dikendalikan;
- i. Lambatnya hilirisasi untuk menampung dan mengolah produk hasil perkebunan; dan
- j. Terhambatnya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka dapat diidentifikasi isu strategis yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan yaitu :

1. Diperlukan tindakan penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
2. Peningkatan produktivitas kebun khususnya kebun swadaya;
3. Meningkatkan upaya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan penguatan kelembagaan pekebun yang baik;
4. Tuntutan penerapan prinsip pembangunan perkebunan secara berkelanjutan di Kalimantan Timur;
5. Memperbaiki sistem pengelolaan data perkebunan dan diseminasinya;



6. Membuka jalur pemasaran komoditas perkebunan hingga ke tingkat internasional;
7. Melakukan diversifikasi pengembangan komoditas perkebunan;
8. Pemenuhan pangan dan energi untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara;
9. Penggerak dan pemulih ekonomi kerakyatan melalui usaha perkebunan di masa pandemi Covid-19; dan
10. Percepatan pelaksanaan pembangunan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung pencapaian target dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sarana dan prasarana kerja berdasarkan neraca asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Dinas Perkebunan		
	Bangunan Gedung		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	78	M ²
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	100	M ²
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.008	M ²
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	89,25	M ²
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	72,00	M ²
	Rumah Panel	30,25	M ²
	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain (Dst)	53,85	M ²
	Gedung Pos Jaga Permanen	12	M ²
	Bangunan Tempat Parkir	228	M ²
	Rumah Negara Golongan Ii Tipe B Permanen	300	M ²
	Rumah Negara Golongan Iii Tipe A Permanen	43,40	M ²
2	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan		
	Bangunan Gedung		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		
	Bangunan Gedung		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	408	M ²
	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	12	M ²
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120	M ²
	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (Dst)	50	M ²
	Asrama Permanen	500	M ²
	Pagar Permanen	113	M ²
4	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		
	Bangunan Gedung		
	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	106,73	M ²
5	Dinas Perkebunan	1.362	Unit
	Alat Besar	9	Unit
	Diesel Pile Driver	3	Unit
	Mesin Proses Lainnya (Dst)	1	Unit
	Pompa Air	5	Unit
	Komputer	330	Unit
	P.C Unit	75	Unit
	Lap Top	42	Unit
	Note Book	70	Unit
	Tablet Pc	10	Unit
	Personal Komputer Lainnya	4	Unit
	Komputer Unit Lainnya	4	Unit
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
	Speaker Komputer	1	Unit
	Peralatan Minikomputer Lainnya	2	Unit
	Monitor	3	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	99	Unit
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13	Unit
	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Unit
	Server	1	Unit
	Router	1	Unit
	Peralatan Jaringan Lainnya	2	Unit
	Alat Angkutan	88	Unit
	Jeep	5	Unit
	Station Wagon	16	Unit
	Sepeda Motor	59	Unit
	Bemo	4	Unit
	Gerobak Tarik	4	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	51	Unit
	Mesin Penghalus	1	Unit
	Gergaji Chain Saw	1	Unit
	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya (Dst)	5	Unit
	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Lainnya (Dst)	2	Unit
	Af Generator Tone Generator	1	Unit
	Global Positioning System	25	Unit
	Scanner (Universal Tester)	11	Unit
	Propile Proyektor Toyo Serie	3	Unit
	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	1	Unit
	Neraca Dengan Digital Display	1	Unit
	Alat Pertanian	14	Unit
	Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)	1	Unit
	Rak-Rak Penyimpan	10	Unit
	Lemari Penyimpan	1	Unit
	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian Lainnya	2	Unit
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	688	Unit
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	Unit
	Mesin Ketik Listrik	6	Unit
	Mesin Ketik Braille	1	Unit
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	3	Unit
	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Unit
	Lemari Kayu	13	Unit
	Rak Besi	17	Unit
	Filing Cabinet Besi	5	Unit
	Brandkas	3	Unit
	Kardex Kayu	12	Unit
	Lemari Display	1	Unit
	Lemari Kaca	3	Unit
	Lemari Makan	1	Unit
	Cctv - Camera Control Television System	30	Unit
	Papan Visual/Papan Nama	2	Unit
	Peta	1	Unit
	Alat Penghancur Kertas	3	Unit
	Mesin Absensi	1	Unit
	Alat Pencetak Label	1	Unit
	Overhead Projector	1	Unit
	Display	4	Unit
	Lcd Projector/Infocus	7	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Papan Nama Instansi	16	Unit
	Papan Tulis	3	Unit
	Alat Penghancur Plastik	2	Unit
	Alat Kantor Lainnya	3	Unit
	Meja Kerja Besi/Metal	2	Unit
	Meja Kerja Kayu	21	Unit
	Meja Rapat	19	Unit
	Meja Resepsionis	4	Unit
	Meja Tambahan	6	Unit
	Kursi Rapat	62	Unit
	Kursi Tamu	10	Unit
	Meja Komputer	8	Unit
	Sofa	8	Unit
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	7	Unit
	Mesin Cuci	1	Unit
	Lemari Es	2	Unit
	A.C. Window	19	Unit
	A.C. Split	37	Unit
	Kipas Angin	2	Unit
	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Unit
	Rice Cooker (Alat Dapur)	2	Unit
	Treng Air/Tandon Air	1	Unit
	Mesin Parutan Kelapa	1	Unit
	Oven Gas	1	Unit
	Alat Dapur Lainnya	1	Unit
	Televisi	13	Unit
	Amplifier	1	Unit
	Loudspeaker	7	Unit
	Sound System	2	Unit
	Wireless	2	Unit
	Microphone	13	Unit
	Mic Conference	35	Unit
	Camera Video	2	Unit
	Camera Film	6	Unit
	Tustel	1	Unit
	Dispenser	2	Unit
	Handy Cam	11	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1	Unit
	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	4	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	75	Unit
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	Unit
	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	2	Unit
	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon Ii	1	Unit
	Meja Tamu Biasa	1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	2	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	5	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	15	Unit
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	33	Unit
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	12	Unit
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon Ii	1	Unit
	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	7	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	Unit
	Buffet Kaca	3	Unit
	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	3	Unit
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	166	Unit
	Audio Amplifier	1	Unit
	Audio Visual	1	Unit
	Microphone/Wireless Mic	3	Unit
	Power Supply Microphone	1	Unit
	Audio Master Control Unit	1	Unit
	Uninterruptible Power Supply (Ups)	67	Unit
	Power Amplifier	2	Unit
	Digital Audio Taperecorder	20	Unit
	Peralatan Studio Audio Lainnya (Dst)	6	Unit
	Camera Electronic	14	Unit
	Video Monitor	1	Unit
	Video Tape Recorder Portable	2	Unit
	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	Unit
	Rak Peralatan	1	Unit
	Tripod Camera	1	Unit
	Lensa Kamera	1	Unit
	Mixer Pvc	1	Unit
	Layar Film/Projector	18	Unit
	Camera Digital	2	Unit
	Mesin Jilid	1	Unit
	Alat Studio Lainnya	1	Unit
	Pesawat Telephone	5	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Handy Talky (Ht)	7	Unit
	Facsimile	2	Unit
	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya (Dst)	2	Unit
	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm Lainnya (Dst)	1	Unit
	Alat Komunikasi Radio Uhf Lainnya (Dst)	2	Unit
	Wireless Amplifier	1	Unit
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	Unit
	Alat Kedokteran Gigi Lainnya (Dst)	1	Unit
	Alat Laboratorium	9	Unit
	Microskop Binocular	1	Unit
	Mesin Pengering	1	Unit
	Pilling Tester	5	Unit
	Vacum Evaporator	1	Unit
	Layar	1	Unit
	Alat Persenjataan	6	Unit
	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Unit
	Gps	5	Unit
6	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	342	Unit
	Komputer	67	Unit
	P.C Unit	14	Unit
	Lap Top	16	Unit
	Note Book	11	Unit
	Tablet Pc	3	Unit
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Unit
	Alat Angkutan	15	Unit
	Station Wagon	1	Unit
	Sepeda Motor	13	Unit
	Gerobak Dorong	1	Unit
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	7	Unit
	Gergaji Chain Saw	1	Unit
	Global Positioning System	4	Unit
	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	2	Unit
	Alat Pertanian	8	Unit
	Lemari Penyimpan	5	Unit
	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	2	Unit
	Alat Laboratorium Lainnya	1	Unit
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	178	Unit
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Unit
	Lemari Besi/Metal	2	Unit
	Lemari Kayu	4	Unit
	Filing Cabinet Besi	3	Unit
	Brandkas	2	Unit
	Lemari Kaca	1	Unit
	Cctv - Camera Control Television System	14	Unit
	Mesin Absensi	1	Unit
	Overhead Projector	1	Unit
	Lcd Projector/Infocus	1	Unit
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit
	Meja Rapat	7	Unit
	Meja Resepsionis	1	Unit
	Meja Panjang	1	Unit
	Kursi Rapat	25	Unit
	Kursi Tamu	1	Unit
	Kursi Putar	5	Unit
	Kursi Lipat	1	Unit
	Sofa	3	Unit
	Jam Elektronik	1	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
	Lemari Es	1	Unit
	A.C. Window	6	Unit
	A.C. Split	18	Unit
	Kipas Angin	1	Unit
	Kitchen Set	1	Unit
	Televisi	7	Unit
	Sound System	1	Unit
	Microphone Floor Stand	1	Unit
	Mic Conference	12	Unit
	Tangga Aluminium	1	Unit
	Handy Cam	2	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	3	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	5	Unit
	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	11	Unit
	Meja Rapat Pejabat Lainnya	4	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	2	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	10	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Iii	2	Unit
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	2	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	Unit
	Buffet Kaca	1	Unit
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	28	Unit
	Audio Mixing Console	1	Unit
	Uninterruptible Power Supply (Ups)	12	Unit
	Peralatan Studio Audio Lainnya (Dst)	1	Unit
	Camera Electronic	7	Unit
	Layar Film/Projector	2	Unit
	Camera Digital	1	Unit
	Pesawat Telephone	1	Unit
	Facsimile	1	Unit
	Wireless Amplifier	2	Unit
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	5	Unit
	Autoclave Table	2	Unit
	Hand Tally Counter	3	Unit
	Alat Laboratorium	31	Unit
	Laminar Air Flow	1	Unit
	Refrigerator	3	Unit
	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1	Unit
	Micro Pippettes	2	Unit
	Alat Laboratorium Microbiologi Lainnya (Dst)	1	Unit
	Analistic Balance	1	Unit
	Spatula	1	Unit
	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	Unit
	Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
	Colony Counter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
	Germinator	1	Unit
	Grain Moisture Tester	1	Unit
	Personal Computer	4	Unit
	Scale (Alat Laboratorium Pertanian)	3	Unit
	Seed Divider	1	Unit
	Hot Plate Stirrer	1	Unit
	Alat Box Compression Test	1	Unit
	Unit Alat Laboratorium Lainnya Lainnya (Dst)	2	Unit
	Bunsen Gas Bumer	1	Unit
	Mikroskop	1	Unit
	Biological Microscope	1	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Alat Laboratorium Penunjang Lainnya (Dst)	1	Unit
	Alat Persenjataan	3	Unit
	Background	1	Unit
	Lemari Suhu	1	Unit
	Trinoc Microscope Fluorescence	1	Unit
7	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	404	Unit
	Alat Besar	3	Unit
	Portable Generating Set	1	Unit
	Pompa Air	2	Unit
	Komputer	51	Unit
	P.C Unit	11	Unit
	Lap Top	10	Unit
	Note Book	9	Unit
	Peralatan Minikomputer Lainnya	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Unit
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
	Peralatan Personal Komputer Lainnya	6	Unit
	Alat Angkutan	3	Unit
	Station Wagon	1	Unit
	Sepeda Motor	2	Unit
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	4	Unit
	Mesin Bor	2	Unit
	Gergaji Chain Saw	1	Unit
	Alat Ukur/Pembanding Lainnya (Dst)	1	Unit
	Alat Pertanian	17	Unit
	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	10	Unit
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya (Dst)	3	Unit
	Alat Laboratorium Lainnya	3	Unit
	Alat Pengolahan Lainnya	1	Unit
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	291	Unit
	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	1	Unit
	Lemari Besi/Metal	3	Unit
	Rak Besi	1	Unit
	Rak Kayu	1	Unit
	Filing Cabinet Besi	4	Unit
	Brandkas	2	Unit
	Lemari Kaca	1	Unit
	Cctv - Camera Control Television System	5	Unit
	Mesin Absensi	1	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Alat Kantor Lainnya	1	Unit
	Meja Kerja Kayu	4	Unit
	Kursi Besi/Metal	15	Unit
	Meja Rapat	25	Unit
	Tempat Tidur Kayu	34	Unit
	Meja 1/2 Biro	7	Unit
	Meja Makan Besi	4	Unit
	Kursi Putar	1	Unit
	Kursi Lipat	64	Unit
	Meja Komputer	2	Unit
	Sofa	1	Unit
	Meubeleur Lainnya	2	Unit
	Jam Mekanis	3	Unit
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
	Mesin Cuci	1	Unit
	Lemari Es	4	Unit
	A.C. Window	2	Unit
	A.C. Split	18	Unit
	Kipas Angin	10	Unit
	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Unit
	Kompas Minyak	3	Unit
	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Unit
	Oven Listrik	2	Unit
	Televisi	4	Unit
	Loudspeaker	2	Unit
	Sound System	3	Unit
	Camera Film	1	Unit
	Dispenser	4	Unit
	Handy Cam	1	Unit
	Gordiyin/Kray	1	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	8	Unit
	Alat Pemadam/Portable	2	Unit
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit
	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	Unit
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	3	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit
	Buffet Kayu	13	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	24	Unit
	Uninterruptible Power Supply (Ups)	8	Unit
	Camera Electronic	2	Unit
	Video Tape Recorder Portable	2	Unit
	Lensa Kamera	1	Unit
	Layar Film/Projector	3	Unit
	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah)	1	Unit
	Prisma Ukur	2	Unit
	Kamera Udara	4	Unit
	Facsimile	1	Unit
	Alat Laboratorium	11	Unit
	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
	Timbangan/Neraca	1	Unit
	Ph Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit
	Alat Laboratorium Umum Lainnya (Dst)	1	Unit
	Shaker (Alat Laboratorium Patologi)	1	Unit
	Hot Plate Stirer	1	Unit
	Solarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
	Mikroskop	2	Unit
	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	1	Unit
8	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan	239	Unit
	Alat Besar	2	Unit
	Stationary Generating Set	1	Unit
	Portable Water Pump	1	Unit
	Komputer	32	Unit
	P.C Unit	7	Unit
	Lap Top	3	Unit
	Note Book	5	Unit
	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Unit
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Unit
	Alat Angkutan	13	Unit
	Station Wagon	1	Unit
	Sepeda Motor	10	Unit
	Gerobak Dorong	2	Unit
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3	Unit
	Gergaji Chain Saw	1	Unit
	Bak Air	1	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Tool Kit Set	1	Unit
	Alat Pertanian	13	Unit
	Arit	3	Unit
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Unit
	Alat Pengering (Dryer)	1	Unit
	Lemari Penyimpan	1	Unit
	Alat Prosesing Lainnya	4	Unit
	Alat Pengolahan Lainnya	3	Unit
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	163	Unit
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	Unit
	Lemari Besi/Metal	2	Unit
	Lemari Kayu	4	Unit
	Filing Cabinet Besi	8	Unit
	Brandkas	2	Unit
	Lemari Kaca	6	Unit
	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
	White Board	2	Unit
	Peta	1	Unit
	Mesin Absensi	1	Unit
	Papan Nama Instansi	2	Unit
	Alat Kantor Lainnya	6	Unit
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit
	Meja Kerja Kayu	11	Unit
	Kursi Kayu	1	Unit
	Meja Rapat	2	Unit
	Tempat Tidur Besi	2	Unit
	Kursi Rapat	1	Unit
	Kursi Putar	7	Unit
	Sofa	3	Unit
	Jam Mekanis	1	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	6	Unit
	Alat Pembersih Lainnya	2	Unit
	Lemari Es	3	Unit
	A.C. Window	5	Unit
	A.C. Split	5	Unit
	Kipas Angin	1	Unit
	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Unit
	Tabung Gas	2	Unit
	Trenk Air/Tandon Air	1	Unit
	Alat Dapur Lainnya	2	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Televisi	2	Unit
	Wireless	2	Unit
	Camera Video	1	Unit
	Tustel	2	Unit
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Unit
	Tiang Bendera	2	Unit
	Tangga Aluminium	1	Unit
	Dispenser	1	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	31	Unit
	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	1	Unit
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Unit
	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	5	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	2	Unit
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3	Unit
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon Ii	1	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Unit
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	7	Unit
	Peralatan Studio Audio Lainnya (Dst)	1	Unit
	Camera Film	1	Unit
	Layar Film/Projector	1	Unit
	Telephone (Pabx)	1	Unit
	Pesawat Telephone	2	Unit
	Facsimile	1	Unit
	Alat Laboratorium	3	Unit
	Alat Laboratorium Cocok Tanam Lainnya (Dst)	2	Unit
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan Lainnya (Dst)	1	Unit
	Alat Persenjataan	3	Unit
	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	3	Unit
9	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	58	Unit
	Alat Besar	2	Unit
	Pompa Air	2	Unit
	Komputer	21	Unit
	P.C Unit	7	Unit
	Lap Top	3	Unit
	Tablet Pc	2	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Unit
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
	Alat Pertanian	2	Unit
	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2	Unit
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	29	Unit
	Lemari Besi/Metal	1	Unit
	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
	Papan Pengumuman	7	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	7	Unit
	A.C. Split	5	Unit
	Treng Air/Tandon Air	5	Unit
	Tangga Aluminium	1	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	1	Unit
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	4	Unit
	Uninterruptible Power Supply (Ups)	3	Unit
	Layar Film/Projector	1	Unit

Sumber: Daftar Aset Tetap Aset Lainnya 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, bahwa Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra merupakan turunan dari RPJMD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program/kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Isu-isu strategis serta analisis *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats* (SWOT).

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin



diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2019-2023 adalah ***“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat”***

2. Misi

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Adapun misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional; dan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

3. Tujuan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis adalah tujuan. Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat dirincikan sebagai berikut :



“Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan”.

4. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan, dengan indikator :
 - Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)
2. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, dengan indikator :
 - Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) (Perusahaan)
3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun, dengan indikator :
 - NTP perkebunan rakyat (%)

Hubungan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 2.1. Korelasi Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian s.d Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Target Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)			4,49	5,1	5,4	5,0	5,2	5,3	5,3
		Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544	18.773	19.087	20.493	21.997	21.997
		Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>) (Perusahaan)	38	43	48	53	58	63	63
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat (%)	88,45	89	92	108	110	112	112



5. Strategi dan Kebijakan

Prinsip pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur adalah **“Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan yang didasari pada penerapan konsep *Green Economy*”** sebagai terjemahan misi ke 2 dan misi ke 4 RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Dalam pelaksanaannya, strategi dan kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu mencapai tujuan perbaikan kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi permasalahan sosial yang mungkin ditimbulkan sebagai dampak pembangunan perkebunan.

Adapun Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan;
2. Menyediakan bahan baku untuk pemenuhan industri hilir;
3. Mempertahankan usaha perkebunan sebagai penggerak dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19;
4. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan);
5. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah;
6. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan;
7. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid;
8. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
9. Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan;
10. Mengurangi kerugian hasil akibat serangan OPT;



11. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan;
12. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat; dan
13. Peningkatan fasilitas pembangunan kebun rakyat.

Pelaksanaan Strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu diseminasi dan sosialisasi Strategi dan Kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung didesain untuk mencapai tujuan.

Tabel 2.2. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Misi 1 : Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional	
	1. Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produksi komoditi perkebunan
		Menyediakan bahan baku untuk pemenuhan industri hilir <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
		Mempertahankan usaha perkebunan sebagai penggerak dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19 <ul style="list-style-type: none">• Mendorong usaha perkebunan sebagai penopang ekonomi
	Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan	
	1. Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan) <ul style="list-style-type: none">• Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
		Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
		Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan
	2. Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan Penanganan konflik perkebunan
		Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan <ul style="list-style-type: none"> Efektivitas mitigasi emisi GRK Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan Penanganan pengendalian kebakaran lahan perkebunan Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan
		Mengurangi kerugian hasil akibat serangan OPT <ul style="list-style-type: none"> Penanganan hama dan penyakit Pengembangan APH dan Biopestisida
	3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat <ul style="list-style-type: none"> Memperpendek mata rantai pemasaran produk perkebunan rakyat Memfasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha perkebunan Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor



Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Membangun outlet-otlet pemasaran produk olahan perkebunan
		Peningkatan fasilitas pembangunan kebun rakyat <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan padat karya pada pembangunan perkebunan rakyat

6. Program/ Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat.

Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, integral dari program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya visi Dinas Perkebunan sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan subsektor perkebunan. Penjabaran dari program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dikembangkan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan	Miliar rupiah, atas dasar angka konstan	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian *)	1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian *)	1. Penataan Prasarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian *)	1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
					2. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian
					3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
					5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian *)	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
				Program perizinan Usaha Pertanian *)	1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat	%	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian *)	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
				Program Penyuluhan Pertanian *)	1. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

*) Program Prioritas

dengan target program dan kegiatan beserta indikator dan target pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
	DINAS PERKEBUNAN			
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92	92
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	74	74
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12	12
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	79	79
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20	20
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	107
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	5	5
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	13	13
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	10
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	58
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3	3
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3	3
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	36
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	21	21
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18313874,25	18,313,874.25
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/ Ha)	20.03	20.03
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (Kelompok)	30	30
		Luas kebun yang dibangun (Ha)	1500674	1,500,674
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas (Ha)	545	745



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4.044	4.044
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku Usaha)	137	137
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9317	9317
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	150	150
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	35
3.27.006.1.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Perusahaan)</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	1	1
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	1	1
3.27.007.1.01	<i>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah SDM Petugas Lapangan dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)</i>	<i>25</i>	<i>50</i>
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	45



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok Tani)	31	31
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	7	7
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1	1
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10	10
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok Tani)	4	4
		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20	20
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1	1
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)	1	1
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya (Unit)	1	1
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	1	1
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN			
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92	92
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12	12



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20	20
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	13
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3	3
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumentasi)	12	12
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6	6
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	25
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3	3



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3	3
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	5
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	13	59
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar (Benih)	6,000,000	6,000,000
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)	6,000,000	6,000,000
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150	150
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1	1
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92	92
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12	12
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20	20
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	6
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	3	3
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5	5



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	13
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3	3
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3	3
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	10	10
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rupiah)	774,940,000	774,940,000
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156	156



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	156	500
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN			
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	92	92
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12	12
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20	20
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	6
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	3	3
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	2
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3	3
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3	3
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	13	13



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja	Perubahan Renja
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85	85
3.27.002.1.02	<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)</i>	50.000	50.000
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1	1

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami reviu di tahun 2022 dan berakhir di tahun 2023. Adapun review IKU di tahun 2022 seperti dalam tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 2.5. Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	Sektor perkebunan berperan serta dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	BPS	Total Output - Konsumsi Antara	Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD PBP dan Sekretariat
2.	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	Sektor perkebunan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Dirjenbun	Penambahan perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO	Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD P2TP
3.	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	Sektor perkebunan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun	BPS	$\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani}} \times 100$	Bidang Pengolahan dan Pemasaran, serta UPTD PBTP



Selain itu, terdapat juga indikator tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis RPJMD, yaitu **Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)**.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini Gubernur sebagai pengambil kebijakan dan pimpinan PD sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB usaha sub sektor perkebunan	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	21.997
Meningkatnya usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan	Perusahaan	63



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
yang memenuhi kaidah keberlanjutan	sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)		
Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat	%	112

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 64.264.860.330,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 32.218.346.030,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 19 oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menjadi Rp. 71.331.792.328,- (bertambah Rp. 7.066.931.998,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 39.285.278.028,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 67.863.776.752,- (95,14%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 37.066.824.492,- (94,35%) belanja pembangunan sebesar Rp. 30.796.942.260,- (96,10%).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

2. Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Pada tahun 2023, target belanja APBD perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7. Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Penunjang	39.285.287.028	37.066.824.492	94,35
2	Belanja Pembangunan	32.046.514.300	30.796.942.260	96.10
Jumlah		71.331.792.328	67.863.766.752	95,14

1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	58.303.482.928	55.004.889.536	94,34
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	7.834.207.500	7.707.150.018	98,38
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	5.194.101.900	5.151.727.198	99,18
Jumlah		71.331.792.328	67.663.766.752	95,14



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2023, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan hasil penilaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	2022		2023	
		Bobot (%)	Nilai (Poin)	Bobot (%)	Nilai (Poin)
1	Perencanaan Kinerja	30	27,55	30	21,60
2	Pengukuran Kinerja	25	18,75	20	15,40
3	Pelaporan Kinerja	15	12,22	10	8,00
4	Evaluasi Internal	10	5,73	20	14,80
5	Pencapaian Kinerja	20	11,88	20	13,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,12	100	73,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memberikan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
A. Evaluasi Perencanaan Kinerja			
1.	Menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahun	Sudah menerapkan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun (Renstra Disbun Prov. Kaltim Tahun 2024-	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
		2026) dalam kurun waktu 3 tahun	
2.	Melakukan perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dokumen perencanaan serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah	Dalam penyusunan Renstra Disbun Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 memperhatikan capaian kinerja Tahun 2019-2023 dan Perbaikan dokumen tersebut diketahui oleh kepala Perangkat Daerah	Sudah
B. Pengukuran Kinerja			
1.	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang oleh setiap level organisasi dilakukan secara bulanan	Telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Sudah
2.	Menyusun kriteria pemberian Reward dan Punishment serta penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran kinerja yang telah disusun	Telah melakukan penyusunan terkait pemberian Reward dan Punishment berdasarkan pengukuran kinerja yang telah disusun	Sudah
3.	Membandingkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada 2 tahun anggaran sebelumnya	Telah menyusun matrik membandingkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
		pada 2 tahun anggaran sebelumnya	
C. Pelaporan Kinerja			
1.	Informasi dalam laporan kinerja agar selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab) dengan regulasi/ memasukan penilaian risiko dll yang dituangkan dalam laporan	Dokumen Laporan Kinerja ditandatangani oleh Pimpinan dan telah diberikan rekomendasi atas permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja	Sudah
2.	Informasi dalam laporan kinerja agar selalu mempengaruhi perubahan budaya organisasi	LKjIP memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai sebagai berikut : 1. Seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen 2. Adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen 3. Menurunnya angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai 4. Selalu memberikan rekomendasi jika terdapat kendala / hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi / adaptif.	Sudah
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
1.	Membuat perbandingan atas nilai implementasi SAKIP dalam periode 3 tahun sebelumnya	Telah menyusun perbandingan atas nilai implementasi SAKIP dalam periode 3 tahun sebelumnya	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
2.	Melampirkan bukti/ dokumentasi secara rinci dalam bentuk tabel atas implementasi rekomendasi komponen SAKIP dan Tindaklanjut hasil evaluasi agar keseluruhannya diimplementasikan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja (perencanaan selanjutnya)	Menyusun Matrik tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2022	Sudah
3.	Membuat perbandingan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja selama 2 tahun terakhir)	Telah membuat analisis perbandingan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja selama 2 tahun terakhir	Sudah
4.	Meningkatkan capaian kinerja dinas secara menyeluruh	Telah melakukan peningkatan capaian kinerja dinas secara menyeluruh yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dengan berfokus pada analisis keberhasilan	Sudah
E. Capaian Akuntabilitas Kinerja			
1.	Mengupayakan peningkatan kinerja secara optimal dengan peningkatan level yang lebih tinggi	Telah berupaya untuk meningkatkan kinerja secara optimal dengan peningkatan level yang lebih tinggi dengan mengikuti ajang nasional Abdi Bhakti Tani yang merupakan penghargaan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik bidang pertanian	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
2.	Mengupayakan peningkatan capaian kinerja tahun berjalan agar dapat melebihi capaian tahun sebelumnya	Peningkatan capaian kinerja tahun berjalan agar dapat melebihi capaian tahun sebelumnya dengan metode membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Sudah

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pengukuran indikator kinerja, seperti pada tabel di bawah ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.3. Pengukuran Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	21.997	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	21.997	17.890,80*	81,33
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	63	111	176,19
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	112	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	112	166,92	149,04

*) Angka sangat sementara tahun 2023 (Sumber BPS Provinsi Kalimantan Timur)



C. Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan perhitungan statistik perkebunan, realisasi kinerja pada tahun 2023 maupun realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	21.997	17.890,80*	81,33	Sumber: BPS (Angka sangat sementara tahun 2023)
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	111	176,19	(Sumber: Dirjenbun Kementan RI)
3	NTP perkebunan rakyat	Persen	112	166,92	149,04	Rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Sumber: BPS 2023)

Pada tahun 2023, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target. Adapun capaian dari masing-masing sasaran tersebut, meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Nilai PDRB sub



sektor perkebunan berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 17.890,80 Miliar Rupiah (81,33%) dari target 21.997 Miliar Rupiah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai PDRB sub sektor perkebunan berdasarkan harga konstan karena dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Namun capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 404 miliar rupiah atau 2,31% dari capaian tahun 2022. Hal ini didukung oleh produksi komoditi perkebunan tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 1.494.185 Ton atau 8,30% dari tahun 2022. Capaian produksi komoditi perkebunan berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 20.801.100 Ton. Dimana 20.719.888 Ton atau 99,57% berasal dari produksi komoditi kelapa sawit.

Sedangkan capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 4,74% dari target 5,3% atau 89,43% (Sumber BPS Kaltim angka sementara tahun 2023). Meskipun belum mencapai target, sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang berkontribusi paling besar terhadap capaian kontribusi PDRB pertanian dalam arti luas yakni sebesar 59,10%. Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

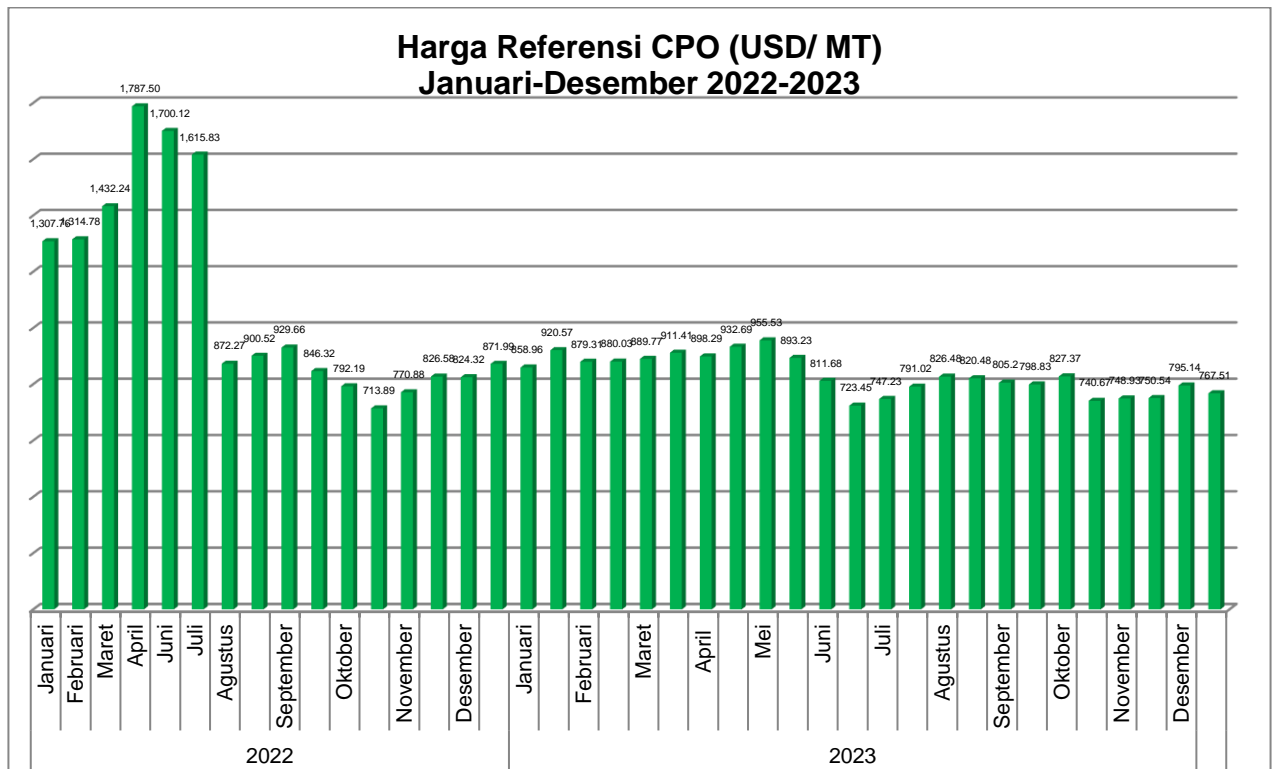
Kontribusi tersebut mengalami kenaikan seiring dengan harga referensi CPO pada beberapa bulan pada tahun 2023 di atas rata-rata harga referensi CPO dari Agustus 2022 sampai Desember 2023 yakni dikisaran USD 833,03,15/ MT, dimana pada bulan Agustus 2022 harga referensi CPO telah mengalami penurunan



secara drastis jika dibandingkan bulan Juli 2022 yaitu turun sebesar 46,02%. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah Indonesia berupa program *flush out*, peningkatan kuota ekspor, dan pungutan ekspor CPO sebesar nol persen yang berlaku sampai 31 Agustus 2022. Kebijakan pemerintah tersebut membuat ekspor Indonesia meningkat sehingga pasokan CPO dunia semakin membaik. Sementara itu, pengaruh eksternal penurunan harga referensi CPO di antaranya kebijakan Malaysia yang menghentikan produksi CPO karena kekurangan pekerja, serta kebijakan Rusia untuk menurunkan pajak ekspor minyak bunga matahari (*sunflower oil*). Program *flush out* atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 8 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022. Adapun daftar barang yang dibatasi ekspornya dimuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 20 Tahun 2022, yaitu meliputi CPO, RBD PO, RBD Palm Olein, dan UCO. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi dan stabilisasi rantai produksi dan perdagangan komoditas tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas produksi dan harga tandan buah segar (TBS) di level petani. Selama tahun 2023 harga CPO tertinggi terjadi pada bulan Mei periode I yaitu mencapai USD 955,53/ MT dan terendah pada bulan Juni periode II yaitu mencapai USD 723,45/ MT. Berikut harga referensi CPO selama tahun 2022-2023:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Sumber: Siaran Pers kementerian Perdagangan RI (Januari-Desember 2022-2023)

Gambar 3.1. Harga Referensi CPO Januari-Desember 2022-
2023

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu dengan terus meningkatkan nilai tambah dan produksi komoditi perkebunan di tahun berikutnya. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi kelapa sawit seluas 200 Ha;
2. Intensifikasi karet seluas 200 Ha;
3. Peremajaan Karet 136 Ha;
4. Intensifikasi kelapa seluas 20 Ha;
5. Intensifikasi kakao seluas 180 Ha;
6. Intensifikasi lada seluas 200 ha;
7. Perluasan kelapa sawit seluas 200 Ha;
8. Perluasan lada seluas 100 Ha;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

9. Perluasan kelapa seluas 20 Ha;
10. Perluasan kakao seluas 150 Ha;
11. Perluasan karet seluas 200 Ha;
12. Perluasan pala seluas 50 Ha; dan
13. Perluasan aren seluas 25 Ha.

Selain itu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan;
2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan;
3. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
4. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian; serta
5. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Diharapkan upaya-upaya tersebut akan meningkatkan nilai PDRB sub sektor perkebunan tahun 2023. Adapun rata-rata pertumbuhan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2023 bernilai positif sebesar 4,50%. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2023.



*Data sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

** Data angka sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

**Gambar 3.2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor
Perkebunan Tahun 2013-2023**



- b. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 176,19% yakni sebanyak 111 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan luas 641.405,36 Ha atau 27,25% dari total IUP tahun 2023 seluas 2.353.931 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Sasaran kedua ini merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya:

1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Pasal 27 "Pada saat peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan sertifikasi ISPO bagi:
 - a. Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a berlaku sejak peraturan Presiden ini diundangkan;
 - b. Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan."
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*); serta



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO".

Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri. Perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO tersebut antara lain:

Tabel 3.5. Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
KABUPATEN BERAU				
1	PT. NATURA PASIFIC NUSANTARA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Tepian Buah, Long ayan, Punan Malinau, Kecamatan Segah	MISB-ISPO/041
2	PT. DWIWIRA LESTARI JAYA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Biatan Hulu, Desa Biatan Ilir, Desa Karangan, Kecamatan Biatan Desa Biatan Ilir Kecamatan Biatan, Desa Talisayan Kecamatan Talisayan	MISB-ISPO/032
3	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Cepuak, Biatan Lempake dan Tembudan, Kecamatan Talisayan dan Biatan	824 501 17030
4	PT Inti Energi Kaltim	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Ampen Medang dan Desa Tanjung Perepat, Kecamatan Batu Putih dan Biduk-biduk	824 501 22086
5	PT. Yudha Wahana Abadi	PT. Sucofindo	Kebun dan Pabrik di Desa Merapun, Kecamatan Kelay	ISPO 00023
6	PT. Anugerah Agung Prima Abadi	PT. Sucofindo	Kebun di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay	ISPO 00045
7	PT Hutan Hijau Mas	PT. Mutuagung Lestari	Desa Gunung Sari, Kecamatan Segah	MUTU-ISPO/031
8	PT Gunta Samba Jaya	PT. Mutuagung Lestari	Kampung Merapun, Kecamatan Kelay	MUTU-ISPO/062
9	PT Satu Sembilan Delapan	PT. Mutuagung Lestari	Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur	MUTU-ISPO/077
10	PT Malindomas Perkebunan	PT. Mutuagung Lestari	Desa Gunung Sari, Kecamatan Segah	MUTU-ISPO/112
11	PT Jabontara Eka Karsa	PT. Mutuagung Lestari	Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih	MUTU-ISPO/113
12	PT Berau Sawit Sejahtera	PT. Mutuagung Lestari	Kampung Merapun, Kecamatan Kelay	MUTU-ISPO/278



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
13	PT Global Primatama Mandiri	PT. Mutuagung Lestari	Desa Merapun, Kecamatan Kelay	MUTU-ISPO/292
14	PT Sentosa Kalimantan Jaya	PT. BSI Group Indonesia	Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan	ISPO 714737
TOTAL 14 perusahaan				
KABUPATEN KUTAI BARAT				
15	PT. KEDAP SAYAAQ DUA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn	MISB-ISPO/126
16	PT Harapan Rimba Raya	PT. Bureau Veritas Indonesia	Besiq & Bermai, Damai	IDN23220033
17	PT Rimba Rayatama Jaya	PT. Bureau Veritas Indonesia	Besiq & Bermai, Damai	IDN23220034
18	PT Kruing Lestari Jaya	PT. Bureau Veritas Indonesia	Besiq & Bermai, Damai	IDN26200001
19	PT Farinda Bersaudara	PT. Mutuagung Lestari	Desa Jambuk, Kecamatan Bongan	MUTU-ISPO/275
20	PT Putra Bongan Jaya	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Gusik dan Desa Muara Kedang, Kecamatan Bongan	MUTU-ISPO/306
21	PT Citra Agro Kencana	PT. BSI Group Indonesia	Desa Mantar, Kecamatan Damai	ISPO 770777
22	PT Ketapang Agro Lestari	PT. BSI Group Indonesia	Kecamatan Siluq Ngurai	ISPO 757445
TOTAL 8 perusahaan				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
23	PT Sawit Kaltim Lestari	PT. Mutu Hijau Indonesia	Muara Kaman	0071/MHI-ISPO
24	PT. Sawit Prima Sakti	PT. Global Inspeksi Sertifikasi	Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	001/GIS-ISPO/Rev-00/VI/2022
25	PT REA Kaltim Plantation	PT. SGS Indonesia	Desa Perdana, Desa Pulau Pinang, Desa Bukit Layang, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Indonesia	SGS-ID-ISPO-0011
26	PT. Khaleda Agroprima Malindo	PT. SGS Indonesia	Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia	SGS-ID-ISPO-0016
27	PT. Sasana Yudha Bhakti	PT. SGS Indonesia	Jl. Hasan Basri No. 21A ,P.O. Box 1203 Samarinda, 75117, Kalimantan Timur, Indonesia	SGS-ID-ISPO-0027
28	PT. Maju Kalimantan Hadapan	PT. SGS Indonesia	Desa Puan Cepak dan Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	SGS-ID-ISPO-0044
29	PT. Enggang Alam Sawita	PT. Sucofindo	Desa Long Lalang Kecamatan	ISPO 00064



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
30	PT Niagamas Gemilang	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Kebun di Desa Sungai Payang dan Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Pabrik di Sungai Tantai RT. 005, Dusun 1 Sentuk, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu	SPO.22028. TSI
31	PT Tunas Prima Sejahtera	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kertanegara	SPO.23054. TSI
32	PT Jaya Mandiri Sukses	PT. Mutuagung Lestari	Desa Prian, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis	MUTU-ISPO/046
33	PT Prima Mitrajaya Mandiri	PT. Mutuagung Lestari	Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman	MUTU-ISPO/076
34	PT Tritunggal Sentra Buana	PT. Mutuagung Lestari	Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak	MUTU-ISPO/147
35	PT Suryabumi Tunggal Perkasa	PT. Mutuagung Lestari	Desa Prian, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis	MUTU-ISPO/149
36	PT Manunggal Adi Jaya	PT. Mutuagung Lestari	Desa Kahala dan Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan	MUTU-ISPO/160
37	PT Hamparan Sentosa	PT. Mutuagung Lestari	Desa Menamang Kiri dan Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman	MUTU-ISPO/253
38	PT. Sawit Kaltim Lestari	PT. SAI Global Indonesia	Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman	SPO20003
39	PT Kutai Agro jaya mandiri	PT. Sarbi International Certification	Desa Sukabumi, kecamatan Kota Bangun Darat	01-SIC-04.04
TOTAL 17 perusahaan				
KABUPATEN KUTAI TIMUR				
40	PT. SUBUR ABADI WANA AGUNG	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Long Lees, Kecamatan Busang	MISB-ISPO/034
41	PT. HANUSENTRA AGRO LESTARI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Pelawan, kecamatan Sangkulirang	MISB-ISPO/038
		PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur	MISB-ISPO/130
42	PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Long Pejeng, Kecamatan Busang	MISB-ISPO/065
43	PT. DHARMA SATYA NUSANTARA PKS-4	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau	MISB-ISPO/137
44	PT. KUTAI BALIAN NAULI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon	MISB-ISPO/048



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
45	PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk PKS 6	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	MUARA WAHAU	MISB-ISPP0/127
46	PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	DESA RANTAU SENTOSA & LONG PEJENG	MISB-ISPO/065
47	PT Sumber Kharisma Persada	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Peridan, Kecamatan Sangkulirang	824 501 15015
48	PT Telen Prima Sawit	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal	824 501 19041
49	PT Karyanusa Eka Daya	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen	824 501 16024
50	PT Gunta Samba (Elang Estate)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng	824 501 19068
51	PT Multi Pacific International - Peridan & Kerayaan	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Peridan Kecamatan Sangkulirang	824 501 19065
52	PT Wira Inova Nusantara- Susuk dan Sungai Petar Estate	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran dan Kecamatan Sangkulirang	824 501 17031
53	PT Gunta Samba Jaya (Miau Baru)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Miau Baru, Kecamatan KongBeng	824 501 18036
54	PT Swakarsa Sinarsentosa	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau	824 501 13005
55	PT Telen	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Pangadan, Kecamatan Karangan dan Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun	824 501 22088
56	PT Sawit Prima Nusantara	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Mata Air & Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun	824 501 22087
57	PT Gemilang Sejahtera Abadi	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan, Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat	824 501 22085
58	PT Cipta Narada Lestari	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang	824 501 22092
59	PT Dharma Agrotama Nusantara (PT DAN)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Benheas dan Muara Wahau/Kecamatan Muara Wahau	824 501 19058
60	PT Dharma Satya Nusantara- PKS 2	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Dabeq dan Muara Wahau/ Kecamatan Muara Wahau	824 501 13006
61	PT Dharma Satya Nusantara Tbk - PKS 3	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Muara Wahau/Kecamatan Muara Wahau	824 501 13012
62	PT Dharma Intisawit Nugraha (DSN PKS 3)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Muara Wahau, Benhes, Dabeq dan Diak Lay/Kecamatan Muara Wahau	824 501 19059



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
63	PT Dewata Sawit Nusantara (DSN PKS3)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Benheas dan Muara Wahau/Kecamatan Muara Wahau	824 501 19060
64	PT. Anugerah Energitama	PT. Agri Mandiri Lestari	Desa Tepian Langsat, Kec. Bengalon	AML-ISPO-004.1
65	PT. Nala Palma Cadudasa	PT. Sucofindo	a. Bendang Baru Estate di Desa Senambah b. Gemburi Estate di Desa Mulupan c. Bengkal Estate di Desa Ngayau PKS di Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal	ISPO 00048
66	PT Kalimantan Agro Nusantara	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Tepian Makmur, Kec. Rantau Pulung	SPO.21021. TSI
67	PT Nusa Indah Kalimantan Plantation	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Mukti Jaya, Manunggal Jaya, Rantau Makmur, Kec. Rantau Pulung, Sangatta Kutai Timur	SPO.23048. TSI
68	PT Kemilau Indah Nusantara	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Muara Bengalon, Sekerat dan Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur	SPO.23060. TSI
69	PT GUNTA SAMBA	PT. Mutuagung Lestari	Desa Pengadan Baru, Kecamatan Karang	MUTU-ISPO/050
70	PT Kresna Duta Agroindo - PKS Muara Wahau & Gunung Kombeng	PT. Mutuagung Lestari	Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng	MUTU-ISPO/058
71	PT Sinergi Agro Industri	PT. Mutuagung Lestari	Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran	MUTU-ISPO/082
72	PT Bumi Mas Agro	PT. Mutuagung Lestari	Desa Manubar Kecamatan Sandaran	MUTU-ISPO/166
73	PT Tapian Nadenggan Jakluay Mill	PT. Mutuagung Lestari	Desa Jak Luay dan Desa Sidomulyo; Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/244
74	PT Etam Bersama Lestari	PT. Mutuagung Lestari	Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/254
75	PT Indonesia Plantation Synergy	PT. Mutuagung Lestari	Desa Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/274
76	PT Karya Bakti Sejahtera Agrotama	PT. Mutuagung Lestari	Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/291
77	PT Sumber Bumi Serasi	PT. Mutuagung Lestari	Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/297
78	PT Dharma Intisawit Nugraha PKS 11	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/305
79	Kemitraan PT Dharma Agrotama Nusantara	PT. Mutuagung Lestari	Desa Nehas Liah Bing dan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/319



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
80	Kemitraan PT Karya Prima Agro Sejahtera	PT. Mutuagung Lestari	Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng	MUTU-ISPO/320
81	Kemitraan PT Dewata Sawit Nusantara	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng	MUTU-ISPO/321
82	Kemitraan PT Dharma Intisawit Nugraha	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Wahau dan Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/322
83	PT Kresna Duta Agroindo PKS Rantau Panjang	PT. Mutuagung Lestari	Desa Jak Luay, Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/327
84	Koperasi Jasa Mutiara Kombeng	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Danau Kerinci, Desa Makmur Jaya, Kec. Kombeng	ISPO 763267
85	Koperasi Serba Usaha Makarti	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Sungai Bening, Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng	ISPO 763269
86	Koperasi Perkebunan Sawit Marga Indah	PT. BSI Group Indonesia	Jalan Widjaya Kusuma, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng	ISPO 763270
87	Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera	PT. BSI Group Indonesia	Jalan Putih, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kombeng	ISPO 763134
88	Koperasi Pertanian Sumber Rejeki	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Nusantara, Desa karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777884
89	Koperasi Sawit Usaha Tani Sejahtera	PT. BSI Group Indonesia	Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777911
90	Koperasi Jasa Usaha Tani Sejahtera	PT. BSI Group Indonesia	Jalan Tongkol RT. 012, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777890
91	Koperasi Kelean Blom Kejah	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Bah Lang No. 27 RT. V, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777913
92	Koperasi Serba Usaha karya Indah	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Gagak RT.003 Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777888
93	PT. Bima Agri Sawit	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Baay, Kecamatan Karangan Sebrang	IN.9/AJA-ISPO
94	PT Bima Palma Nugraha	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon	AJAINDO/IS PO-IN/042/II/2021
95	PT Dharma Satya Nusantara	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng	AJAINDO/IS PO-PB/056/VII/2023
96	PT Fairco Agro Mandiri	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Kaliorang	AJAINDO/IS PO-IN/006/VIII/2017



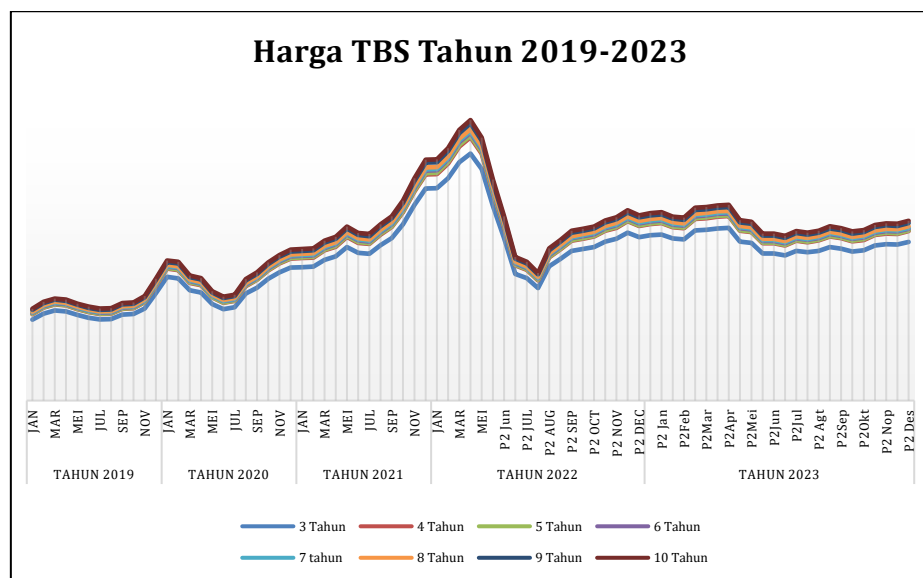
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
97	PT Karya Prima Agro Sejahtera	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng	AJAINDO/IS PO-KN/055/VI/2 023
TOTAL 58 perusahaan				
KABUPATEN PASER				
98	PT. PUCUK JAYA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau	MISB-ISPO/047
99	PT Multi Jayantara Abadi	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan	824 501 21079
100	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	PT. Mutu Hijau Indonesia	Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Pasir Belengkong	0047/MHI-ISPO
101	PT Borneo Indah Marjaya	PT. Mutu Hijau Indonesia	Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong	0024/MHI-ISPO
102	PT Pradiksi Gunatama	PT. Bureau Veritas Indonesia	Bayu Engau	IDN2322002 4
103	PT Cahaya Bintang Sawit Sejati	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro	SPO.22030. TSI
104	PT Palma Plantasindo	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Sunge Batu, Kecamatan pasir Belengkong, Kabupaten Paser	SPO.23064. TSI
105	PT. Agro Inti Kencanamas	PT. SAI Global Indonesia	Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau	SPO20004
106	PT. Muaratoyu Subur Lestari	PT. Intertek Utama Services	Desa Muara Toyu, Desa Bente Tualan, Desa Munggu, Kecamatan Longkali	IUS-ISPO-20210001
TOTAL 9 perusahaan				
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA				
107	PT. WARU KALTIM PLANTATION	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru	MISB-ISPO/136
108	PT Gawi Makmur Kalimantan - PKS Paser	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Bente Tualan & Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dan Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu	824 501 21080
109	PT Sukses Tani Nusasubur	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Labangka, Kecamatan Babulu	824 501 22098
110	PT Sumber Bunga Sawit Lestari	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu	SPO.22031. TSI
111	PT Kebun Mandiri Sejahtera	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara	SPO.23067. TSI
TOTAL 5 perusahaan				
TOTAL KALTIM = 111 Pelaku Usaha				

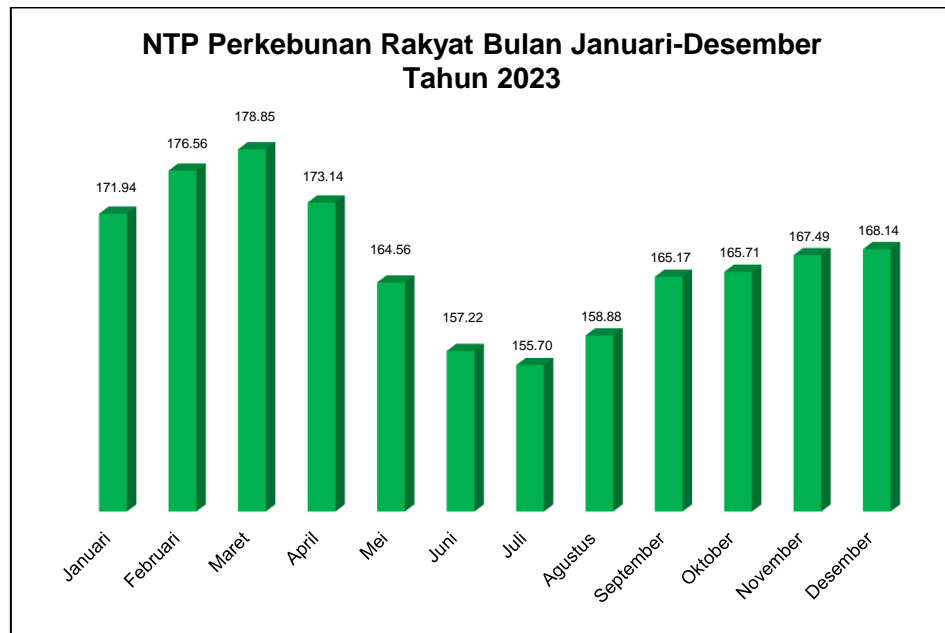


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

- c. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 166,92 atau mencapai 149,04%. Sasaran ketiga merupakan sasaran kedua dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian ini didorong oleh relatif stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) dari tahun 2022 hingga 2023. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2023 dan nilai NTP perkebunan rakyat Januari-Desember Tahun 2023:



Gambar 3.3. Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2023

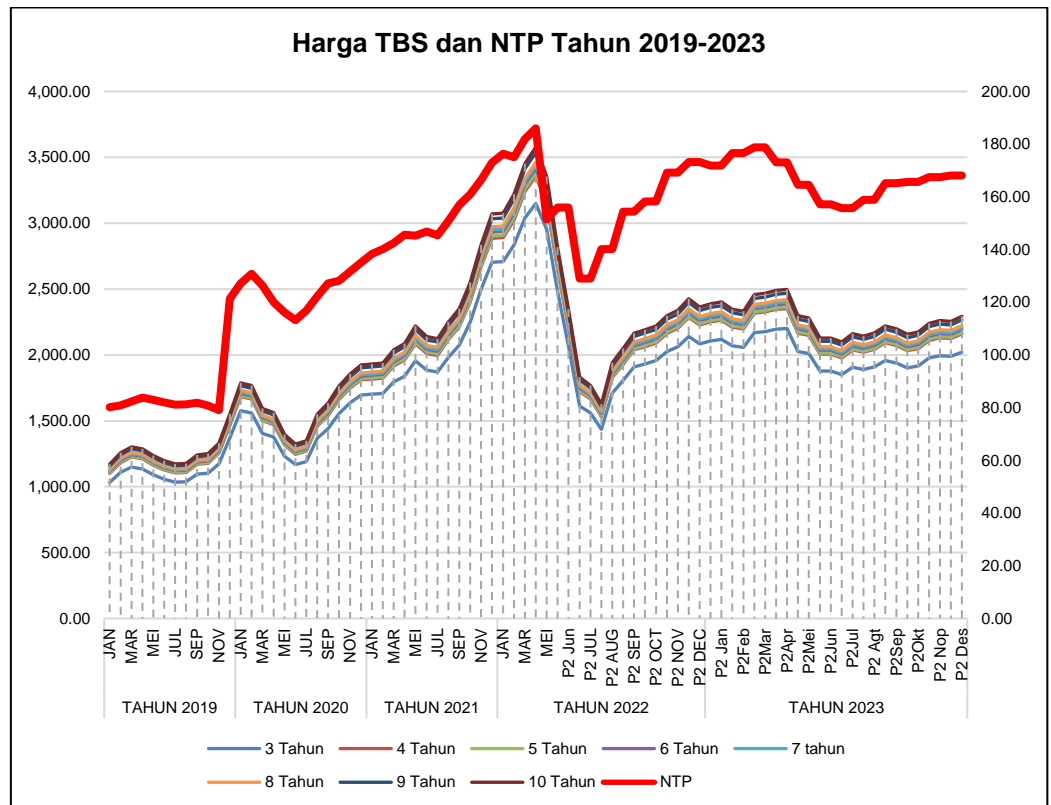


Gambar 3.4. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2023

Berdasarkan 2 (Dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit mulai membaik dari tahun 2021 dan sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 kemudian stabil hingga tahun 2023. Dimana rata-rata harga TBS selama tahun 2023 mencapai Rp. 2.274,91,-. NTP terendah terjadi pada bulan Juli mencapai 155,70 dan harga TBS terendah juga terjadi pada bulan Juli Periode I yaitu mencapai Rp. 2.099,15,-. Dan NTP tertinggi terjadi pada bulan Maret mencapai 178,85 dan harga TBS tertinggi terjadi pada bulan Maret Periode II yaitu mencapai Rp. 11.901,90,-. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan harga TBS berbanding lurus dengan pergerakan NTP perkebunan rakyat. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2023 terlihat pada grafik berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Gambar 3.5. Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2023

Selain itu faktor pendorong dalam capaian nilai NTP Perkebunan rakyat antara lain: diupayakannya kemitraan antara petani swadaya dengan industri kelapa sawit serta adanya peningkatan nilai tambah produk olahan komoditi perkebunan oleh UMKM sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini, n-1, dan n-2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	16.979	17.487,17	17.890,80*	2,63
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	62	80	111	33,89
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	151,04	162,54	166,92	5,15

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan n-1 dan n-2, perbandingan realisasi sasaran indikator nilai PDRB sub sektor perkebunan tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,63%. Faktor pendorong kenaikan nilai PDRB sub sektor perkebunan antara lain:

1. Peningkatan nilai produksi Tandan Buah Segar (TBS) tahun 2022 dari 19.118.776 Ton meningkat menjadi 20.710.888 Ton pada tahun 2023 atau naik 8,33% dengan produksi CPO naik dari 4.270.676 Ton menjadi 4.567.663 Ton atau naik 6,95%, diiringi dengan meningkatnya harga TBS pekebun;
2. Penggunaan benih bersertifikat dan berlabel sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi karena adanya jaminan mutu benih;
3. Peningkatan permintaan rekomendasi ijin usaha produksi benih tanaman perkebunan sehingga ketersediaan benih unggul bermutu lebih terjamin; dan
4. Sampai dengan tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melaksanakan kegiatan peningkatan produksi komoditi perkebunan, peningkatan nilai tambah komoditi dan



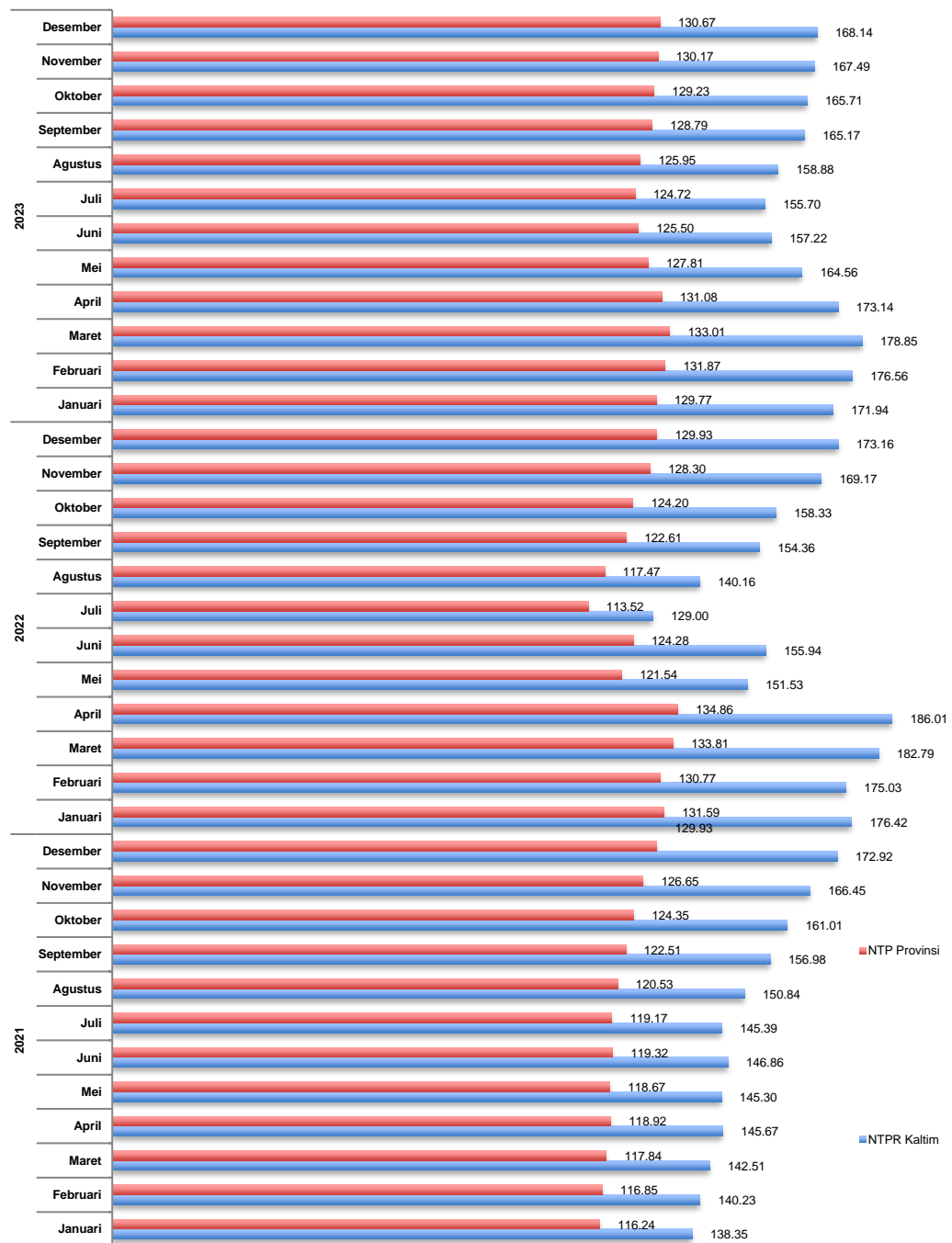
peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Sedangkan perbandingan realisasi jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dari tahun 2021 sampai 2023 juga mengalami peningkatan yaitu dari 62 perusahaan menjadi 111 perusahaan atau mengalami peningkatan sebesar 33,89%. Dimana terdiri dari 102 Perusahaan dan 9 Koperasi. Artinya sampai tahun 2023 sebanyak 33,55% perusahaan di Kalimantan Timur telah mendapatkan sertifikat ISPO dari total 304 perusahaan. Capaian tersebut didukung oleh perusahaan dan pekebun yang telah mengusahakan untuk mendapatkan sertifikat ISPO dan perusahaan yang mengusahakan perpanjangan sertifikat ISPOnya. Ini merupakan upaya untuk menjadikan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit industri untuk pasar internasional.

Dan perbandingan realisasi indikator NTP perkebunan rakyat tahun 2021 sampai 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 5,15%. Rata-rata NTP perkebunan rakyat 3 tahun terakhir mencapai 160,22. Rata-rata NTP perkebunan rakyat ini bahkan melebihi rata-rata capaian NTP Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 125,35 atau 27,82% lebih tinggi. Perbandingan nilai NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP perkebunan rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021-2023 terlihat pada grafik berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Gambar 3.6. Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.7. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Traget Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	21.997	17.890,80 ^{*)}	81,33
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	111	176,19
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	112	166,92	149,04

^{*)} Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, rata-rata capaian sasaran strategis sudah mencapai 135,52%. Berikut perbandingan realisasi kinerja Dinas dengan realisasi Provinsi dan nasional tahun 2023:

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Provinsi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	17.890,80 ^{*)}	537.630,01 ^{*)}	3,33



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	111	111	100
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	166,92	129,04	129,36

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

Dari tabel 3.8, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap capaian Provinsi. Pada sasaran meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan sesuai angka sementara tahun 2023 telah memberikan kontribusi sebesar 3,33% pada Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada sektor pertanian. Sedangkan pada sasaran terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO sejumlah 111 atau 100% dari 111 perusahaan kelapa sawit se Kalimantan Timur yang sudah didapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk sasaran meningkatnya kesejahteraan pekebun rata-rata NTP perkebunan rakyat dari bulan Januari sampai dengan Desember tercapai 166,92% atau sebesar 129,36% jika dibandingkan dengan capaian rata-rata NTP Provinsi yaitu 128,04%.

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas	Miliar Rupiah	17.890,80 *)	439.499 *)	4,07



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

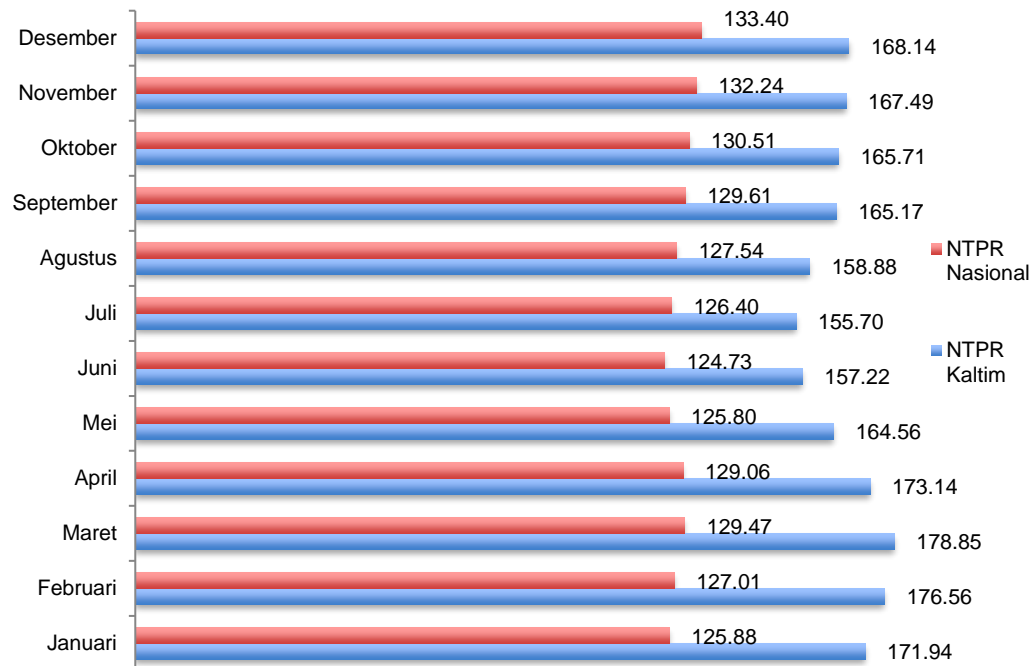
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
	dasar angka konstan)				
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	111	823	13,49
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	166,92	128,49	129,91

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

Dari tabel 3.9, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap capaian nasional. Pada sasaran meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan sesuai angka sementara tahun 2023 telah memberikan kontribusi sebesar 4,07% pada Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada sektor pertanian. Sedangkan pada sasaran terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO sejumlah 111 atau 13,49% dari 823 perusahaan kelapa sawit se Indonesia yang sudah didapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk sasaran meningkatnya kesejahteraan pekebun rata-rata NTP perkebunan rakyat dari bulan Januari sampai dengan Desember tercapai 166,92% atau sebesar 129,91% jika dibandingkan dengan capaian rata-rata NTP perkebunan rakyat nasional yaitu 128,49%, seperti terlihat pada gambar berikut:



NTP Perkebunan Rakyat Tahun 2023



Gambar 3.7. Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisis berdasarkan tabel-tabel di atas, capaian rata-rata sasaran strategis melebihi target. Faktor-faktor penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan sebagaimana penjabaran berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:



- Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian.
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terlambatnya proses penetapan petani calon penerima bantuan oleh Dinas di Kabupaten/Kota sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program, yang menyebabkan tertundanya proses pengadaan dan pelaksanaan program, sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman, kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas kebun yang menerima bantuan;
2. Perubahan bahan baku untuk pupuk dan pestisida sangat mempengaruhi harga pasar yang ada, kenaikan harga pasar menyebabkan calon penyedia berfikir keras untuk mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya juga ikut berperan menunda proses pengadaan yang sudah terjadwal. Sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman. Kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas kebun yang menerima bantuan;
3. Adanya laporan dari masyarakat terkait benih ilegal serta tertibnya Pengawas Benih Tanaman dan POLDA Kalimantan Timur untuk melaksanakan pengawasan peredaran benih ke lapangan serta dengan cara melakukan pendekatan secara langsung pada kelompok tani/masyarakat pekebun; serta
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih bersertifikat dan berlabel.



Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Untuk mengurangi permasalahan yang ada diupayakan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota secara persuasif; serta
 2. Meningkatkan sosialisasi kepada petani/ pekebun tentang peraturan perbenihan secara langsung ke lapangan.
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:
- Penataan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih terdapat bantuan benih tanaman perkebunan yang belum di tanam dilahan pekebun/petani hal ini dikarenakan faktor iklim (kemarau) yang panjang adanya benih yang setelah berada dikelompok harus dilakukan pemeliharaan untuk mencegah benih mati sebelum melakukan penanaman;
2. Adanya budaya atau kebiasaan pekebun di beberapa daerah setelah melakukan pembukaan lahan melakukan penanaman padi dan tanaman pangan lainnya sehingga benih yang sudah dibagikan masih di simpan di masing-masing tempat pekebun; serta
3. Pembukaan lahan kebun yang relatif lambat sehingga realisasi penanaman belum sepenuhnya selesai, hal ini disebabkan sebagian besar kelompok tani melakukan secara bergotong royong sehingga harus menunggu giliran dalam pembukaan lahan.



Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah pelaksana kegiatan secara intensif terus melakukan monitoring dan evaluasi ditahun berjalan dan tahun berikutnya, serta memberikan informasi melalui sosialisasi terkait teknis budidaya komoditas yang diberikan.

- c) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
- Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN.
 - Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani.
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani; dan
 - Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini secara umum tidak ada karena BUMP dibentuk berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada pasal 69 ayat (1), dimana BUMP dibentuk dengan luas lahan minimal mengusahakan lahan seluas (200 – 3.200) ha, mengacu skala ekonomi berbasis kawasan per komoditas, minimal dibentuk dari 2 – 3 poktan/ gapoktan, basis usaha kegiatan dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir, sehingga diperlukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta penguatan kelompok tani.

- d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, meliputi kegiatan:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Kurang sosialisasi terhadap produk layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
2. Adanya perubahan sistem dari SP2BKS online menjadi OSS (*online single submission*) oleh Kementerian Investasi/BKPM sehingga berdampak pada layanan pengawasan peredaran benih.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi produk layanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat; dan



3. Meningkatkan profesionalisme SDM internal.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 58.303.482.928,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.004.889.536,- atau 94,24%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif terutama SILPA dari pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan). Sasaran ini terealisasi mencapai 17.890,80 Miliar Rupiah dari target 21.997 Miliar Rupiah (81,33%) (Berdasarkan angka sangat sementara tahun 2023). Capaian ini meningkat sebesar 404 miliar rupiah atau 2,31% dari tahun 2022.

Faktor pendorong meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan tersebut antara lain:

1. Peningkatan nilai produksi Tandan Buah Segar (TBS) tahun 2022 dari 19.118.776 Ton meningkat menjadi 20.710.888 Ton di tahun 2023 atau naik 8,33% dengan produksi CPO naik dari 4.270.676 Ton menjadi 4.567.663 Ton atau naik 6,95%, diiringi dengan meningkatnya harga TBS pekebun;
2. Penggunaan benih bersertifikat dan berlabel sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi karena adanya jaminan mutu benih;
3. Peningkatan permintaan rekomendasi ijin usaha produksi benih tanaman perkebunan sehingga ketersediaan benih unggul bermutu lebih terjamin;
4. Terus berupaya melaksanakan kegiatan peningkatan produksi komoditi perkebunan, peningkatan nilai tambah komoditi dan



peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Sedangkan faktor penghambat belum tercapainya nilai PDRB sesuai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Masih adanya tanaman yang belum menghasilkan ataupun tua/rusak;
2. Intensifikasi pada tahun 2023 akan dirasakan hasilnya pada tahun selanjutnya;
3. Kelangkaan pupuk di lapangan;
4. Adanya kebijakan penghapusan pupuk bersubsidi pada beberapa komoditas perkebunan menyebabkan penurunan produktivitas hasil perkebunan (Permentan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian)
5. Kenaikan harga pupuk; dan
6. Alih fungsi lahan beberapa komoditi menyebabkan rendahnya produksi non kelapa sawit.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan;



- Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Belum semua penerapan praktek pengelolaan lingkungan dengan prinsip perkebunan yang berkelanjutan;
2. Masih terbatasnya kapasitas aparatur, pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan dengan penerapan praktek perkebunan yang berkelanjutan;
3. Masih terbatasnya sinergitas antar stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan dengan penerapan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan; dan
4. Masih tingginya tingkat serangan OPT Komoditi perkebunan sehingga taksasi kerugian hasil akibat serangan OPT masih tinggi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan pendampingan, sosialisasi, pembinaan/ pengawasan;
2. Melakukan secara terus menerus bimtek, pendampingan, sosialisasi, pembinaan/ pengawasan;
3. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian penerapan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan; dan
4. Penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Minimum Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan.

b) Program perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:



- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Kurangnya tenaga PUP yang bersertifikat di Kabupaten;
2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan PUP di Kabupaten; dan
3. Tidak siapnya perusahaan perkebunan untuk dilakukan PUP.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan; dan
2. Melaksanakan pelatihan PUP bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi sebesar Rp. 7.834.207.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.707.150.018,- atau 98,38%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan target 63 perusahaan. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 111 perusahaan atau senilai 176,19% dari target dan meningkat sebesar 38,75% dari capaian tahun 2022.



Faktor pendorong peningkatan capaian jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tersebut antara lain:

1. Adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi ISPO;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024;
6. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Program Rintisan Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi kebun sawit rakyat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;



8. Pendanaan dari Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) mulai tahun 2023;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 62/Kpts/KB.410/06/2023 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 10. Program dan pendanaan dari mitra kerja pembangunan.
Sedangkan faktor penghambat pencapaian target di atas yakni pemberi ijin yang bisa melakukan teguran terkait pelaksanaan ISPO.
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/ kegiatan/ sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian.
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pendampingan manajemen korporasi petani; dan
 - Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman petani akan konsep *corporate farming*;
2. Masih rendahnya penerapan praktik pasca panen yang baik dan pengolahan produk turunan;



3. Masih kurangnya pengetahuan petani terkait teknik pemasaran dan perluasan jaringan pemasaran produk dalam mendukung perwujudan korporasi petani; dan
4. Masih kurangnya sinergi antar stakeholder terkait dalam perwujudan korporasi petani berbadan hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan diseminasi informasi akan konsep *corporate farming* kepada petani/ poktan/ gapoktan;
2. Melakukan bimtek/ pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait pasca panen yang baik dan diversifikasi produk turunan perkebunan;
3. Melakukan bimtek/pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait teknik pemasaran dan perluasan jaringan pemasaran produk; dan
4. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian korporasi petani.

b) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Perbenihan dalam pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun.
2. Terbatasnya SDM dimana tuntutan pemenuhan benih unggul dan bermutu juga masih terkendala pada terbatasnya



SDM yang dimiliki dalam upaya pemenuhan benih, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seringkali terjadi kelebihan beban pekerjaan yang menyebabkan kurang fokusnya dalam penyelesaian pekerjaan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan upaya peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dll melalui penganggaran APBD; dan
2. Melakukan Peningkatan Kualitas SDM.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.194.101.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.151.727.198,- atau 99,18%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu NTP perkebunan rakyat dengan target 112%. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 166,92% atau 149,04% dan meningkat 4,38% dari capaian tahun 2022. Capaian sasaran ini diukur dari rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Gambar 3.4).

Faktor pendorong peningkatan capaian NTP antara lain:

1. Mulai stabilnya harga TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur;
2. Anemo masyarakat terhadap produk olahan perkebunan semakin tinggi;
3. Jaringan pemasaran sudah semakin berkembang dan semakin dikenal;



4. Meningkatnya kesadaran petani untuk menjual produksinya dalam bentuk produk olahan daripada bahan mentah;
5. Peningkatan produk olahan komoditi perkebunan oleh UMKM sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun;
6. Ketersediaan benih unggul dan bermutu; dan
7. Melaksanakan kegiatan intensifikasi perkebunan rakyat.

Sedangkan faktor penghambat fluktuasi capaian NTP antara lain:

1. Alih fungsi lahan;
2. Persaingan dengan produk diluar Kalimantan Timur;
3. Harga komoditas perkebunan tergantung dengan mekanisme pasar; dan
4. Tingginya biaya produksi.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target atas Indikator Kinerja Utama diperlukan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan. Tabel berikut memberikan gambaran perbandingan antara rata-rata persentase capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran program prioritas.

Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	81,33	94,34	-13,01
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	176,19	98,38	77,81
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat	149,04	98,18	50,86



berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran untuk sasaran 2 (Dua) dan sasaran 3 (Tiga) sehingga tingkat efisiensi plus. Sedangkan sasaran 1 (Satu) persentase capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran. Hal ini karena capaian 2023 merupakan masih angka sangat sementara yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian Dinas Perkebunan terus berupaya untuk meningkatkan PDRB sub sektor Perkebunan dengan melaksanakan program-program yang dapat mendukung capaian sasaran ini.

Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Pada Tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 64.264.860.330,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 32.218.346.030,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 19 oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,



menjadi Rp. 71.331.792.328,- (bertambah Rp. 7.066.931.998,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 39.285.278.028,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 67.863.776.752,- (95,14%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 37.066.824.492,- (94,35%) belanja pembangunan sebesar Rp. 30.796.942.260,- (96,10%), dengan program sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi;
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat;
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan;
4. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan; dan
6. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Selain program dan kegiatan yang bersifat pembangunan, program dan kegiatan yang bersifat rutin indikatornya juga telah mendukung di dalam pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana penjabaran berikut:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 37.066.824.492,- dari pagu 39.285.278.028,- dengan capaian keuangan 94,35%. Program ini memiliki output skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan capaian sebagai berikut:

a) Dinas Perkebunan

Dari target 92% terealisasi 90,03% atau 97,86%.

b) UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 92% terealisasi 89,13% atau 96,88%.

c) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 92% terealisasi 87,92% atau 95,57%.

d) UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 92% terealisasi 89,88% atau 97,70%.

Faktor pendorong pencapaian target program ini antara lain sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan semua unit kerja Dinas Perkebunan dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Target kinerja yang jelas; dan
3. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan inspektorat.

Faktor penghambat pencapaian target program

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Kurang sosialisasi terhadap produk layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
2. Adanya perubahan sistem dari SP2BKS online menjadi OSS (*online single submission*) oleh Kementerian Investasi/BKPM sehingga berdampak pada layanan pengawasan peredaran benih.



Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi produk layanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat; dan
3. Meningkatkan profesionalisme SDM internal.

Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator nilai akuntabilitas kinerja PD dengan capaian 73,40% atau 99,19% dari target 74%. Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian 10 Dokumen atau 100% dari target 10 Dokumen. Dokumen tersebut antara lain:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Pedum Tahun 2023;
4. Standar Harga Intern Tahun 2023;
5. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
6. Rencanan Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026;
7. Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2023;
8. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023;
9. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2023
10. Lapora Evaluasi Renja Tahun 2023

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian 4 Laporan atau 100% dari target 4 Laporan. Laporan tersebut antara lain:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022;
2. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022;
3. Laporan Tahunan 2022; dan
4. Laporan Statistik Tahun 2022.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian sebagai berikut:

a. Dinas Perkebunan

Dari target 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

b. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

c. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

d. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan capaian 81 Orang/Bulan atau 102,53% dari target 79 Orang/Bulan.

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian sebagai berikut:



1. Dinas Perkebunan

Dari target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator presentase ASN yang memiliki standar kompetensi dengan capaian sebagai berikut:

a. Dinas Perkebunan

Dari target 20% terealisasi 188,61% atau 943,04%.

b. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 20% terealisasi 76,5% atau 382,35%.

c. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 20% terealisasi 53,33% atau 266,67%.

d. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 20% terealisasi 46,66 atau 233,30%.

Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan realisasi 1 Paket atau 100% dari target 1 Paket.

b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian sebagai berikut:



1. Dinas Perkebunan

Dari target 107 Orang terealisasi 149 Orang atau 139,25%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 13 Orang terealisasi 13 Orang atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 6 Orang terealisasi 8 Orang atau 133,33%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 6 Orang terealisasi 7 Orang atau 116,67%.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 5 unit atau 100% dari target 5 unit;
- b. Pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
- c. Pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit; dan
- d. Pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit.

Kegiatan ini terdapat 6 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.



3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 2 Paket terealisasi 2 Paket atau 100%.

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 4 Paket terealisasi 4 Paket atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 2 Paket terealisasi 2 Paket atau 100%.

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 12 Dokumen terealisasi 12 Dokumen atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 12 Dokumen terealisasi 12 Dokumen atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 12 Dokumen terealisasi 12 Dokumen atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 12 Dokumen terealisasi 12 Dokumen atau 100%.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan perangkat daerah dengan capaian sebagai berikut:

1. Pada Dinas tercapai 13 jenis atau 100% dari target 13 jenis;
2. Pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan tercapai 6 jenis atau 100% dari target 6 jenis;
3. Pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan tercapai 5 jenis atau 100% dari target 5 jenis; dan
4. Pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan tercapai 2 jenis atau 100% dari target 2 jenis.

Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan capaian 10 Unit atau 100% dari target 10 Unit.



b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 58 Unit terealisasi 58 Unit atau 100%. Yang terdiri dari:

▪ Mesin ketik	1 unit
▪ Lemari arsip	1 unit
▪ Penghancur + kertas/tile	2 unit
▪ Sofa	1 set
▪ Meja kerja	1 unit
▪ Tandon	1 unit
▪ Karpet	1 Set
▪ Meja kerja pegawai	9 unit
▪ Smart TV	3 unit
▪ Sound sistem	1 unit
▪ Kursi Kepala Dinas	1 unit
▪ Mikropon	2 unit
▪ Audio amplipayer	1 unit
▪ Spaker wireless	1 unit
▪ Kamera	1 unit
▪ Tripod kamera	1 unit
▪ Tablet	1 unit
▪ Dekstop	8 unit
▪ Laptop	4 unit
▪ Tablet	3 unit
▪ Printer	7 unit
▪ SSD	5 unit
▪ Webcam	1 unit



2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 25 Unit terealisasi 25 Unit atau 100% yang terdiri dari:

- Gorden (55 M2) 1 unit
- Infocus 1 unit
- CCTV 2 set
- Filling cabinet 3 unit
- Sofa 1 set
- Microphone wireless 1 set
- UPS 5 unit
- PC Desktop 3 unit
- Tablet 3 unit
- Printer 5 unit

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 13 Unit terealisasi 13 Unit atau 100% yang terdiri dari:

- CCTV 8 titik
- Sofa 1 unit
- Alat pendingin (AC) 1 pk 2 unit
- Laptop 1 Unit
- Desktop 1 Unit

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 4 Unit terealisasi 4 Unit atau 100%, yang terdiri dari:

- Desktop 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Mesin Penghancur Kertas 1 Unit
- Scanner 1 Unit

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Kegiatan ini memiliki indikator jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis;
- b. Pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis;
- c. Pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis; dan
- d. Pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.

Kegiatan ini terdapat 4 sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.



3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau 100%.



7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis;
- b. Pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis;
- c. Pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis; dan
- d. Pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.

Kegiatan ini terdapat 4 sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian sebagai berikut:
 1. Dinas Perkebunan
Dari target 36 Unit terealisasi 36 Unit atau 100%.
 2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
Dari target 2 Unit terealisasi 2 Unit atau 100%.
 3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dari target 1 Unit terealisasi 1 Unit atau 100%.
 4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
Dari target 2 Unit terealisasi 2 Unit atau 100%.
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 2 Unit terealisasi 2 Unit atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 5 Unit terealisasi 5 Unit atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Unit terealisasi 1 Unit atau 100%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 1 Unit terealisasi 1 Unit atau 100%.

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan

Dari target 21 Unit terealisasi 21 Unit atau 100%.

2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 59 Unit terealisasi 59 Unit atau 100%.

3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 10 Unit terealisasi 8 Unit atau 80%.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 13 Unit terealisasi 13 Unit atau 100%.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.871.179.510,- dari pagu Rp. 11.156.549.700,- dengan capaian kinerja keuangan 97,44%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 6.851.745.460,- dari pagu dana Rp. 7.122.478.500,- dengan capaian kinerja keuangan 96,20%. Indikator kinerja program ini adalah produksi komoditas Perkebunan dengan capaian sebesar 20.801.100 Ton atau 113,58% dari target 18.313.874,25 Ton.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan Output Kegiatan Produktivitas komoditas perkebunan strategis dengan target tahun 2023 20 Ton/Ha sedangkan realisasi berdasarkan angka sementara 2023 sebesar 17,05 Ton/Ha atau capaian kinerja 85,11%. Capaian produktivitas tersebut diperoleh dari produksi komoditas perkebunan dibagi dengan luas tanaman menghasilkan. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun sub kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	20.801.100	113,58	Angka sementara Tahun 2023 (Sumber:
	• Kelapa Sawit		20.710.888		
	• Karet		73.580		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
	• Kakao		2.543		Dinas Perkebunan)
	• Kelapa Dalam		7.843		
	• Lada		5.199		
	• Lain-lain		1.047		
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	20	17,05	85,11	
Sub Kegiatan Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	100	

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas komoditi unggulan di atas pada tahun 2023 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) *Intensifikasi Kakao 180 Ha*

Kegiatan intensifikasi kakao seluas 180 Ha dilaksanakan di Kabupaten Berau 111 Ha, Kabupaten Kutai Timur 25 Ha dan Kabupaten Kutai Barat 44 Ha. Bantuan yang diberikan berupa Pupuk NPK sebanyak 18.000 Kg dan Herbisida sebanyak 900 Liter. Dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel 3.12. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan
Intensifikasi Kakao 180 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
	Kab. Berau		80	111
1.	Mekar Jaya 2	Kamp. Suaran Kec. Sambaliung	17	17
2.	Maju Bersama I	Kamp. Suaran Kec. Sambaliung	25	50
3.	Tekad Maju	Kamp. Nyapa Indah Kamplong Lanuk Kec. Sambaliung	23	24



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
4.	Bukit Harapan	Kamp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung	15	20
	Kab. Kutai Barat		41	44
1.	Kakao Tala Lestari	Kamp. Linggang Muara Mujan Kec. Tering	25	34
2.	Urip Tani	Kamp. Linggang Jelemuq Kec. Tering	16	10
	Kab. Kutai Timur		24	25
1.	Sumber Rejeki	Desa Mata Air Kec. Kaubun	8	5
2.	Sumber Makmur	Desa Mata Air Kec. Kaubun	6	5
3.	Sejahtera	Desa Kadungan Jaya Kec. Kaubun	10	15

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/135/Kpts-Disbun/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kakao 180 Ha) di Kabupaten Berau 111 Ha, Kabupaten Kutai Timur 25 Ha dan Kabupaten Kutai Barat 44 Ha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan melalui metode *E-Purchasing* oleh Penyedia Jasa CV. Sanggam Perkasa dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja: 027/5102/KPA-BPK/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 05 Oktober 2023.

2) *Intensifikasi Kelapa 20 Ha*

Kegiatan Intensifikasi Kelapa seluas 20 Ha dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bantuan yang diberikan berupa



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

pupuk NPK sebanyak 2.000 Kg dan Herbisida sebanyak 100 Liter. Dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel 3.13. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan
Intensifikasi Kelapa 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
	Kab. Kutai Kartanegara		14	20
1.	Kelapa Remaja	Kelurahan Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa	14	20

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/134/Kpts-Disbun/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kelapa 20 Ha) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan melalui metode *E-Purchasing* oleh Penyedia Jasa CV. Sanggam Perkasa dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/5100/KPA-BPK/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dengan masa pelaksanaan Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 2023 | 22 selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 05 Oktober 2023.

3) *Intensifikasi Kelapa Sawit 200 Ha*

Kegiatan intensifikasi kelapa sawit seluas 200 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat 100 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 60 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 25 Ha, dan Kota Kota Samarinda 15 Ha. Bantuan yang diberikan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

berupa Pupuk NPK sebanyak 20.000 Kg dan Herbisida sebanyak 1.000 Liter. Dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel 3.14. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan
Intensifikasi Kelapa Sawit 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
	Kab. Kutai Barat		101	100
1.	Rukun Jaya	Kampung Tanjung Sari Kec. Bongan	33	25
2.	Harapan Jaya	Kampung Jambuk Makmur Kec. Bongan	24	25
3.	Suka Karya	Kampung Siram Makmur Kec. Bongan	26	25
4.	Bakti Membangun	Kampung Muara Siram Kec. Bongan	18	25
	Kab. Kutai Kartanegara		45	60
1.	Mekar Jaya	Ds. Giri Agung Kec. Sebulu	10	10
2.	Hambau Berseri	Ds. Hambau Kec. Kembang Janggut	10	10
3.	Tunas Baru	Ds. Handil Terusal Kec. Angana	10	10
4.	Damai Abadi	Ds. Suka Damai Kec. Muara Badak	15	30
	Kab. Penajam Paser Utara		25	25
1.	Ongko Makmur	Ds. Bangun Mulya Kec. Waru	25	25
	Kota Samarinda		9	15
1.	Tunas Baru	Kel.Sempaja Utara Kec. Smd Utara	9	15

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/130/Kpts-Disbun/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

(Intensifikasi Kelapa Sawit 200 Ha) di Kabupaten Kutai Barat 100 Ha, Kota Samarinda 15 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 60 Ha, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 25 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan melalui metode Tender oleh Penyedia Jasa CV. Sumber Lumintoe dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/5515/KPA-BPK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dengan masa pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 08 November 2023.

4) *Intensifikasi Lada 200 Ha*

Kegiatan intensifikasi lada seluas 200 Ha dilaksanakan di Kabupaten Berau 70 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 85 ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 35 ha dan Kota Samarinda 10 Ha. Bantuan yang diberikan berupa Pupuk NPK sebanyak 20.000 Kg dan Herbisida sebanyak 1.000 Liter. Dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel 3.15. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan
Intensifikasi Lada 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
	Kab. Berau		78	70
1.	Suka Maju	Kamp. Biatan Lempake Kec. Biatan	26	25
2.	Biatan Tiga	Kamp. Biatan Lempake Kec. Biatan	29	20
3.	Tani Makmur	Kamp. Bukit Makmur Jaya Kec. Biatan	23	25
	Kab. Kutai Kartanegara		75	85
1.	Jaya Raya	Ds. Batuah Kec. Loa Janan	10	10
2.	Lempake Hijau	Ds. Salo Palai Kec. Muara Badak	15	25
3.	Bosowa	Ds. Batuah Kec. Loa Janan	14	14
4.	Mega Buana	Ds. Batuah Kec. Loa Janan	16	16



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
5.	AL-Hidayah	Ds. Batuah Kec. Loa Janan	10	10
6.	Tani Baru	Ds. Batuah Kec. Loa Janan	10	10
	Kab. Penajam Paser Utara		62	35
1.	Sumber Mulyo	Ds. Suko Mulyo Kec. Sepaku	18	6
2.	Trubus	Ds. Semoi Dua Kec. Sepak	20	11
3.	Gunung Makmur Dua	Ds. Semoi Dua Kec. Sepaku	11	7
4.	Tunas	Ds. Suko Mulyo Kec. Sepaku	8	5
5.	Sido Makmur	Ds. Sukaraja Kec. Sepaku	5	6
	Kota Samarinda		13	10
1.	Karya Usaha	Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	4	3
2.	Tunas Baru	Bayur Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	6	5
3.	Karya Abadi	Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	3	2

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/131/Kpts-Disbun/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Lada 200 Ha) di Kabupaten Berau 70 Ha, Kota Samarinda 10 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 85 Ha, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 35 Ha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 202. Pelaksanaan melalui metode *E-Purchasing* oleh Penyedia Jasa CV. Sanggam Perkasa dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/4430/KPA-BPK/VII/2022 tanggal 24 Juli 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

dengan masa pelaksanaan selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 01 Agustus sampai dengan 14 September 2023.

5) Intensifikasi Karet 200 Ha

Kegiatan intensifikasi karet seluas 200 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat 80 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 50 Ha, Kabupaten Paser 50 Ha, dan Kota Samarinda 20 Ha. Bantuan yang diberikan berupa Pupuk NPK sebanyak 20.000 Kg dan Herbisida sebanyak 1.000 Liter. Dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel 3.16. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan
Intensifikasi Karet 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
	Kab. Kutai Barat		78	80
1.	Pelan Jaya Lestari	Kampung Melak Ulu Kec. Melak	25	25
2.	Melalint Indah	Kampung Keay Kec. Damai	13	15
3.	Sempekat Bersam	Kampung Mendika Kec. Damai	15	15
4.	Insan Mekar	Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat	25	25
	Kab. Kutai Kartanegara		50	50
1.	Ngudi Rahayu	Ds. Bunga Putih Kec. Marangkayu	10	10
2.	Mekar Baru	Ds. Sambera Baru Kec. Marangkayu	10	10
3.	Nilam Lestari	Ds. Handil Terusan Kec. Anggana	10	10
4.	Karya Bakti	Ds. Kota Bangun Kec. Kota Bangun	10	10
5.	Rejo Makmur	Ds. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	10	10
	Kab. Paser		34	50
1.	Harapan Jaya	Ds. Sekuan Kec. Muara Komam	21	30
2.	Rukun Makmur	Ds. Sekuan Kec. Muara Komam	13	20
	Kota Samarinda		15	20
1.	Pada Elo	Kel. Bantuas Kec. Palaran	15	20



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/132/Kpts-Disbun/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Karet 200 Ha) di Kabupaten Kutai Barat 80 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 50 Ha, Kabupaten Paser 50 Ha, Kota Samarinda 20 Ha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan melalui metode Tender oleh Penyedia Jasa CV. Sumber Lumintoe dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja: 027/5513/KPA-BPK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dengan masa pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 08 November 2023.

6) *Peremajaan Karet 136 Ha*

Kegiatan peremajaan kakao seluas 136 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat. Bantuan yang diberikan berupa Bibit karet sebanyak 68.000 Batang, Pupuk NPK sebanyak 13.600 Kg dan Herbisida sebanyak 680 Liter. Dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel 3.17. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan
Peremajaan Karet 136 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
	Kab. Kutai Barat		138	136
1.	Makmur	Kampung Asa Kec. Barong Tongkok	27	27
2.	Sempekat II	Kampung Asa Kec. Barong Tongkok	27	27
3.	Sempekat Samaan Taai	Kamp Linggang Bigung Baru Kec. Lingang Bigung	26	23



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah KK	Luas (Ha)
4.	Serba Mulia	Kampung Linggang Mencelew Kec. Linggang Bigung	19	17
5.	Tunas Harapan	Kampung Linggang Mencelew Kec. Linggang Bigung	20	17
6.	Jantur Mapan	Kampung Linggang MapanKec. Linggang Bigung	19	25

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/133/Kpts-Disbun/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Peremajaan Tanaman Karet 136 Ha) di Kabupaten Kutai Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan melalui metode *E-Purchasing* oleh Penyedia Jasa CV. Dwi Putera Mandiri dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/5708/KPA-BPK/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan masa pelaksanaan selama 102 (Seratus Dua) hari kalender untuk Pupuk dan Herbisida yang dihitung mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan 11 Desember 2023, dan 41 (Empat Puluh Satu) hari kalender untuk bibit dihitung mulai tanggal 01 November 2023 sampai dengan 11 Desember 2023.

7) *Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Aspirasi)*

Kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan dilaksanakan di Kabupaten Beraut. Bantuan yang diberikan berupa Pupuk Organik Padat sebanyak 1.610 Bungkus. Dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:



Tabel 3.18. Daftar Lokasi Penerima Bantuan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Aspirasi)

No.	Kelompok Tani	Alamat	Volume (Bungkus)	Luas (Ha)
	Kab. Berau		1.610	204
1.	Gapoktan Kahuripan Jaya	Kec. Talisayan	810	112
2.	Koperasi Biatan Bersama	Kec. Biatan	800	92

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/207/Kpts-Disbun/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Aspirasi)) di Kabupaten Berau, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan melalui metode *E-Purchasing* oleh Penyedia Jasa PT. Mandala Pratama Nusantara dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/4388/KPA-BPK/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan masa pelaksanaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di atas antara lain:

1. Terlambatnya proses penetapan petani penerima bantuan dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.

Terlambatnya proses penetapan petani calon penerima bantuan oleh Dinas di Kabupaten/Kota sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program, yang menyebabkan tertundanya proses pengadaan dan pelaksanaan program, sampai akhirnya



berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman, kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan.

2. Perubahan harga pasar pupuk NPK dan Herbisida yang fluktuatif.

Perubahan bahan baku untuk pupuk dan pestisida sangat mempengaruhi harga pasar yang ada, kenaikan harga pasar menyebabkan calon penyedia berfikir keras untuk mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya juga ikut berperan menunda proses pengadaan yang sudah terjadwal. Sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman. Kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan.

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap permasalahan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian antara lain:

1. Untuk meminimalisir permasalahan yang ada diupayakan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota secara persuasif; dan
2. Untuk kondisi harga bahan baku Pupuk NPK dan Pestisida yang fluktuatif, tidak ada upaya yang dapat dilakukan, karena hal ini menjadi hambatan secara nasional bahkan dunia.

Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian tahun anggaran 2023 secara keseluruhan terlaksana dengan baik, paket bantuan seluruhnya telah 100% dilaksanakan dan diterima oleh petani dan mendapat tanggapan yang positif oleh petani. Dampak positif bagi masyarakat tersebut antara lain:

1. Terbantunya masyarakat dalam hal meningkatkan produktivitas tanaman mereka, terutama dalam peremajaan tanaman



perkebunan;

2. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang secara otomatis terjadi dikarenakan masyarakat memiliki kemampuan dalam meningkatkan produktivitas kebun mereka;
 3. Pemberdayaan penangkar bibit tanaman perkebunan yang secara langsung maupun tidak, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani penangkar;
 4. Teroptimalisasinya lahan kebun masyarakat yang selama ini kurang optimal produktivitasnya;
 5. Terbantunya petani pekebun menekuni usaha taninya dengan pelatihan dan pendampingan teknis oleh petugas dan pembina secara intensif; dan
 6. Kembali menumbuhkan minat petani dalam memelihara dan meningkatkan produktivitas kebun mereka agar dapat meningkat dari segi ekonomi.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) terealisasi sebesar Rp. 3.229.836.266,- dari pagu sebesar Rp. 3.243.202.200,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,45%. Indikator kinerja program ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat dengan realisasi 88,30% atau 103,88% dari target 85%. Capaian kinerja ini dihitung dari jumlah benih salur yang tersertifikasi dibagi dengan kebutuhan benih untuk pengembangan. Pada tahun 2023 jumlah benih yang tersertifikasi sebanyak 754.673 benih dengan kebutuhan benih untuk pengembangan sebanyak 854.700 benih. Pencapaian program ini didukung dengan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman. Dengan output kegiatan tersebut yakni jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan sebanyak



50.000 benih dengan realisasi 100% dari target 50.000 benih, yang terdiri dari:

- a. Jumlah benih tanaman semusim dan rempah yang diperbanyak dengan target 15.000 benih pala dan realisasi 15.000 benih pala. Dengan berlokasi pembibitan di UPTD PBTP Samarinda.
- b. Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar yang diperbanyak dengan target 35.000 benih dan realisasi 35.000 benih, terdiri dari aren 10.000 benih berlokasi di UPTD PBTP Kota Samarinda, kelapa sawit 20.000 benih berlokasi di Km. 38 Kecamatan Loa Janan dan Km 29 Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, serta kakao 5.000 benih berlokasi di UPTD PBTP Kota Samarinda.

Faktor pendorong capaian kinerja tersebut di atas antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kebutuhan benih unggul dan bermutu; dan
2. Kolaborasi dengan pihak terkait.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Perbenihan

Upaya pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun, masih belum dapat dipenuhi secara maksimal karena masih terbatasnya sarana prasarana perbenihan. Sehingga dalam efisiensi waktu dan biaya masih terkendala dengan fasilitas yang belum memadai.

2. Terbatasnya SDM

Tuntutan pemenuhan benih unggul dan bermutu juga masih terkendala pada terbatasnya SDM yang dimiliki dalam upaya pemenuhan benih, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seringkali terjadi kelebihan beban



pekerjaan yang menyebabkan kurang fokusnya dalam penyelesaian pekerjaan secara maksimal.

Tindak lanjut yang diupayakan dalam meminimalisir permasalahan antara lain:

1. Perbaikan Sarana Prasarana Perbenihan

Dalam upaya mengatasi masalah terbatasnya sarana prasarana perbenihan maka dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dll melalui penganggaran APBD.

2. Peningkatan Kualitas SDM

Menindaklanjuti kurangnya SDM dilakukan peningkatan kualitas SDM sebagai solusi cepat masalah tersebut, selain itu juga dilakukan perencanaan manajemen pegawai dan pembagian tupoksi agar dengan jumlah SDM yang ada seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 789.597.784,- atau 99,84% dari pagu Rp. 790.869.000,-. Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah benih yang beredar dengan capaian sebanyak 11.896.910 benih atau 198,28% dari target 6.000.000 benih. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja program ini antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih bersertifikat dan berlabel;
2. Adanya laporan dari masyarakat terkait benih ilegal; serta
3. Tertibnya Pengawas Benih Tanaman dan POLDA Kalimantan Timur untuk melaksanakan pengawasan peredaran benih di lapangan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Berikut rekapitulasi pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Kalimantan Timur tahun 2023:

Tabel 3.19. Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	BULAN	KELAPA SAWIT	LADA	KARET	AREN	KELAPA	KAKAO	CENGKEH	PALA	SERAI WANGI	KOPI	BENIH ILLEGAL	TOTAL
1.	JANUARI	1,618,382			10,000	10						20,000	1,648,392
2.	PEBRUARI	618,320	110,000			200	117,400						845,920
3.	MARET	610,037	38,000		50,000	17,309							715,346
4.	APRIL	372,572			9,291	300	52,000				10,000	35,000	479,163
5.	MEI	709,350				457	67,915				35,875		813,597
6.	JUNI	329,230	45,500		1,200		2,500						378,430
7.	JULI	767,745				374	5,000				10,500		783,619
8.	AGUSTUS	64,160	161,000	2,500	45,000	3,150	66,400					123,680	465,890
9.	SEPTEMBER	71,434					3,000		5,000			2,000	81,434
10.	OKTOBER	1,912,167				10	91,000				34,766		2,037,943
11.	NOVEMBER	2,419,916	115,000	23,000	7,000	1,063	28,300		2,000		18,850		2,615,129
12.	DESEMBER	937,144	70,000			24,903							1,032,047
JUMLAH		10,430,457	539,500	25,500	122,491	47,776	433,515	-	7,000	-	109,991	180,680	11,896,910

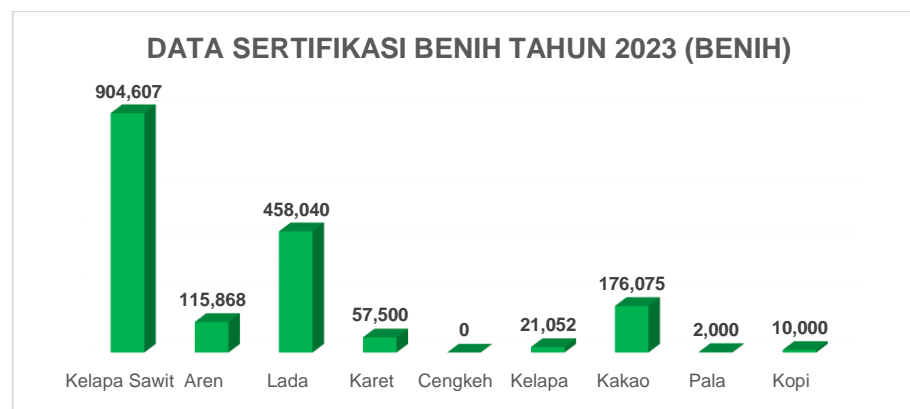


Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi dengan capaian 11.896.910 benih atau 198,28% dari target 6.000.000 benih, yang terdiri dari 11.896.910 benih yang diawasi dan 180.680 benih ilegal. Faktor pendorong capaian kegiatan ini adalah adanya laporan dari masyarakat terkait benih ilegal serta tertibnya Pengawas Benih Tanaman dan POLDA Kalimantan Timur untuk melaksanakan pengawasan peredaran benih di lapangan. Meskipun capaian kegiatan ini tinggi, namun ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Langkah yang dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut dengan terus bekerja sama dengan karantina wilayah kerja Balikpapan dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian untuk meningkatkan pengawasan peredaran benih pada tahun-tahun selanjutnya.

Pencapaian kegiatan ini didukung melalui pelaksanaan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

Output sub kegiatan ini adalah jumlah sertifikat benih dengan capaian 298 sertifikat atau 198,67% dari target 150 sertifikat. Capaian 298 sertifikat diperoleh melalui sertifikasi komoditi Perkebunan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.8. Data Sertifikasi Benih Tahun 2023



2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman

Output sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Perkebunan dengan capaian 1 Laporan atau 100% dari target 1 Laporan.

Faktor pendorong pada pencapaian kinerja sub kegiatan diatas antara lain dikarenakan tidak adanya lagi hambatan dari covid 19 seperti pada tahun anggaran 2022. Meskipun output sub kegiatan tersebut tercapai, dalam melaksanakan sub kegiatan tersebut ditemui beberapa permasalahan, yakni :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

- a. Dari hasil evaluasi dan monitoring Izin Usaha Produksi Benih terhadap produsen benih terdapat serangan penyakit terhadap kebun sumber benih yang mengakibatkan tidak dapatnya sumber benih/ produsen benih untuk memproduksi sehingga tidak ada permohonan sertifikasi benih;
- b. Berkurangnya dan atau tidak adanya kebun benih sumber akibat kebun telah tua dan mati sehingga tidak dapat menghasilkan benih dan akibatnya permohonan sertifikasi juga tidak ada;
- c. Terjadinya pemasukan benih dari luar akibat pengadaan barang (benih) yang bersifat terbuka untuk setiap wilayah dimana sertifikasi khususnya komoditi perkebunan telah dilakukan di tempat asal benih, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan kembali pada benih dalam bentuk dan umur yang sama;
- d. Terjadinya alih fungsi lahan dari kebun benih sumber menjadi kebun produksi dan tambang sehingga produsen benih tidak dapat memproduksi benihnya dan permohonan sertifikasi pun tidak ada;



- e. Terbatasnya jumlah Pengawas Benih Tanaman yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang meliputi 1 (satu) Pengawas benih Tanaman Ahli dan 3 (tiga) Pengawas Benih Tanaman Terampil membawahi 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 Provinsi Kalimantan Utara.
- 2. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman
 - a. Masih banyak petugas meupun pekebun yang tidak berani melaporkan adanya benih illegal di wilayahnya karena takut bersentuhan dengan hukum sehingga peredaran benih illegal kelapa sawit masih marak;
 - b. Banyak produsen benih yang tidak menyimpan dokumen penyerta benih dengan baik sehingga saat diperlukan dokumen tidak ditemukan;
 - c. Produsen benih tidak pernah melaporkan pemasangan label benih pada saat benih diedarkan kepada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Tidak ada koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan dari luar wilayah yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur kepada Pengawas Benih Tanaman Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal;
 - e. Adanya penerapan keadilan *restorative* pada kasus benih illegal menyebabkan tidak adanya efek jera kepada pelaku benih illegal;
 - f. Banyaknya petani pekebun kelapa sawit yang tidak mengetahui cara mendapatkan benih kelapa sawit yang resmi, bersertifikat dan berlabel;
 - g. Petani pekebun kelapa sawit membeli benih secara *online* dan ditawarkan dari pintu ke pintu dengan harga murah serta



- langsung mendapatkan benih kelapa sawit tersebut tanpa menanyakan dokumen benih kepada penjual benih;
- h. Mengedarkan/menjual benih kelapa sawit tanpa memiliki Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan kepada masyarakat sekitar;
 - i. Tidak mengetahui adanya produsen benih kelapa sawit yang resmi di wilayah mereka;
 - j. Keterbatasan informasi dari petugas pengawas benih Kabupaten/Kota tentang benih bersertifikat dan berlabel serta kurangnya koordinasi dengan petugas yang bersangkutan untuk mendapatkan benih resmi kelapa sawit;
 - k. Adanya beberapa tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa dalam dan aren yang belum terdata deskripsinya;
 - l. Belum terdokumentasinya data tanaman seperti asal usul benih dan tahun mulai penyebaran tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa dalam dan aren; dan
 - m. Tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa dalam dan aren belum dikembangkan secara budidaya yang baik.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut antara lain:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - a. Perlu dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan untuk produsen benih maupun kelompok tani serta perusahaan-perusahaan besar;
 - b. Berkoordinasi dengan sumber benih bahwa permintaan benih dimasyarakat semakin meningkat di tahun 2023. Untuk itu perlu adanya perbanyakan kembali terhadap benih yang dihasilkan dari sumber benih;
 - c. Melakukan pelarangan terhadap benih yang sakit untuk tidak beredar dimasyarakat dan kebun benih sumber untuk sementara dilakukan penanganan serangan penyakit dengan



berkoordinasi kepada UPTD P2TP dan produsen benih dianjurkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap kebun tersebut hingga sehat kembali dengan dipantau oleh UPTD PBP secara berkala;

- d. Melakukan identifikasi, penilaian dan penetapan kebun sumber oleh UPTD PBP agar kebun sumber benih dapat tersedia kembali;
- e. Membuat suatu kebijakan yang dituangkan di dalam regulasi pemerintah daerah untuk mengatur keluar masuknya benih dalam suatu wilayah; dan
- f. Melakukan pembinaan terhadap petani pekebunan dengan melakukan sosialisasi perbenihan.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman

- a. Perlu dilaksanakan kembali sosialisasi bagi petani/pekebun sumber benih maupun produsen benih sesuai komoditi yang diusahakannya;
- b. Sumber benih maupun produsen benih agar rutin melaporkan kegiatan perbenihannya kepada petugas pengawas benih Kabupaten/Kota yang secara berjenjang melaporkan kepada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan menyimpan arsip/dokumen penyerta benih dengan baik karena dokumenter tersebut sangatlah penting untuk mengetahui asal usul benih dan diperlukan pada saat dilakukan pengawasan benih;
- c. Diwajibkan kepada setiap produsen benih untuk melaporkan pemasangan label benih sebelum benih diedarkan kepada petugas pengawas benih Kabupaten/Kota dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;



- d. Harus ada koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman luar wilayah Provinsi khususnya untuk benih yang akan masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan menginfokan lebih awal perihan benih perkebunan yang akan dikirim dengan mengirimkan dokumen benih, transportasi benih dan pembawa benih sehingga pengawasan dapat lebih maksimal;
- e. Kasus benih illegal harus diselesaikan sampai persidangan/vonis dan tidak diberlakukan keadilan restorative kepada pelaku agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya;
- f. Perlu dilakukan sosialisasi langsung kepada petani pekebun kelapa sawit tentang pentingnya menggunakan benih kelapa sawit yang bersertifikat dan berlabel sehingga mereka tidak lagi mau membeli benih tanpa dokumen benih walaupun harga yang ditawarkan relatif murah;
- g. Memberi pengertian yang lebih intens mengenai kerugian yang akan dialami jika menggunakan benih illegal, yaitu kerugian secara finansial, waktu dan tenaga;
- h. Memberikan bimbingan kepada petani pekebun kelapa sawit yang ingin menjadi produsen benih kelapa sawit yang mempunyai IUPBTP baik melalui telepon ataupun secara langsung;
- i. Membuat leaflet tentang penggunaan benih illegal kelapa sawit yang dapat dibagikan langsung ke petani saat petugas UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur datang berkunjung ke lapangan;
- j. Selalu berkoordinasi dengan petugas pengawas benih perkebunan setempat jika memerlukan informasi tentang sumber benih kelapa sawit yang resmi dan cara mendapatkannya;
- k. Perlu melakukan identifikasi tanaman Perkebunan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

- l. Dokumen asal usul benih jika ada harus disimpan agar dokumen benih tersedia saat diperlukan;
- m. Perlunya pelatihan budidaya tanaman perkebunan terhadap petani; dan
- n. Tanaman perkebunan yang memiliki keunggulan di daerah perlu tetap dipelihara dan dikembangkan agar tidak punah.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.324.913.700,- dari pagu Rp. 9.053.510.000,- (91,95%) dengan output pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Luas kebun yang dibangun seluas 1.497.368 Ha dari target 1.500.674 Ha atau 99,78%. Rincian luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.20. Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan

di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Komoditi	Luas (Ha)
1.	Kelapa Sawit	1.322.015
2.	Karet	125.320
3.	Kakao	7.813
4.	Kelapa Sawit	20.144
5.	Lada	8.161
6.	Komoditi Lain	3.915
Total		1.497.368

*) Angka sementara tahun 2023

- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 33 kelompok tani dari target 30 kelompok atau 110%, dengan rincian sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.21. Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan

No	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Kegiatan	Penerima	Target (Ha)
1	Kutai Kertanegara	Perluasan Areal Kelapa Sawit	2 Kelompok	89
		Perluasan Areal Karet	3 Kelompok	30
		Perluasan Areal Kakao	1 Kelompok	20
2	Paser	Perluasan Areal Kelapa Sawit	2 Kelompok	65
		Perluasan Areal Karet	1 Kelompok	15
3	Kutai Barat	Perluasan Areal Kelapa Sawit	2 Kelompok	46
		Perluasan Areal Lada	5 Kelompok	100
		Perluasan Areal Kelapa	1 Kelompok	20
		Perluasan Areal Kakao	1 Kelompok	20
		Perluasan Areal Karet	7 Kelompok	155
		Perluasan Areal Aren	2 Kelompok	25
		Perluasan Areal Pala	2 Kelompok	50
4	Berau	Perluasan Areal Kakao	2 Kelompok	60
5	Mahakam Ulu	Perluasan Areal Kakao	2 Kelompok	50
TOTAL			33 Kelompok	745



Faktor pendorong tingginya pencapaian target program ini antara lain:

1. Ketersediaan benih;
2. Ketersediaan lahan yang bebas kawasan; dan
3. Tersedianya kelompok tani yang terdata di SIMLUHTAN.

Dalam pelaksanaan program, terkait bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan target yang tertera dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 dan sudah di distribusikan keseluruh kelompok penerima. Namun terkait implementasi dilapangan khususnya di tingkat petani/pekebun masih terdapat masalah antara lain :

- a. Masih terdapat bantuan benih tanaman perkebunan yang belum di tanam dilahan pekebun/petani hal ini dikarenakan faktor iklim (Kemarau) yang panjang adanya benih yang setelah berada dikelompok harus dilakukan pemeliharaan untuk mencegah benih mati sebelum melakukan penanaman.
- b. Adanya budaya atau kebiasaan pekebun di beberapa daerah setelah melakukan pembukaan lahan melakukan penanaman padi dan tanaman pangan lainnya sehingga benih yang sudah dibagikan masih di simpan di masing-masing tempat pekebun.
- c. Pembukaan lahan kebun yang relatif lambat sehingga realisasi penanaman belum sepenuhnya selesai, hal ini disebabkan sebagian besar kelompok tani melakukan secara bergotong royong sehingga harus menunggu giliran dalam pembukaan lahan.

Terkait permasalahan di atas, selaku pelaksana kegiatan terus secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi ditahun berjalan dan tahun berikutnya, serta memberikan informasi melalui sosialisasi terkait teknis budidaya komoditas yang diberikan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Dalam pelaksanaan program ini didukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator jumlah luas kebun yang diperluas. Capaian pada indikator ini 745 Ha atau 100% dari target 745 Ha, dengan komoditi yang diperluas sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.22. Rekapitulasi Perluasan Komoditi Perkebunan

Tahun 2023

No.	Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Perluasan Areal Kelapa Sawit	200	200
2.	Perluasan Areal Kelapa	20	20
3.	Perluasan Areal Karet	200	200
4.	Perluasan Areal Kakao	150	150
5.	Perluasan Areal Lada	100	100
6.	Perluasan Areal Aren	25	25
7.	Perluasan Areal Pala	50	50
Total Perluasan		745	745

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dimana indikatornya adalah jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian dengan capaian 1 Dokumen atau 100% dari target 1 Dokumen.

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan luas kebun komoditi perkebunan pada tahun 2023 dengan melaksanakan aktivitas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan
Tahun 2023

No.	Lokasi / Kelompok Tani	Ha	Gender		Jumlah KK
			L	P	
1	Perluasan Areal Kelapa Sawit	<u>200</u>			<u>133</u>
a	Kab. Paser	<u>65</u>			<u>40</u>



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Lokasi / Kelompok Tani	Ha	Gender		Jumlah KK
			L	P	
	seleroi Taka Bersama (Ds. Terbu Paser Damai Kec. Batu Engau)	25	13	2	15
	Poktan Usaha Baru (Ds. Selerong Kec. Muara Komang)	40	23	2	25
b	Kab. Kutai Kertanegara	<u>89</u>			<u>50</u>
	Poktan Karya Bersama (Ds. Manunggal Kec. Sebulu)	39	23	2	25
	Poktan Bunga Indah (Ds. Enggelam Kec. Mura Wis)	50	18	7	25
c	Kab. Kutai Barat	<u>46</u>			<u>43</u>
	Poktan Gunung Gawi (Kamp. Muara Kedang Kec. Bongan)	26	17	9	26
	Poktan Permata Hijau (Kamp. Keay Kec. Damai)	20	10	7	17
2	Perluasan Areal Lada	<u>100</u>			<u>101</u>
a	Kab. Kutai Barat	<u>100</u>			<u>101</u>
	Poktan Sumber Maju (Kampung Muut Kec. Nyuatan)	25	20	5	25
	Poktan Bayuq Maju (Kampung Terajuk Kec. Nyuatan)	20	11	12	23
	Sempekat Bersama I (Kampung Linggang Amer Kec. Linggang Bigung)	20	9	6	15
	Sempekat Bersama II (Kampung Linggang Amer Kec. Linggang Bigung)	15	16	4	20
	Poktan Pentat Makmur (Kampung Pentat Kec. Jempang)	20	14	4	18



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Lokasi / Kelompok Tani	Ha	Gender		Jumlah KK
			L	P	
3	Perluasan Areal Kakao	<u>150</u>			<u>110</u>
a	Kab. Berau	<u>60</u>			<u>30</u>
	Poktan Makassang I (Kampung Maluang Kec. Gunung tabur)	40	20	0	20
	Poktan Merpati Jaya (Kampung Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur)	20	10	0	10
b	Kab. Kutai Kertanegara	<u>20</u>			<u>20</u>
	KWT Sumber Sari Rejeki (Ds. Sumber Sari Kec. Kota Bangun)	20	0	20	20
c	Kab. Kutai Barat	<u>20</u>			<u>20</u>
	Poktan Jelewet Jaya (Kamp. Tutung Kec. Linggang Bigung)	20	17	3	20
d	Kab. Mahakam Hulu	<u>50</u>			<u>40</u>
	Poktan Mambes I (Ds.Mamahak Besar Kec. Long Bagun)	25	12	8	20
	Poktan Mambes II (Ds.Mamahak Besar Kec. Long Bagun)	25	15	5	20
4	Perluasan Areal Karet	<u>200</u>			<u>198</u>
a	Kab. Paser	<u>15</u>			<u>18</u>
	Poktan Amanah (Ds. Busui Kec. Batu Sopang)	15	16	2	18
b	Kab. Kutai Kertanegara	<u>30</u>			<u>34</u>
	Poktan Lais Berjaya (Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu)	5	10	0	10
	Poktan Tunas Harapan (Ds. Handil Terusan Kec. Anggana)	15	14	0	14



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Lokasi / Kelompok Tani	Ha	Gender		Jumlah KK
			L	P	
	Poktan Rawa Manili (Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu)	10	9	1	10
c	Kab. Kutai Barat	155			146
	Poktan Karya Tani 2 (Kampung Balok Asa Kec. Barong Tongkok)	20	8	12	20
	Poktan Bina Karya (Kampung Balok Asa Kec. Barong Tongkok)	20	9	11	20
	Poktan Karya Tani IV (Kampung Balok Asa Kec. Barong Tongkok)	20	11	9	20
	Poktan Pelan Jaya Lestari (Kampung Melak Ulu Kec. Melak)	6	5	0	5
	Poktan Harapan Jaya 3 (Kampung Muara Asa Kec. Barong Tongkok)	44	25	11	36

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan komoditas perkebunan adalah masih kurangnya minat petani terhadap komoditas perkebunan selain sawit khususnya untuk komoditi Pala dan Aren, sehingga dalam pelaksanaannya sering mengalami keterlambatan dalam proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL).

Tindak lanjut dalam mengatasi hambatan tersebut di atas, selaku pelaksana kegiatan sudah melakukan sosialisasi kepada Kelompok Tani terhadap komoditas yang dianggap baru oleh masyarakat dalam hal ini diberikan informasi terkait budidaya tanaman, pasca panen sampai pada pengolahan dan manfaat komoditi tersebut.



4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.473.851.443,- dari pagu Rp. 6.586.333.600,- dengan capaian kinerja keuangan 98,29%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.043.084,- atau 98,40% dari pagu dana Rp. 5.081.550.200,-. Output program ini adalah jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 8,59 Juta Ton CO₂eq atau 212,41% dari target 4,04 Juta Ton CO₂eq. Capaian ini dihitung dari:

1. Basis Lahan

Lahan yang dilindungi/ ANKT yang dinventarisasi seluas 130.248,06 ha (pada tabel 3.24) . Dari luasan area yang dilindungi hanya di ambil sekitar 50% = 65.124 ha X 132 (simpanan CO₂ rata-rata (ton/ha) dari tutupan lahan berhutan sekunder = 8.59 juta to CO₂eq

Tabel 3.24. Luasan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi
Tahun 2023

No.	Jumlah PBS	Lokasi	Luas NKT (Ha)
1.	27 PBS	Kab. Kutai Kartanegara	28.453,98
2.	3 PBS	Kab. Penajam Paser Utara	2.454,49
3.	19 PBS	Kab. Kutai Barat	8.588,65
4.	21 PBS	Kab. Berau	13.852,68
5.	80 PBS	Kab. Kutai Timur	53.312,24
6.	29 PBS	Kab. Paser	17.938
7.	6 PBS	Kab. Mahakam Ulu	5.648,02
Total			130.248,06



2. Basis Limbah

Pemanfaatan Bioenergi dengan penurunan emisi berbasis limbah 0,032 juta ton CO₂eq

Faktor yang mendorong tingginya capaian program tersebut antara lain:

- a. Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem sertifikasi Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia;
- b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB);
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- f. Peraturan Gubernur Kaltim Nomer 43 tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan;
- g. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19 tahun 2022 Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) 2022-2024;
- h. Adanya peningkatan serapan karbon dengan bertambahnya area berekosistem yang berhutan, dilindungi dan dikelola untuk sektor perkebunan; dan
- i. Adanya pemanfaatan bio energi dengan penurunan emisi berbasis limbah POME 0,032 Juta Ton CO₂eq.

Sedangkan faktor penghambat capaian kinerja program adalah:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

1. Tidak semua pembinaan dapat dilakukan di seluruh Kabupaten/ Kota; dan
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM.

Program ini di dukung oleh Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi. Output kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha Perkebunan dengan capaian 176 pelaku usaha atau 128,47% dari target 137 pelaku usaha yang terdiri dari:

- a. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dengan capaian kinerja 129,55 % atau dengan capaian 171 pelaku usaha dari 132 pelaku usaha yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25. Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Kegiatan
1.	PT. Pucuk Jaya	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
2.	PT. Borneo Indosubur	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
3.	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
4.	PT. Pelita Niaga Makmur	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
5.	PT. Sinergi Alam Tropika	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
6.	PT. Pradiksi Gunatama	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
7.	PT. Muaratoyu Subur Lestari	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
8.	PT. Bumi Mulia Makmur Lestari	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
9.	PT. Sinar Alam Niaga Raya	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
10.	PT. Agro Inti Kencanamas	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
11.	PT. Pucuk Jaya	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
12.	PT. Borneo Indah Marjaya	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
13.	PT. Perkebunan Nusantara XIII	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
14.	PT. Multi Jayantara Abadi	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
15.	PT. Gawi Makmur Kalimantan	Kabupaten Paser	Sosialisasi/Pembinaan ANKT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Kegiatan
16.	PT. Farinda Bersaudara	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
17.	PT. Aneka Reksa International Corp	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
18.	PT. Kutai Agro Lestari	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
19.	PT. Kruing Lestari Jaya	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
20.	PT. Harapan Rimba Raya	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
21.	PT. Borneo Citra Persada Jaya	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
22.	PT. PP. London Sumatera	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
23.	PT. Citra Palma Pertiwi	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
24.	PT. Borneo Surya Mining Jaya	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
25.	PT. Citra Agro Kencana	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
26.	PT. Putra Bongan Jaya	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
27.	PT. Kedap Sayaaq Dua	Kabupaten Kutai Barat	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
28.	PT. Kutai Agro Jaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
29.	PT. Alam Jaya Persada	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
30.	PT. Tunas Prima Sejahtera	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
31.	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
32.	PT. Jaya Mandiri Sukses	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
33.	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
34.	PT. Enggang Alam Sawita	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
35.	PT. Tritunggal Sentral Buana	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
36.	PT. Manunggal Adi Jaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
37.	PT. Agro Tirta Kencana	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
38.	PT. Sawit Kaltim Lestari	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
39.	PT. Hamparan Sentosa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
40.	PT. Agro Bumi Kaltim	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
41.	PT. Borneo Bahakti Sejahtera	Kabupaten Mahakam Ulu	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
42.	PT. Marsam Citra Adiperkasa	Kabupaten Mahakam Ulu	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
43.	PT. Setia Agro Utama	Kabupaten Mahakam Ulu	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
44.	PT. Citra Palma Pertiwi	Kabupaten Mahakam Ulu	Sosialisasi/Pembinaan ANKT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Kegiatan
45.	PT. Putra Utama Lestari	Kabupaten Mahakam Ulu	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
46.	PT. Cahaya Anugrah Plantation	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
47.	PT. Agro Indomas	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
48.	PT. Mega Hijau Bersama	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
49.	PT. Sukses Tani Nusasubur	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
50.	PT. Waru Kaltim Plantation	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
51.	PT. Buana Mudantara	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
52.	PT. Berau Sawit Sejahtera	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
53.	PT. Gunta Samba Jaya	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
54.	PT. Mulia Inti Perkasa	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
55.	PT. Global Primata Mandiri	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
56.	PT. Berau Karitindo Lestari	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
57.	PT. Sentosa Kalimantan Jaya	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
58.	PT. Malindomas Perkebunan	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
59.	PT. Hutan Hijau Mas	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
60.	PT. Jabontara Eka Karsa	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
61.	PT. Kukar Commodities Worldwide	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
62.	PT. Dwiwira Lestari Jaya	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
63.	PT. Tunas Alam Nusantara	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
64.	PT. Agrindo Sukses Sejahtera	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
65.	PT. Anugerah Agung prima Abadi	Kabupaten Berau	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
66.	PT. Triputra Agro Persada grup	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
67.	PT. Andalas Wahana Sukses	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
68.	PT. Hanusentra Agro Karet	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
69.	PT. Swakarsa Sinar Sentosa	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
70.	PT. Anugerah Energitama	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Kegiatan
71.	PT. Astra Agro Lestari Group	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
72.	PT. Shabantara Rawi Sentosa	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
73.	PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
74.	PT. Bima Agri Sawit	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
75.	PT. Dinamika Prima Artha	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
76.	PT. Nusaraya Agrosawit	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
77.	PT. Nusantara Agro Sentosa	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
78.	PT. Fairco Agro Mandiri	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
79.	PT. Cipta Davia Mandiri	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
80.	PT. Teladan Prima Grup	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
81.	PT. Sinergi Agro Industri (KLK Grup)	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
82.	PT. Indonesia Plantation Synergy	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
83.	PT. Gunta Samba (Gunta Samba Grup)	Kabupaten Kutai Timur	Sosialisasi/Pembinaan ANKT
84.	PT. Pucuk Jaya	Kabupaten Paser	Monev/Pembinaan ANKT
85.	PT Multi Makmur Mitra Alam	Kabupaten Paser	Monev/Pembinaan ANKT
86.	Hutan Masyarakat Padang Jaya	Kabupaten Paser	Monev/Pembinaan ANKT
87.	PT Putra Bongan Jaya	Kabupaten Kutai Barat	Monev/Pembinaan ANKT
88.	PT Aneka Reksa Internasional	Kabupaten Kutai Barat	Monev/Pembinaan ANKT
89.	PT. Borneo Citra Persada Abadi	Kabupaten Kutai Barat	Monev/Pembinaan ANKT
90.	PT. Kutai Balian Nauli	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan ANKT
91.	PT. Andalas Wahana Sukses	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan ANKT
92.	PT. Kalimantan Agro Nusantara	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan ANKT
93.	PT Setia Agro Utama	Kabupaten Mahakam Ulu	Monev/Pembinaan ANKT
94.	PT Tunas Alam Nusantara	Kabupaten Berau	Monev/Pembinaan ANKT
95.	PT Inti Energi Kaltim	Kabupaten Berau	Monev/Pembinaan ANKT
96.	PT. Nusaraya Agro Sawit (NAS)	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan ANKT
97.	PT. Dewata Sawit Nusantara (DSN Grup)	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan ANKT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Kegiatan
98.	PT. Karyanusa Eka Daya (KED)	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan ANKT
99.	PT. Prima Mitrajaya Mandiri (Evan Grup)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Monev/Pembinaan ANKT
100.	PT. Teguh Jaya Prima Abadi (Evan Grup)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Monev/Pembinaan ANKT
101.	PT Borneo Citra Persada Mandiri (KAS Grup)	Kabupaten Kutai Barat	Monev/Pembinaan ANKT
102.	Hutan Adat Benuaq Telimuk	Kabupaten Kutai Barat	Monev/Pembinaan ANKT
103.	Hutan Adat Teluyen Jarikng	Kabupaten Kutai Barat	Monev/Pembinaan ANKT
104.	PT. Hutan Hijau Mas	Kabupaten Berau	Monev/Pembinaan POME
105.	PT. Telen	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan POME
106.	PT. Bima Palma Nugraha	Kabupaten Kutai Timur	Monev/Pembinaan POME
107.	KUD Sumber Rezeki	Kabupaten Paser	Pembinaan ISPO
108.	KUD Sumber Bahagia	Kabupaten Paser	Pembinaan ISPO
109.	KUD Rukun Karya	Kabupaten Paser	Pembinaan ISPO
110.	KUD Mitra Bersama Babulu	Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembinaan ISPO
111.	KUD Sumber Sawit Nusantara	Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembinaan ISPO
112.	KUD Belayan Sejahtera	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembinaan ISPO
113.	KUD Samurai	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembinaan ISPO
114.	Koperasi Sawit Mandiri	Kabupaten Kutai Timur	Pembinaan ISPO
115.	Kop. Rukun Karya	Kabupaten Paser	Pembinaan ISPO
116.	Koperasi Gapoktan Jafloresia Jaya	Kabupaten Paser	Pembinaan ISPO
117.	Koperasi Produsen Bumi Subur	Kabupaten Paser	Pembinaan ISPO
118.	KTPA Kampung Sekolaq Darat	Kabupaten Kutai Barat	KTPA (Pembentukan)
119.	KTPA Tepian Makmur	Kabupaten Kutai Timur	KTPA (Pembentukan)
120.	KTPA Kampung Harapan Maju	Kabupaten Berau	KTPA (Pembentukan)
121.	KTPA Kampung Tembudan	Kabupaten Berau	KTPA (Pembentukan)
122.	KTPA Kampung Tumbit Melayu	Kabupaten Berau	KTPA (Pembentukan)
123.	KTPA Babulu Darat Mandiri Sejati	Kabupaten Penajam Paser Utara	KTPA (Pembentukan)
124.	KTPA Berambai	Kota Samarinda	KTPA (Pembentukan)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Kegiatan
125.	KTPA Kendarom	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
126.	KTPA Kerta Bhakti	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
127.	KTPA Kerta Bumi	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
128.	KTPA Krayan Bahagia	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
129.	KTPA Krayan Makmur	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
130.	KTPA Krayan Sentosa	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
131.	KTPA Modang	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
132.	KTPA Saing Prupuk	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
133.	KTPA Sawit Jaya	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
134.	KTPA Bontlest	Kota Bontang	KTPA (Pembentukan)
135.	KTPA Kampung Ujoh Bilang	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
136.	KTPA Kampung Long Melaham	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
137.	KTPA Kampung Lutan	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
138.	KTPA Laham	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
139.	KTPA Long Hubung	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
140.	KTPA Kampung Batu Majang	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
141.	KTPA Rangan	Kabupaten Paser	KTPA (Pembentukan)
142.	KTPA Kampung Long Melaham	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
143.	KTPA Kampung Lutan	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
144.	KTPA Laham	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembentukan)
145.	KTPA Tunas Harapan	Kota Balikpapan	KTPA (Pembinaan)
146.	KTPA Kampung Merabu	Kabupaten Berau	KTPA (Pembinaan)
147.	KTPA Kampung Long Ayan	Kabupaten Berau	KTPA (Pembinaan)
148.	KTPA Desa Peridan	Kabupaten Kutai Timur	KTPA (Pembinaan)
149.	KTPA Bangun Mulyo	Kabupaten Penajam Paser Utara	KTPA (Pembinaan)
150.	KTPA Kampung Gunung Sari	Kabupaten Berau	KTPA (Pembinaan)
151.	KTPA Tunas Harapan	Kota Balikpapan	KTPA (Pembinaan)
152.	KTPA Berambai	Kota Samarinda	KTPA (Pembinaan)
153.	KTPA Kampung Ujoh Bilang	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembinaan)
154.	KTPA Pati Geni	Kabupaten Kutai Kartanegara	KTPA (Pembinaan)
155.	KTPA Desa Sabintulung	Kabupaten Kutai Kartanegara	KTPA (Pembinaan)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Kegiatan
156.	KTPA Desa Padang Jaya	Kabupaten Paser	KTPA (Pembinaan)
157.	KTPA Waru	Kabupaten Penajam Paser Utara	KTPA (Pembinaan)
158.	KTPA Labangka Biru Bersih	Kabupaten Penajam Paser Utara	KTPA (Pembinaan)
159.	KTPA Bontlest	Kota Bontang	KTPA (Pembinaan)
160.	KTPA Kampung Ujoh Bilang	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembinaan)
161.	KTPA Kampung Rukun Damai	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembinaan)
162.	KTPA Kampung Long Merah	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembinaan)
163.	KTPA Kampung Long Hurai	Kabupaten Mahakam Ulu	KTPA (Pembinaan)
164.	KTPA Desa Muaratoyu	Kabupaten Paser	KTPA (Pembinaan)
165.	KTPA Desa Bente Tualan	Kabupaten Paser	KTPA (Pembinaan)
166.	KTPA Desa Mendik	Kabupaten Paser	KTPA (Pembinaan)
167.	KTPA Desa Munggu	Kabupaten Paser	KTPA (Pembinaan)
168.	KTPA Desa Tepian Terap	Kabupaten Kutai Timur	KTPA (Pembinaan)
169.	KTPA Desa Pelawan	Kabupaten Kutai Timur	KTPA (Pembinaan)
170.	KTPA Taruna Muda	Kota Samarinda	KTPA (Pembinaan)
171.	KTPA Desa Laburan	Kabupaten Paser	KTPA (Pembinaan)

b. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten dengan realisasi 5 pelaku usaha atau 100% dari 5 pelaku usaha yang menjadi target. Pelaku usaha tersebut antara lain:

1. PT Cipta Davia Mandiri dgn Masy Desa Kelinjau Kab. Kutim 06 Maret 2023, (TW I);
2. PT Sinergi Agro Industri dgn KSU Karya Bhakti Kab. Kutim 13 Maret 2023, (TW I);
3. PT Raja Kutai Baru Makmur dengan PT Tritunggal Sentra Buana Kab. Kukar 04 Mei 2023, (TW II);
4. PT Tritunggal Sentra Buana dengan Kop Mekar Sejahtera Kab. Kukar 27 Juli 2023, (TW III); dan



5. PT Niaga Mas Gemilang dgn Masy Sei Payang Kec Loa Kulu Kab. Kukar 12 September 2023, (TW III).

Kegiatan di atas terdiri dari 2 sub kegiatan, yakni:

1. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu Rp. 3.197.288.488,- terealisasi sebesar Rp. 3.147.849.437,- (98,45%). Target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani dengan capaian 21.248 Ha atau 228,06% dari target 9.317 Ha.
2. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu sebesar Rp. 1.884.261.712,- dan realisasi sebesar Rp. 1.852.193.647,- (98,30%). Output pada sub kegiatan ini adalah jumlah luasan pencegahan, penanganan lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan dengan capaian 430 Ha atau 286,67% dari target 150 Ha. Capaian tersebut terdiri dari :
 - a. Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina terealisasi sebanyak 38 KTPA=380 Ha dimana sebanyak 23 KTPA telah dibentuk dan 15 KTPA yang dibina. Keberhasilan pembentukan Kelompok Tani Peduli API (KTPA) dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Kabupaten/Kota tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM) serta mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan. Namun ke depan masih terdapat tantangan dalam pembinaan KTPA karena masih terbatasnya sarana dan prasarana serta



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

sumber daya manusia KTPA yang tersedia. KTPA yang dibentuk dan dibina pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.26. KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2023

No.	KTPA	Desa/Kampung/Kel	Kecamatan	Kab./Kota
KTPA yang Dibentuk				
1	KTPA KampungHarapan Maju	Tembudan	Tabalar	Berau
2	KTPA Kampung Tembudan	Tembudan	Batu Putih	Berau
3	KTPA KampungTumbit Melayu	Tumbit Melayu	Teluk Bayur	Berau *
4	KTPA Berambai	Kelurahan SempajaUtara	Kec. Samarinda Utara	Samarinda
5	KTPA Babulu Darat Mandiri Sejati	Desa Babulu Darat	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
6	KTPA Tepian Makmur	Desa Tepian Makmur	Kec. Rantau Pulung	Kutai Timur
7	KTPA Kendarom	Kendarom	Kuaro	Paser
8	KTPA Kerta Bhakti	Kerta Bhakti	Long Ikis	Paser
9	KTPA Kerta Bumi	Kerta Bumi	Kuaro	Paser
10	KTPA Krayan Bahagia	Krayan Bahagia	Long Ikis	Paser
11	KTPA Krayan Makmur	Krayan Makmur	Long Ikis	Paser
12	KTPA Krayan Sentosa	Krayan Sentosa	Long Ikis	Paser
13	KTPA Modang	Modang	Kuaro	Paser
14	KTPA Saing Prupuk	Saing Prupuk	Batu Engau	Paser
15	KTPA Sawit Jaya	Sawit Jaya	Long Ikis	Paser
16	KTPA Rangan	Rangan	Kuaro	Paser



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	KTPA	Desa/Kampung/Kel	Kecamatan	Kab./Kota
17	KTPA Kampung Sekolaq Darat	Kampung Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	Kutai Barat
18	KTPA Bontlest	Kelurahan Bontang Lestari	Kec. Bontang selatan	Bontang
19	KTPA Kampung Ujoh Bilang	Ujoh Bilang	Long Bagun	Mahulu
20	KTPA Kampung Long Melaham	Long Melaham	Long Bagun	Mahulu
21	KTPA Kampung Lutan	Lutan	Long Hubung	Mahulu
22	KTPA Laham	Laham	Laham	Mahulu
23	KTPA Long Hubung	Long Hubung	Long Hubung	Mahulu
	KTPA yang Dibina			
24	KTPA TunasHarapan	Kelurahan Karang Joang	Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan
25	KTPA Kampung Merabu	Kampung Merabu	Kec. Kelay	Berau
26	KTPA Kampung Long Ayan	KampungLong Ayan	Segah	Berau
27	KTPA Desa Peridan	Desa Peridan	Kec. Sangkulirang	Kutai Timur
28	KTPA BangunMulyo	Kel. Bangun Mulyo	Kec. Waru	Penajam Paser Utara
29	KTPA KampungGunung Sari	Kampung Gunung Sari	Kec. Segah	Berau
30	KTPA TunasHarapan	Kelurahan Karang Joang	Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan
31	KTPA Berambai	Kelurahan Sempaja Utara	Kec. Samarinda Utara	Samarinda
32	KTPA Kampung Ujoh Bilang	Ujoh Bilang	Long Bagun	Mahulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	KTPA	Desa/Kampung/Kel	Kecamatan	Kab./Kota
33	KTPA Pati Geni	Desa Kota Bangun	Kec. Kota Bangun	Kutai Kartanegara
34	KTPA Desa Sabintulung	Desa Sabintulung	Kec. Muara Kaman	Kutai Kartanegara
35	KTPA Desa Padang Jaya	Desa Padang Jaya	Kuaro	Paser
36	KTPA Waru	Kel. Waru	Kec. Waru	Penajam Paser Utara
37	KTPA Labangka Biru Bersih	Desa Labangka	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
38	KTPA Bontlest	Kelurahan Bontang Lestari	Kec. Bontang selatan	Bontang

- b. Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani terealisasi 50 Ha atau 100% dari target 50 Ha. Keberhasilan penanganan konflik didorong oleh antara lain:
1. Koordinasi yang intensif kepada para pihak (Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten, para pihak yang berkonflik, OPD lingkup Provinsi dan Kabupaten serta Mitra Pembangunan Perkebunan);
 2. Melaksanakan mediasi terhadap laporan-laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha;
 3. Melaksanakan Identifikasi kasus-kasus konflik dengan langsung ke lapangan;
 4. Tingginya keinginan dari para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan guna mencapai kesepakatan;
 5. Kesiapan Provinsi dan Kabupaten untuk memfasilitasi konflik;



6. Komitmen Provinsi dan Kabupaten dalam menyelesaikan konflik (pada Rapat Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan); dan
7. Dorongan dari mitra untuk membantu sebagai mediator (IMN).

Meskipun capaian sesuai target, dalam pelaksanaan masih terdapat kendala, antara lain:

1. Masih ada kegiatan mediasi yang cukup penting yang belum terakomodir pendanaanya; dan
2. Kurang tersedianya tenaga mediator di Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 1.473.808.359,- atau 97,94% dari pagu sebesar Rp. 1.504.783.400,-. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan capaian Rp. 2.616.244.788,- atau 337,61% dari target Rp. 774.940.000,- sebagaimana tabel berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.27. Rekapitulasi Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT Tahun 2023

No.	Lokasi	Komoditas	Jenis Penyakit	Serangan Berat (Ha)	Koefesien Produktifitas	Produktifitas Komoditi	Kehilangan Hasil	Harga Rata-rata Produk (Rp)	Taksasi Kerugian Serangan OPT (Rp)
1.	Kel. Teritip Balikpapan.	Karet	Pestalotiopsis	2	1.038	0,4	830,40	12.000	9.964.800
2.	Desa Klempang Sari Kec. Kuaro Kab. Paser	Kelapa Sawit	Ganoderma	16	2.780	1	44.480	2.129	94.697.920
3.	Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU.	Karet	Pestalotiopsis	231	1.038	0,4	95.911,20	12.000	1.150.934.400
4.	Kec. Sekolaq Darat Kec. Kubar	Karet	Pestalotiopsis	105	1.038	0,4	43.596	12.000	523.152.000
5.	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar	Lada	Penggerek Batang Lada	22,8	0,486	0,5	5,54	70.000	387.828
6.	Kec. Kelay Kab. Berau.	Karet	Pestalotiopsis	50	1.038	0,4	20.760	12.000	249.120.000
7.	Kel. Teritip Kota Balikpapan	Karet	Pestalotiopsis	80	1.038	0,4	33.216	12.000	398.592.000
8.	Kec. Penajam Kab. PPU.	Kelapa Sawit	Alga	40	2.780	0,8	88.960	2.129	189.395.840
Jumlah				546,8	10.750	4,3	327.759	134.258	2.616.244.788



Faktor mendorong tingginya capaian program ini antara lain:

- a. Sinergitas antar program dalam mencapai sasaran rencana strategi;
- b. Optimalisasi kelembagaan dan instalasi perlindungan tanaman Perkebunan;
- c. Pengendalian OPT terpadu merupakan faktor penting dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- d. Tersedianya instalasi perlindungan dan kelembagaan perlindungan tanaman berupa Brigade Proteksi Tanaman dan Regu Pengendali OPT;
- e. Petugas Pengamat OPT di Kabupaten/Kota; dan
- f. Kurangnya alat mobilisasi, anggaran dan bahan pengendali OPT untuk menangani luas lahan yang terserang OPT

Meskipun capaian kinerja program ini melebihi target, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program, antara lain:

1. Kurangnya optimalnya pengembangan biopestisida dan APH;
2. Mahalnya bioaya racun/pestisida;
3. Rendahnya pengetahuan petani dalam penerapan system budidaya tanaman yang baik;
4. Kurangnya optimalnya tata kelola pelayanan teknis;
5. Kurangnya SDM perlindungan Tanaman;
6. Belum dikenalnya pengendalian OPT terpadu ramah lingkungan;
7. Jarak beberapa Kabupaten yang terlalu jauh sehingga pengendalian tidak maksima;
8. Kurang Aktifnya Para Petani untuk membuat Gerakan Pengendalian (Gerdal); dan
9. Rendahnya pengetahuan petani dalam penerapan system budidaya tanaman yang baik.

Tindaklanjut untuk meminimalisir permasalahan diatas adalah:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

1. Membangun kerjasama dan jaringan dalam pengembangan biopestisida dan APH;
2. Optimalisasi tata kelola pelayanan teknis;
3. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM perlindungan tanaman;
4. Diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan;
5. Dibutuhkan Peran Penting dari semua Stekholder untuk membantu petani dalam mengatasi OPT;
6. Diperlukan transfer teknologi GAP (*Good Agriculture Practice*) agar RPO mempunyai bekal dalam melakukan Pengendalian OPT yang baik; dan
7. Diperlukan transfer teknologi pengendalian OPT yang ramah lingkungan diperlukan transfer teknologi GAP (*Good Agriculture Practice*).

Dalam pencapaian program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan indikator luas serangan berat OPT yang dikendalikan, dimana tercapai 546,8 Ha atau 350,51% dari target 156 Ha. Data luas serangan berat OPT pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.28. Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Komoditi	Luas Serangan (Ha)	Lokasi
1.	Penyakit Busuk Pangkal Batang (<i>Ganoderma boniniense</i>)	Kelapa Sawit	16	Desa Klempang Sari Kec. Kuaro Kab. Paser
2.	Penyakit Gugur Daun Karet (<i>Pestalotiopsis</i> , spp)	Karet	2	Kelurahan Teritip Kotamadya Balikpapan
3.	Penyakit Gugur Daun Karet (<i>Pestalotiopsis</i> , spp)	Karet	231	Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Komoditi	Luas Serangan (Ha)	Lokasi
4.	Penyakit Gugur Daun Karet (<i>Pestalotiopsis</i> , spp)	Karet	105	Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
5.	Penggerek Batang Lada (<i>Lophobaris piperis</i> Marsh.)	Lada	22.8	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
6.	Penyakit Gugur Daun Karet (<i>Pestalotiopsis</i> , spp)	Karet	50	Kec. Kelay Kab. Berau
7.	Penyakit Gugur Daun Karet (<i>Pestalotiopsis</i> , spp)	Karet	80	Kelurahan Teritip Kotamadya Balikpapan
8.	Alga (<i>Cephaleuros vircens</i>)	Kelapa Sawit	40	Kec. Penajam Kab. PPU
Total			546,8	

Sedangkan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan tercapai 546,8 Ha atau 109,36% dari target 500 Ha. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung mencapai target tersebut antara lain:

1. Perbanyak bahan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan produksi sebagai berikut:
 - a. Agens Pengendali Hayati (APH) Padat yang diproduksi 1.000; dan
 - b. Agens Pengendali Hayati (APH) Cair yang diproduksi 600 Liter.
2. Pengembangan Agens Pengendali Hayati (APH) sebanyak 2 jenis, antara lain:
 - a. Mikoriza; dan
 - b. Bakteri *Pseudomonas fluorescens*.



3. Membentuk dan membina Kelembagaan Pelindungan Tanaman, antara lain:
 - a. Membentuk 1 Satgas Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Membentuk 1 Satgas Regu Pengendali OPT di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Membina 21 Petugas Pengamat OPT di Kabupaten/Kota dengan melaksanakan aksi Pertemuan Teknis Petugas Pengamat OPT se Kalimantan Timur yang diagendakan setahun sekali; dan
 - d. Membina 2 Regu RPO di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

Faktor pendorong capaian sub kegiatan ini antara lain:

1. Sinergitas antar program dalam mencapai sasaran rencana strategi;
2. Optimalisasi kelembagaan dan instalasi perlindungan tanaman perkebunan; dan
3. Pengendalian OPT terpadu merupakan faktor penting dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian program ini adalah:

1. Kurangnya optimalnya pengembangan biopestisida dan APH;
2. Kurangnya optimalnya tata kelola pelayanan teknis;
3. Kurangnya SDM perlindungan Tanaman; dan
4. Belum dikenalnya pengendalian OPT terpadu ramah lingkungan.

Tindaklanjut yang dilakukan antara lain:

1. Membangun kerjasama dan jaringan dalam pengembangan biopestisida dan APH;
2. Optimalisasi tata kelola pelayanan teknis;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

3. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM perlindungan tanaman; dan

4. Diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan.

Selain itu faktor pendorong tercapainya target sub kegiatan ini diantaranya:

- a. Koordinasi dan sinergi kegiatan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga pengembangan biopestisida dan APH;
- c. Optimalisasi media dalam peningkatan layanan teknis melalui Klinik Tanaman Perkebunan;
- d. Optimalisasi pemasaran produk bahan pengendali biopestisida dan APH;
- e. Pembentukan penguatan kelembagaan Brigade Proteksi Tanaman dan Regu Pengendali OPT; dan
- f. Kejadian insidental serangan OPT di wilayah tertentu yang perlu penanganan cepat, efektif dan efisien.

5. **Program Perizinan Usaha Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 1.233.298.575,- atau 98,83% dari pagu sebesar Rp. 1.247.873.900,- . Program ini memiliki indikator jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 35 perusahaan atau 100%. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.29. Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Realisasi PUP	Kelas	Nomor SK Hasil Kelas Kebun	Ket
1	Berau	1 PT. Tridaya Hutan Lestari (Eks. PT. Anugrah	C		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten	Realisasi PUP	Kelas	Nomor SK Hasil Kelas Kebun	Ket
		Surya Mandiri)			
		2 PT. Prakarsa Tani Sejati	E		
		3 PT. Anugerah Energy Tama	D		
		4 PT. Tunas Alam Nusantara	III		
		5 Brau Agro Asia	III		
2	Kutai Timur	1 PT. Sima Agung Prima Sawit	II	525/01/PUP-DISBUN/III/2023	Baik
		2 Dharma Inti Sawit Nugraha	II	525/02/PUP-DISBUN/III/2023	Baik
		3 Dewata Sawit Nusantara	III	525/03/PUP-DISBUN/III/2023	Sedang
		4 Dharma Satya Nusantara (PKS 2)	III	525/04/PUP-DISBUN/III/2023	Sedang
		5 Dharma Satya Nusantara (PKS 3)	II	525/05/PUP-DISBUN/III/2023	Baik
		6 Dharma Satya Nusantara (PKS 4)	III	525/06/PUP-DISBUN/III/2023	Sedang
		7 PT. Kutai Balian Nauli	II	5008.1/07/PUP-DISBUN/V/2023	Baik
		8 PT. Fairco Agro Mandiri	II	5008.1/08/PUP-DISBUN/V/2023	Baik
		9 PT. Sawit Sukses Sejahtera I	II	400.14.11/11/PUP-DISBUN	
		10 PT. Sawit Sukses Sejahtera II	II	400.14.11/12/PUP-DISBUN	
		11 PT. Prima Cipta Selaras	II	400.14.11/13/PUP-DISBUN	
		12 PT. Multi Pasific International (Per)	II	400.14.11/14/PUP-DISBUN	
		13 PT. Multi Pasific International (Ker)	II	400.14.11/15/PUP-DISBUN	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten	Realisasi PUP	Kelas	Nomor SK Hasil Kelas Kebun	Ket
		14 PT. Pradana Telen Agromas	II	400.14.11/17/PUP-DISBUN	
		15 PT. Etam Bersama Lestari	II	400.14.11/18/PUP-DISBUN	
3	Kutai Barat	1 PT. Borneo Persada Energi Jaya (BPEJ)			
		2 PT. Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ)			
		3 PT. Citra Agro Kencana (CAK)			
		4 PT. Kedap Sayaaq Dua (KSD)			
		5 PT. Kaltim Hijau Makmur (KHM)			
		6 PT. Rimba Rayatama Jaya (RRJ)			
		7 PT. Ketapang Agro Lestari (KAL)			
		8 PT London Sumatera Jaya, tbk			
		9 PT Putra Bongan Jaya			
4	Kutai Kartanegara	1 PT. Tritunggal Sentra Buana	II	-	Baik
		3 PT. Alam Jaya Persada	IV	-	Kurang
		4 PT. Bekacak Himba Bahari	IV	-	Kurang
		5 PT. Persada Bangun Jaya	D	-	Kurang
		6 PT. Sawit Ungul Agro Niaga	V	-	Kurang Sekali
Jumlah Keseluruhan			35 Perusahaan		



Realisasi program di atas sesuai target dikarenakan beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan Provinsi melakukan pelatihan penilaian Usaha Perkebunan di Bogor untuk menambah SDM petugas PUP di Kabupaten;
2. Dinas Perkebunan Provinsi melakukan Upaya mendorong Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu dan Paser untuk melaksanakan PUP;
3. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha; dan
4. Peraturan perundang-undangan terkait PUP (Permentan No. 7 tahun 2009 dan Permentan No. 98 Tahun 2013).

Walaupun demikian masih terdapat faktor penghambat capaian kinerja tersebut yaitu kurangnya tenaga PUP yang bersertifikat di Kabupaten dan dari 7 Kabupaten, 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang belum melakukan PUP karena tidak tersedianya anggaran.

Tindak lanjut terhadap faktor penghambat di atas dilakukan hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan; dan
2. Pelatihan PUP bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan.

Program Perizinan Usaha Pertanian didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan. Capaian indikator tersebut yaitu 107 perusahaan atau 100% dari target 107 perusahaan, yang terdiri dari 52 pelaku usaha yang dibina tahun 2023, 45 pelaku usaha yang dimitrakan dari 2019-2022 dan 10 di



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

tahun 2023. Pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel 3.30. Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2023

No.	Perusahaan/Koperasi
Pelaku Usaha Perkebunan yang Dibina	
I.	Kutai Timur <ol style="list-style-type: none">1 PT Kemilau Indah Nusantara2 KOP. Produksi Sekurau Maju Sejahtera3 KOP. Perkebunan Pinang Raya Bersatu4 KOP. Produsen Putera Selatan5 PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation6 PT. Sinergy Agro Industri7 PT. Gunta Samba8 PT. Swakarsa Sinarsentosa9 PT. Emas10 PT. Telen Prima Sawit11 PT. Setara Kemiilau Mas Adicita12 PT. Tanjung Manis Arta Lestari13 PT. Mukti Sejahtera Abadi14 PT. Umaq Tukong Mandiri Utama15 PT. Preya Sawit Makmur16 PT. Agratama Bangkit Sangsaka17 PT. Maryam Decorindo Persada18 PT. Perkebunan Warga Rimba19 PT. Anugerah Energitama
II.	Kutai Kartanegara <ol style="list-style-type: none">1 PT. Niaga Mas Gemilang2 PT. Agro East Kencana3 KOP Bina Tani Sawit Sedulang Dua4 PT. Tritunggal Sentra Buana5 PT. Sawit Unggul Agro Niaga6 PT. Jaya Mandiri Sukses7 PT. Manunggal Adi Jaya (Pma)8 PT. Teguh Jaya Prima Abadi (Pma)9 PT. Agro Bumi Kaltim10 PT. Rea Kaltim Plantation (Pma)11 PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa12 PT. Tritunggal Sentra Buana13 KOP. Mekar Sejahtera14 PT. Budiduta Agro Indo



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Perusahaan/Koperasi
	15 KOP. Telihan Banhkit Bersinar 16 PT. Hamparan Sentosa
III.	Kutai Barat 1 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera (PMA) 2 PT. Farinda Bersaudara (PMA) 3 PT. Putra Bongan Jaya (PMA) 4 PT. Kruing Lestari Jaya 5 PT. Harapan Rimba Raya PT. Mahakam Hijau Makmur
IV.	Penajam Paser Utara 1 PT. Kebun Mandiri Sejahtera 2 PT. Sukses Tani Nusasubur 3 PT. Waru Kalimantan Plantation PT. Agro Indomas
V.	Berau 1 PT. Tanjung Buyu Perkasa 2 PT. Sentosa Kalimantan Jaya 3 PT. Dwiwira Lestari Jaya
VI.	Paser 1 PT. Pucuk Jaya 2 PT. Indo Kencana Agri 3 PT. Muara Toyu Subur Lestari 4 PT. Buana Subur Lestari 5 PT. Anugrah Abadi Multi Usaha PT. Agro Inti Kencanamas PT. Multi Jayantara Abadi
VII	Lintas Kabupaten 1 PT. Gawi Makmur Kalimantan
Pelaku Usaha Perkebunan yang Dimitrakan	
	1 PKS PT Buana Wira Subur Sakti dgn KUD Rukun Karya Desa Suliran Baru Kec. Paser Balengkong Kab. Paser 2 PKS PT Buana Wira Subur Sakti dgn KUD Sumber Makmur Desa Kendarom Kec. Kuaro Kab. Paser 3 PT Budiduta Agromakmur dgn Kelompok Tani Tantai Indah Desa Jonggon Kec Loa Kulu Kab. Kukar 4 Perjanjian kemitraan PT Anugrah Abadi Multi Usaha dgn Kop Serba Usaha Sukses Sinar Abadi 5 Perjanjian Kemitraan PT Yudha Wahana Abadi dgn Kelompok Tani Merapun Jaya Abadi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Perusahaan/Koperasi
6	Perjanjian Kemitraan PT Sumber Bunga Sawit Lestari dengan Koperasi One Berkat Solidaritas
7	Perjanjian Kemitraan PT Karya Prima Agro Sejahtera dengan Koperasi Piak Makmur Sejahtera
8	PT Bima Palma Nugraha dengan Pemdes Tepian Langsung Kec Bengalon Kab. Kutai Timur
9	PT Borneo Indah Marjaya dengan Gapoktan Laburan Bersatu , Desa Laburan Kec Pasir Belengkong Kab. Paser
10	PT Sinar Bumi Wijaya dengan Koperasi Konsumen "Desa Karangan Ilir Manis"

Sub kegiatan yang mendukung dalam kegiatan ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan indikator jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi dengan capaian 1 Laporan atau 100% dari target 1 Laporan. Capaian kegiatan maupun sub kegiatan di atas sesuai target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Koordinasi yang intensif kepada Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten, pelaku usaha serta Mitra Pembangunan Perkebunan;
 2. Sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat pekebun tentang peraturan dan perundang-undangan terkait kemitraan dan kewajiban perusahaan perkebunan;
 3. Adanya keinginan pekebun swadaya untuk bermitra dengan PKS;
 4. Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi terwujudnya kemitraan; dan
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan usaha perkebunan se Kalimantan Timur.
6. **Program Penyuluhan Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 3.893.699.032,- atau 97,29% dari pagu sebesar Rp. 4.002.247.100,- . Target indikator pada program ini yaitu jumlah kelembagaan petani



berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebanyak 2 lembaga (200%) yaitu

1. BUMP Kedang Ipil Sejahtera Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat Kab. Kutai Kartanegara; dan
2. Koperasi Produsen Karya Swadaya Aren Tuana Tuha Kecamatan Belayan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Adanya Permentan No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
2. Adanya Permentan No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
3. Motivasi kelompok tani dalam mengembangkan kelembagaan dan memajukan usaha dan produknya;
4. Peluang pasar sudah ada; dan
5. Akses permodalan sudah tersedia.

Meskipun capaian program ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Kelembagaan petani belum memiliki *business plan*;
2. Pemahaman terkait korporasi petani yang sesuai dengan Permentan No. 18 Tahun 2018 masih belum dikuasai oleh kelompok tani dan sebagian aparat pemerintah; dan
3. Masih kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap pembentukan kelembagaan petani yang berbadan hukum.

Capaian program ini didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

- a) Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah SDM petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 50 orang atau 100% dari target 50 orang. Petugas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya tersebut antara lain:

Tabel 3.31. Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kutai Kartanegara	11 Orang
2.	Kutai Barat	12 Orang
3.	Kutai Timur	7 Orang
4.	Penajam Paser Utara	5 Orang
5.	Paser	4 Orang
6.	Berau	7 Orang
7.	Samarinda	4 Orang
	Total	50 Orang

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dengan output jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dengan capaian 45 Orang atau 100% dari target 45 Orang. ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 3.32. ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kutai Kartanegara	7 Orang
2.	Kutai Barat	7 Orang
3.	Kutai Timur	6 Orang
4.	Penajam Paser Utara	4 Orang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
5.	Paser	2 Orang
6.	Berau	4 Orang
7.	Mahulu	6 Orang
8.	Samarinda	9 Orang
	Total	45 Orang

Manfaat dilaksanakan pengembangan kompetensi penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan ini antara lain:

1. Menyamakan persepsi, menyatukan pemikiran pemahaman dan metode pemberdayaan kelembagaan petani di sektor Perkebunan;
2. Meningkatkan peran dan fungsi petugas pendamping dalam pembinaan dan pendampingan dilapangan dalam pemberdayaan kelembagaan petani dan usahanya sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan; dan
3. Meningkatkan sinergitas setiap pemangku kepentingan baik itu di Kabupaten/Kota, antar instansi lingkup pertanian dalam mendukung misi pemberdayaan petani oleh petugas dilapangan.

b) Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 31 kelompok tani atau 100% dari target 31 kelompok tani.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

**Tabel 3.33. Kelompok Tani yang Dikembangkan
Kompetensinya Tahun 2023**

No	Kabupaten/ Kota (Poktan/ Gapoktan)	Pengurus	Komoditi	Alamat	Luas Kebun (Ha)	Jumlah Poktan/ Gapoktan	Jumlah Orang
I. Paser					130	5	92
1.	Seleroi Taka Bersama	Rudi Ahmad	Kelapa Sawit	Desa Terbu Paser Damai Kec. Batu Engau	25	1	15
2.	Amanah	Abdul Rajak	Karet	Desa Busui Kec. Batu Sopang	15	1	18
3.	Usaha Baru	Jumriansyah	Kelapa Sawit	Desa Selerong Kec. Muara Komang	40	1	25
4.	Harapan Jaya	M. Nur Khozin	Karet	Desa Sekuan Makmur Kec. Muara Komam	30	1	21
5.	Rukun Makmur	Yateno	Karet	Desa Sekuan Makmur Kec. Muara Komam	20	1	13
II. Kutai Kartanegara					139	6	99
1.	Lais Berjaya	Abdulah	Karet	Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu	5	1	15
2.	Rawa Manili	Kamaluddin	Karet	Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu	10	1	
3.	Tunas Harapan	Agus Imawan	Karet	Desa Handil Terusan Kec. Anggana	15	1	14
4.	Karya Bersama	Agus Wahyudi	Kelapa Sawit	Desa Manunggak Daya Kec. Sebulu	39	1	25
5.	Bunga Indah	Yahya Minto	Kelapa Sawit	Desa Enggelam Kec. Muara Wis	50	1	25
6.	KWT. Sumbers ari Rejeki	Siti Faikah	Kakao	Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun	20	1	20
III. Mahakam Ulu					50	2	40
1.	Mambes I	Heliodorus Tekwan	Kakao	Desa Memahak Besar Kecamatan Long Bagun	25	1	20
2.	Mambes II	Yulianus Lejiu	Kakao	Desa Memahak Besar Kecamatan Long Bagun	25	1	20



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota (Poktan/ Gapoktan)	Pengurus	Komoditi	Alamat	Luas Kebun (Ha)	Jumlah Poktan/ Gapoktan	Jumlah Orang
IV.	Kutai Barat				399	18	356
1.	Pentat Makmur	M. Taufik Hidayat	Lada	Kampung Pentat Kec. Jempang	20	1	18
2.	Pentat Lestari	Radius Ugit	Pala	Kampung Pentat Kec. Jempang	39	1	25
3.	Permata Hijau	Teodorus Janu	Kelapa Sawit	Kampung Keay Kec. Damai	20	1	17
4.	Pemolaq Bogor	Trismanto	Karet	Kampung Asa Kec. Barong Tongkok	35	1	25
5.	Sinar tani	Yohanes Rendi	Kelapa Dalam	Kampung Mencimai Kec. Barong Tongkok	20	1	20
6.	Harapan Jaya III	Hariyanto	Karet	Kampung Muara Asa Kec. Barong Tongkok	44	1	25
7.	Karya Tani II	Jainal	Karet	Kampung Balok Asa Kec. Barong Tongkok	20	1	12
8.	Bina Karya	Supriadi	Karet	Kampung Balok Asa Kec. Barong Tongkok	20	1	20
9.	Sumber Maju	Lius Saputra	Lada	Kampung Muut Kec. Nyuatan	25	1	25
10.	Bayuq Maju	Benus	Lada	Kampung Terajuk Kec. Nyuatan	20	1	23
11.	Sempeka t Bersama I	Florensius Selion	Lada	Kampung Linggang Amer Kec. Linggang Bigung	20	1	20
12.	Sepekat Bersama II	Asran S.	Lada	Kampung Linggang Amer Kec. Linggang Bigung	15	1	15
13.	Jantur Mapan	Abdul Rahman	Karet	Kampung Linggang Mapan Kec. Linggang Bigung	25	1	23
14.	Sempeka t Samaan Taai	Jenius.K	Karet	Kamp Linggang Bigung Baru Kec. Linggang Bigung	23	1	22
15.	Tunas Harapan	Mason	Karet	Kampung Linggang Mencelew Kec.	17	1	20



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota (Poktan/ Gapoktan)	Pengurus	Komoditi	Alamat	Luas Kebun (Ha)	Jumlah Poktan/ Gapoktan	Jumlah Orang
				Lingang Bigung			
16.	Jantur Sengkul <i>i</i>	Anistasius	Aren	Kampung Lingan Mapan Kec. Linggang Bigung	13	1	20
17.	Mapai Sejahtera	Depit Manual	Aren	Kampung Lingan Melapeh Kec. Linggang Bigung	12	1	15
18.	Bergulur Bersatu	Fransiskus Yosef S	Pala	Kampung Lingan Mapan Kec. Linggang Bigung	11	1	11
Jumlah Keseluruhan					718	31	587

2. Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan dengan capaian 7 unit atau 100% dari target 7 unit. 7 Unit Komoditas Unggulan Sektor Perkebunan yang telah di Promosikan dan di Pasarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut antara lain:

a) Aren





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Gambar 3.9. Produk Komoditi Aren yang Dipromosikan dan Dipasarkan

b) Lada





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Gambar 3.10. Produk Komoditi Lada yang Dipromosikan dan Dipasarkan

c) Kopi





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Gambar 3.11. Produk Komoditi Kopi yang Dipromosikan dan Dipasarkan

d) Kakao



Gambar 3.12. Produk Komoditi Kakao yang Dipromosikan dan Dipasarkan

e) Kelapa



Gambar 3.13. Produk Komoditi Kelapa yang
Dipromosikan dan Dipasarkan

f) Kelapa Sawit



Gambar 3.14. Produk Komoditi Kelapa Sawit yang
Dipromosikan dan Dipasarkan

g) Kelapa Kopyor



Gambar 3.15. Produk Komoditi Kelapa Kopyor yang
Dipromosikan dan Dipasarkan

3. Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan dengan capaian 1 unit atau 100% dari target 1 unit. Teknologi yang diversifikasi tersebut yakni komoditi Kelapa Dalam menjadi Nata de Coco.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang terjadi selama pencapaian target kinerja kegiatan ini ialah:

- Faktor Pendorong Capaian Kinerja Kegiatan:
 - a) Peluang pasar komoditas perkebunan yang cukup besar sudah;
 - b) Akses permodalan sudah tersedia;
 - c) Program pelatihan dan bimtek dari pemerintah daerah cukup banyak terkait diversifikasi dan pemasaran produk;
 - d) Adanya fasilitasi promosi dan pemasaran oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan



- e) Adanya fasilitasi kemitraan dengan retail besar dan industri perhotelan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Faktor Penghambat Capaian Kinerja Kegiatan antara lain:
 - a) Petani/pelaku usaha yang berminat untuk melakukan diversifikasi produk turunan non sawit relatif masih sedikit;
 - b) Proses pengolahan produk yang membuat imbal balik pendapatan diterima lebih lama jika dibandingkan dengan menjual produk secara langsung tanpa diolah;
 - c) SDM petani yang terbatas untuk melakukan diversifikasi dan pengolahan produk; dan
 - d) Produk olahan yang ada banyak yang belum tersertifikasi untuk masuk pasar modern/skala besar.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, antara lain:

- a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian dengan target 1 Dokumen atau 100% dari target 1 Dokumen yang berisi laporan kegiatan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang telah dilaksanakan. Pada sub kegiatan ini aktivitas kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan;
2. Promosi dan pemasaran komoditas hasil perkebunan;
3. Pengembangan informasi pasar komoditi perkebunan;
4. Bimtek pengolahan produk perkebunan standar *Good Manufactory Product* (GMP) dan fasilitasi manajemen usaha di Kab. Kutai Barat;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

5. Fasilitasi ijin usaha dan sertifikasi produk komoditi perkebunan (P-IRT) di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan;
6. Peningkatan kapasitas tenaga teknis Perkebunan;
7. Pelatihan minyak goreng kelapa (FCPF – CF);
8. Pelatihan pengolahan limbah batok kelapa (FCPF – CF);
dan
9. Pelatihan pembuatan pembeku lateks (FCPF – CF).

b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan dengan capaian 10 Kelompok atau 100% dari target 10 Kelompok. Kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan petani tersebut antara lain:

Tabel 3.34. Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota (Poktan/ Gapoktan)	Pengurus	Komoditi	Alamat	Jumlah Poktan/ Gapoktan
I.	Paser				2
	1. Seroi Taka Bersama	Rudi Ahmad	Kelapa Sawit	Desa Terbu Paser Damai Kec. Batu Engau	1
	2. Amanah	Abdul Rajak	Karet	Desa Busui Kec. Batu Sopang	1
II.	Kutai Kartanegara				2
	1. Lais Berjaya	Abdulah	Karet	Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu	1
	2. Karya Bersama	Agus Wahyudi	Kelapa Sawit	Desa Manunggak Daya Kec. Sebulu	1
III.	Mahakam Ulu				2
	1. Mambes I	Heliodorus Tekwan	Kakao	Desa Memahak Besar Kecamatan Long Bagun	1
	2. Mambes II	Yulianus Leju	Kakao	Desa Memahak Besar Kecamatan Long Bagun	1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota (Poktan/ Gapoktan)	Pengurus	Komoditi	Alamat	Jumlah Poktan/ Gapoktan
IV.	Kutai Barat				4
	1. Pentat Makmur	M. Taufik Hidayat	Lada	Kampung Pentat Kec. Jempang	1
	2. Pentat Lestari	Radius Ugit	Pala	Kampung Pentat Kec. Jempang	1
	3. Permata Hijau	Teodorus Janu	Kelapa Sawit	Kampung Keay Kec. Damai	1
	4. Pemolaq Bogor	Trismanto	Karet	Kampung Asa Kec. Barong Tongkok	1
Jumlah Keseluruhan					10

c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk dengan capaian 20 lembaga atau 100% dari target 20 lembaga.

Lembaga ekonomi pekebun tersebut antara lain:

Tabel 3.35. Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota (Kelompok Tani)	Pengurus	Komoditi	Alamat	Jumlah Pelatihan	
					Kelas	Orang
I.	KUTAI KARTANEGARA					
	1. Sama Rasa	Parhan	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20
	Pandan Raya	Muttaqin		Desa Sedulang Kec. Kota Bangun		
	Maju Makmur	Nurhadi		Desa Sari nadi Kecamatan Kota Bangun		
	2. Rasa Baru	Ahmad Sasiansyah	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20
	Sungai Ranten	Syahrulah		Desa Sedulang Kec. Kota Bangun		
	Karya Bakti	Abdul Manan		Desa Kota Bangun III		
3. Saka Indah	Bahrul N	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20	
Harapan Etam	Sopiansyah		Desa Sedulang Kec. Kota Bangun			
4. Suka Maju	Jemi Charles	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota (Kelompok Tani)	Pengurus	Komoditi	Alamat	Jumlah Pelatihan	
					Kelas	Orang
	Karya Jaya	Amir Baruddin		Desa Sedulang Kec. Kota Bangun		
5.	Sambung Rasa	Sartin	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20
	Suka Mulya	M. Yasin		Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun Darat		
	Tani Makmur	Muhammad Suki		Desa Kota Bangun III		
6.	Hidup Baru	Simon	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20
	Gapoktan Kedang Ipil	Hardiansyah		Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat		
	Karya Utama II	Warsono		Desa Kota Bangun III		
7.	KWT. Pandan Wangi	Dahlia	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20
	KWT. Sumber Sari Rejeki	Siti Faikah		Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun		
8.	KWT. Pandan Arum Sawit Perdana	Yusnidar Zebua	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	1	20
				Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun Darat		
9.	Rasa Baru	Ahmad Sasiansyah / Perwakilan	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara	1	20
	Sama Rasa Sambung Rasa Hidup Baru KWT Pandan Wangi					
10	Saka Indah Sama Rasa Hidup Baru KWT. Pandan Arum	Hardiansyah /Perwakilan	Aren	Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara	1	20
Jumlah Realisasi Kegiatan (Kelas/Orang)					10	200
Jumlah Total Keseluruhan (Lembaga/Orang)					20	200



2. Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI dengan capaian 6 kelompok tani atau 150% dari target 4 kelompok tani. Kelompok tani tersebut antara lain:
- a. UPPB Mitra Bangun Sejahtera, Desa Makarati, Kec. Marang Kayu, Kab.Kutai Kartanegara, komoditas karet yang di uji di Puslit Karet Bogor dengan hasil uji kadar K3 sebesar 77,51%;
 - b. UPPB Jaya Barokah, Kel. Bentuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda, komoditas karet, yang di uji di Lab. PT. MKC dengan hasil uji kadar K3 sebesar 69,1%;
 - c. UPPB Setia Kawan, Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. PPU, komoditas karet, yang di uji di Lab. PT. MKC dengan hasil uji kadar karet K3 sebesar 72,9%;
 - d. Poktan Nyiur Melambai, Desa Kandolo, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur, komoditas aren, yang di uji di Lab. Central Universitas Padjajaran, Bandung dengan hasil pengujian kadar air 6,01% (SNI = 10%), kadar abu 1,94% (SNI = 2%);
 - e. Poktan Trubus, Desa Semoi, Kec. Sepaku, Kab. PPU, komoditas lada, yang di uji di Balitro, Bogor dengan hasil kadar minyak atsiri = 1,79, kadar air = 7,67, kadar protein = 10,18, kadar tannin = 0,25, kadar lemak = 9,19 dan kadar karbohidrat = 55,83; dan
 - f. Poktan Tani Karya Etam Lestari, Desa Mukti Lestari, Kab. Kutai Kartanegara, komoditas kakao, yang di uji di Puslitkoka, Jember, dengan hasil kadari air = 10,2, kadar biji berjamur = 0,3%, kadar biji slaty = 10,3%, kadar biji berserangga = 0,3%, kadar kotoran 1,1%, dan kadar biji berkecambah = 5%.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan di atas antara lain:



1. Adanya dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melindungi Indikasi Geografis terhadap Produk Perkebunan;
2. Adanya dukungan Pemerintah terhadap izin edar baik di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tentang PIRT, Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Adanya pendampingan kelembagaan terkait manajemen promosi dan pemasaran oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dukungan Laboratorium yang berstandar SNI 5. Pendampingan pemerintah terkait pengolahan pasca panen yang baik dan perluasan jaringan pemasaran; dan
5. Bantuan Peralatan pasca Panen baik dari APBD Provinsi, APBD Kab dan APBN.

Namun demikian masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan di atas antara lain:

1. Sebagian besar peralatan pengolahan masih tradisional;
2. Sebagian besar petani dalam pengolahan menggunakan metode secara turun temurun;
3. Perbedaan Lokasi tanaman antara yang di daerah Rawa dan didaerah perbukitan;
4. Perbedaan dalam penanganan pasca panen oleh petani; dan
5. Pengetahuan yang masih minim dari petani/pelaku usaha dalam manajemen kelembagaan berbasis korporasi.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain:

- a) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi dengan capaian 1 Unit atau 100% dari target 1 Unit yaitu BUMP Kedang Ipil Sejahtera



Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat Kab. Kutai Kertanegara

b) Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pendampingan manajemen koorporasi petani dengan capaian 1 Laporan atau 100% dari target 1 Laporan yang berisi laporan kegiatan pendampingan manajemen koorporasi petani yang telah dilaksanakan. Pada sub kegiatan pendampingan manajemen koorporasi petani, aktivitas kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. *Business matching and matchmaking* komoditas hasil Perkebunan;
2. Outlet produk hasil perkebunan kaltim (Toko Kebun Kaltim);
3. Bimbingan teknis pasca panen komoditas Perkebunan;
4. Bimbingan teknis tata niaga dan pemasaran komoditas Perkebunan;
5. Pelatihan pasca panen dan pengolahan perkebunan standar organik; dan
6. Pelatihan penguatan kelembagaan MPIG.

c) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah koorporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya dengan capaian 1 Unit atau 100% dari target 1 Unit. Unit koorporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya tersebut yakni penilaian pada kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren “Kampung Belayan” untuk ditingkatkan bentuk badan usahanya menjadi koperasi dalam rangka peningkatan penjualan dan produksi dan hasilnya ditandatangani berita



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

acara pembentukan koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Kartanegara ke Pengurus calon koperasi “Karya Swadaya Etam”. Pada sub kegiatan penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani, aktivitas kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pengujian sampel produk Perkebunan; dan
 2. Pertemuan teknis bidang pengolahan dan pemasaran.
- d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi dengan capaian 1 Unit atau 100% dari target 1 Unit. Pelatihan Sekolah Lapang Kelompok Tani (SL) Komoditi Perkebunan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 20 Orang / 1 Kelas/ 1 Unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.36. Pelatihan Sekolah Lapang Kelompok Tani (SL)
Komoditi Perkebunan Tahun 2023

No	Nama	Kelompok Tani	Luas Kebun (Ha)	Alamat
1.	Yunus	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
2.	H. Nasir	Taruna	1	Desa Tani Harapan
3.	H. Kamaruddin	Taruna	1	Desa Tani Harapan
4.	H. Darise	Taruna	1	Desa Tani Harapan
5.	H. Sahudi	Taruna	1	Desa Tani Harapan
6.	H. Abd. Latief	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
7.	H. Abd. Hamid	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
8.	Jufri	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
9.	Iskandar	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
10.	Daris	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
11.	H. Mastam	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
12.	H. Amir	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
13.	Masuddin	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
14.	Sanuddin	Taruna	0,5	Desa Tani Harapan
15.	Iwan Setiawan	Peduli Lindungi	0,5	Desa Tani Harapan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Nama	Kelompok Tani	Luas Kebun (Ha)	Alamat
16.	Sultan	Peduli Lindungi	0,5	Desa Tani Harapan
17.	H. Mure	Peduli Lindungi	0,5	Desa Tani Harapan
18.	Tendri	Peduli Lindungi	0,5	Desa Tani Harapan
19.	Sainuddin	Peduli Lindungi	0,5	Desa Tani Harapan
20.	H. Kadir	Peduli Lindungi	0,5	Desa Tani Harapan

Manfaat dari pelaksanaan pelatihan ini antara lain:

1. Perbaikan pola tanam petani yang berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas tanaman Perkebunan;
2. Merubah pola pikir poktan/gapoktan/petani tentang teknis budidaya dan manajemen kelembagaan kearah lebih baik dan maju;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir; dan
4. Pendampingan petani kearah kelembagaan yang aktif dan produktif.

Rata-rata pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tercapai sesuai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan pada rencana kerja dan selama pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami permasalahan yang signifikan.

D. Pencapaian Target SDGs Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,



pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari



Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) (MGDs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena:

1. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang;
2. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta;
3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya;
4. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*);
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media;
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*);
7. SDGs tidak hanya memuat tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*);

Semua Target dan tujuan TPB/SDGs terbagi menjadi empat pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola. Dinas Perkebunan mendukung pencapaian SDGs pada tujuan berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.37. Tujuan SDGs Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan SDGs	Indikator SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah / Non Pemerintah
		Kategori	Deskripsi		
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Regulasi	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada regulasi secara khusus pengelolaan ANKT di area perkebunan ditingkat nasional menyebabkan tidak sinerginya pelaksanaan program kegiatan oleh Pemerintah (K/L), Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan sehingga target luas Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang akan dipertahankan secara nasional seluas 70 juta Ha pada tahun 2024 di khawatirkan tidak akan tercapai2. Penyebaran Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Kabupaten dengan lokasi sulit terjangkau seluruhnya	<ol style="list-style-type: none">1. Mengusulkan rekomendasi membuat Peraturan Presiden tentang pengelolaan ANKT (menaungi pengelolaan ANKT pada seluruh sektor berbasis lahan) dan membuat peraturan Menteri Pertanian tentang petunjuk teknis pengelolaan ANKT pada perkebunan kelapa sawit/karet2. Perlu adanya kolaborasi antara Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi ANKT yang tidak dapat dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.38. Target, Indikator dan Capaian SDGs Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
1.	15.1.Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.2.(a).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Ha	100.622	2023	103.000	130,248	Tercapai

Pencapaian target di atas didukung melalui program berikut:

Tabel 3.39. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDGs

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Target Tahun 2023		Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan
						Sem 1	Sem 2		Sem 1	Sem 2	
05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	2023	Ha	103.000	129.526	130.248	3.197.288.488	481.152.917	3.147.849.437	Kab. Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Hulu, Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser Utara



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

E. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 64.264.860.330,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 32.218.346.030,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 19 oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menjadi Rp. 71.331.792.328,- (bertambah Rp. 7.066.931.998,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 39.285.278.028,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 67.863.776.752,- (95,14%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 37.066.824.492,- (94,35%) belanja pembangunan sebesar Rp. 30.796.942.260,- (96,10%). Perbandingan antara sasaran strategis, anggaran serta realisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	21.997	17.393*	79,07	58.303.482.928	55.004.889.536	94,34
2	Meingkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	63	111	176,19	7.834.207.500	7.707.150.018	98,38
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	112	166,95	149,06	5.194.101.900	5.151.727.198	99,18
	Jumlah				71.331.792.328	67.663.766.752	95,14

*) Sumber: Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2022)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, 44,93% anggaran Dinas Perkebunan dipergunakan untuk pembiayaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dan 55,07% dipergunakan untuk pembiayaan program penunjang dinas yang secara tidak langsung untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tabel 3.41. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
	Dinas Perkebunan+ 3 UPTD	64,264,860,330	71,331,792,328	67,863,766,752	95.14	
	Dinas Perkebunan	53,642,224,560	60,058,518,626	56,809,683,239	94.59	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27,134,564,860	33,550,858,926	31,505,983,388	93.91	Sekretariat
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,518,431,600	1,486,331,600	1,418,184,765	95.42	
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	626,939,900	594,839,900	570,617,795	95.93	
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	891,491,700	891,491,700	847,566,970	95.07	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,998,989,760	16,941,051,026	15,785,707,521	93.18	
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,567,349,760	16,471,971,026	15,353,217,521	93.21	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	431,640,000	469,080,000	432,490,000	92.20	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,044,908,000	1,680,908,000	1,652,230,956	98.29	
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	171,408,000	171,408,000	170,710,000	99.59	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	873,500,000	1,509,500,000	1,481,520,956	98.15	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,898,822,900	3,228,487,220	3,104,767,340	96.17	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,900,400	35,900,400	35,896,734	99.99	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209,403,500	390,750,500	388,631,898	99.46	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	357,470,000	470,987,320	365,168,000	77.53	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,203,000	49,203,000	49,133,000	99.86	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,696,000	509,696,000	500,000,000	98.10	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,237,150,000	1,771,950,000	1,765,937,708	99.66	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,723,434,000	4,974,161,200	4,470,557,870	89.88	
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	985,220,000	4,173,050,000	3,698,300,000	88.62	
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	738,214,000	801,111,200	772,257,870	96.40	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,572,693,200	3,785,137,480	3,653,735,669	96.53	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31,210,000	31,210,000	31,200,000	99.97	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	519,730,000	479,805,400	365,307,789	76.14	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	421,440,000	519,528,000	514,077,000	98.95	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,600,313,200	2,754,594,080	2,743,150,880	99.58	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,377,285,400	1,454,782,400	1,420,799,267	97.66	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309,266,600	309,266,600	298,200,467	96.42	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	912,818,800	990,315,800	967,681,950	97.71	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155,200,000	155,200,000	154,916,850	99.82	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7,122,478,500	7,122,478,500	6,851,745,460	96.20	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	7,122,478,500	7,122,478,500	6,851,745,460	96.20	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	7,122,478,500	7,122,478,500	6,851,745,460	96.20	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9,053,510,000	9,053,510,000	8,324,913,700	91.95	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	9,053,510,000	9,053,510,000	8,324,913,700	91.95	
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9,053,510,000	9,053,510,000	8,324,913,700	91.95	
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5,081,550,200	5,081,550,200	5,000,043,084	98.40	Bid. Perkebunan Berkelanjutan dan Bid. Usaha
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5,081,550,200	5,081,550,200	5,000,043,084	98.40	
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3,197,288,488	3,197,288,488	3,147,849,437	98.45	
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1,884,261,712	1,884,261,712	1,852,193,647	98.30	
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1,247,873,900	1,247,873,900	1,233,298,575	98.83	Bid. Usaha
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,247,873,900	1,247,873,900	1,233,298,575	98.83	
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1,247,873,900	1,247,873,900	1,233,298,575	98.83	
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4,002,247,100	4,002,247,100	3,893,699,032	97.29	Bid. Pengembangan Komoditi dan Bid. Pengolahan dan Pemasaran
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	908,093,300	908,093,300	868,622,100	95.65	
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	908,093,300	908,093,300	868,622,100	95.65	
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1,754,478,800	1,754,478,800	1,732,595,223	98.75	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1,045,361,800	1,045,361,800	1,035,124,123	99.02	
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	709,117,000	709,117,000	697,471,100	98.36	
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1,339,675,000	1,339,675,000	1,292,481,709	96.48	
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	268,020,500	268,020,500	248,194,300	92.60	
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	748,248,000	748,248,000	736,980,366	98.49	
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	157,289,900	157,289,900	149,786,443	95.23	
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	166,116,600	166,116,600	157,520,600	94.83	
3.27.0.00.0.0.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	2,813,119,190	3,065,834,190	3,041,902,912	99.22	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,022,250,190	2,274,965,190	2,252,305,128	99.00	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,960,000	84,960,000	84,960,000	100.00	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84,960,000	84,960,000	84,960,000	100.00	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183,600,000	183,600,000	183,600,000	100.00	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	183,600,000	183,600,000	183,600,000	100.00	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539,771,100	539,771,100	538,920,314	99.84	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,055,500	4,055,500	4,043,756	99.71	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113,678,800	113,678,800	113,053,175	99.45	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,936,000	51,936,000	51,925,000	99.98	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,744,000	7,744,000	7,712,000	99.59	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,756,800	7,756,800	7,748,710	99.90	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354,600,000	354,600,000	354,437,673	99.95	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282,779,410	282,779,410	274,013,800	96.90	
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282,779,410	282,779,410	274,013,800	96.90	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667,823,680	706,505,215	698,407,495	98.85	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,683,200	156,474,495	149,277,375	95.40	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323,400,000	323,400,000	322,499,400	99.72	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207,740,480	221,630,720	221,630,720	100.00	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263,316,000	477,349,465	472,403,519	98.96	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,406,000	24,406,000	22,790,790	93.38	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,000,000	413,033,465	409,721,355	99.20	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39,910,000	39,910,000	39,891,374	99.95	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	790,869,000	790,869,000	789,597,784	99.84	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	790,869,000	790,869,000	789,597,784	99.84	
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	400,835,000	400,835,000	400,412,962	99.89	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	390,034,000	390,034,000	389,184,822	99.78	
3.27.0.00.0.0 0.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	3,354,506,080	3,554,344,480	3,403,921,768	95.77	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,849,722,680	2,049,561,080	1,930,113,409	94.17	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,960,000	84,960,000	84,960,000	100.00	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84,960,000	84,960,000	84,960,000	100.00	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,960,000	93,960,000	93,218,061	99.21	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93,960,000	93,960,000	93,218,061	99.21	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405,610,200	405,610,200	402,599,978	99.26	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,081,300	9,081,300	9,000,050	99.11	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,611,500	55,611,500	55,384,070	99.59	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,088,000	41,088,000	39,151,000	95.29	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,151,000	21,151,000	21,077,883	99.65	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,878,400	3,878,400	3,878,400	100.00	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274,800,000	274,800,000	274,108,575	99.75	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604,665,400	604,665,400	533,686,684	88.26	
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	604,665,400	604,665,400	533,686,684	88.26	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521,213,280	521,213,280	483,116,227	92.69	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,200,000	5,200,000	5,200,000	100.00	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178,912,800	178,912,800	141,615,335	79.15	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,360,000	129,360,000	128,999,760	99.72	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207,740,480	207,740,480	207,301,132	99.79	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,313,800	339,152,200	332,532,459	98.05	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,203,000	12,203,000	10,952,100	89.75	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101,600,000	301,438,400	296,198,859	98.26	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,510,800	25,510,800	25,381,500	99.49	
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,504,783,400	1,504,783,400	1,473,808,359	97.94	
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1,504,783,400	1,504,783,400	1,473,808,359	97.94	
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1,504,783,400	1,504,783,400	1,473,808,359	97.94	
3.27.0.00.0.0.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4,455,010,500	4,653,095,032	4,608,258,833	99.04	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,211,808,300	1,409,892,832	1,378,422,567	97.77	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,960,000	84,960,000	84,960,000	100.00	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84,960,000	84,960,000	84,960,000	100.00	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77,067,000	77,067,000	75,283,009	97.69	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77,067,000	77,067,000	75,283,009	97.69	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331,414,700	331,414,700	330,949,951	99.86	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,343,000	7,343,000	7,342,660	100.00	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,669,900	70,669,900	70,434,766	99.67	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,576,000	27,576,000	27,576,000	100.00	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,927,000	17,927,000	17,877,910	99.73	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,698,800	2,698,800	2,671,000	98.97	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205,200,000	205,200,000	205,047,615	99.93	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,680,800	143,680,800	129,752,000	90.31	
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143,680,800	143,680,800	129,752,000	90.31	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542,982,800	560,345,600	547,264,974	97.67	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,267,200	85,267,200	79,805,074	93.59	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194,040,000	194,040,000	190,620,000	98.24	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259,675,600	277,038,400	272,839,900	98.48	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,703,000	212,424,732	210,212,633	98.96	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,203,000	12,203,000	11,078,418	90.78	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	180,721,732	185,550,915	102.67	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,500,000	19,500,000	13,583,300	69.66	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung Jawab
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3,243,202,200	3,243,202,200	3,229,836,266	99.59	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3,243,202,200	3,243,202,200	3,229,836,266	99.59	
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3,243,202,200	3,243,202,200	3,229,836,266	99.59	

Berdasarkan tabel di atas, capaian APBD setelah Perubahan Dinas Perkebunan beserta 3 UPTD mencapai 95,14%. Capaian tersebut terdiri dari capaian belanja program penunjang dan belanja program pembangunan Dinas dan UPTD. Capaian belanja program penunjang dinas mencapai 94,35%. Capaian ini belum mencapai 100% dikarenakan terdapat SILPA pada gaji dan tunjangan ASN dari beberapa pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki usia purna tugas. Sedangkan capaian belanja langsung mencapai 96,10%. Capaian Dinas dan masing-masing UPTD sebagai berikut:

1. Dinas dari pagu Rp. 60.058.518.626,- terealisasi sebesar Rp. 56.809.683.239,- atau 94,59%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif sisa kegiatan dan pengadaan. Realisasi masing-masing bidang sebagaimana penjabaran berikut:
 - a) Sekretariat dari pagu sebesar Rp. 33.550.858.926,- terealisasi sebesar Rp. 31.505.983.388,- atau 93,91% yang terdiri dari belanja operasi pegawai sebesar Rp. 16.471.971.026 dengan realisasi sebesar 15.353.217.521,- atau 93,21% dan belanja barang dan jasa serta modal sebesar Rp. 16.609.807.900,- dengan realisasi Rp. 15.720.275.867,- atau 94,64%.
 - b) Bidang Pengembangan Komoditi dari pagu sebesar Rp. 18.227.335.900,- terealisasi sebesar 17.148.467.260,- atau 94,08%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

- c) Bidang Perkebunan Berkelanjutan dari pagu sebesar Rp. 4.571.706.600,- terealisasi sebesar Rp. 4.503.466.034,- atau 98,51%.
- d) Bidang Usaha dari pagu sebesar Rp. 1.757.717.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.729.875.625,- atau 98,42%.
- e) Bidang Pengolahan dan Pemasaran dari pagu sebesar Rp. 1.950.899.700,- terealisasi sebesar Rp. 1.921.890.932,- atau 98,51%.

Capaian Bidang di atas tidak mencapai 100% dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. SILPA gaji sebesar Rp 1.155.343.505,- (1,92%). Hal ini dikarenakan terdapat pegawai yang purna tugas 4 sebanyak orang dan cadangan kenaikan gaji berkala.
- 2. SILPA Pengadaan sebesar Rp 1.375.291.172,- (2,28%) (SILPA Positif).
- 3. Silpa lainnya berasal dari sisa Standar Harga Satuan (SHS) dari belanja perjalanan dinas, makan minum rapat, honor kegiatan, FCPF-CF, biaya kontribusi, operasional kantor, ATK , cetak, hibah, belanja modal peralatan & mesin serta belanja modal dan pemeliharaan gedung/bangunan.

Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan adalah dengan lebih cermat dalam perencanaan anggaran di tahun mendatang.

- 2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dari pagu Rp. 3.065.834.190,- terealisasi sebesar Rp. 3.041.902.912,- atau 99,22%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif dari sisa pelaksanaan kegiatan.
- 3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dari pagu Rp. 3.554.344.480,- terealisasi sebesar Rp. 3.403.921.768,- atau 95,77%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

oleh SILPA positif dari sisa pengadaan dan sisa pelaksanaan kegiatan.

4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan dari pagu 4.653.095.032,- terealisasi 4.608.258.833,- atau 99,04%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif dari sisa pengadaan dan sisa pelaksanaan kegiatan.



BAB IV PENUTUP

Secara umum, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Hal ini dapat dilihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur "*Meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan*", yakni terdiri dari 3 (Tiga) sasaran.

Adapun capaian kinerja 3 (Tiga) sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut, meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan mencapai 17.890,80 Miliar Rupiah (81,33%) (Berdasarkan angka sangat sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023), dengan rata-rata pertumbuhan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013-2023 bernilai positif sebesar 4,50%.
- b. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 176,19 % yakni sebanyak 111 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).
- c. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP perkebunan rakyat sebesar 166,92% atau tercapai 149,04% dari target.

Dari ketiga sasaran di atas, sasaran pertama belum mencapai target. Salah satu faktor yang mempengaruhi belum tercapainya sasaran tersebut karena PDRB sub sektor perkebunan tersebut dihitung berdasarkan harga konstan yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.



Namun capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 404 miliar rupiah atau 2,31% dari capain tahun 2022. Hal ini didukung oleh produksi komoditi perkebunan tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 1.494.185 Ton atau 8,30% dari tahun 2022. Capaian produksi komoditi perkebunan berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 20.801.100 Ton. Dimana 20.719.888 Ton atau 99,57% berasal dari produksi komoditi kelapa sawit. Sedangkan capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 4,74% dari target 5,3% atau 89,43% (Sumber BPS Kaltim angka sementara tahun 2023). Meskipun belum mencapai target, sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang berkontribusi paling besar terhadap capaian kontribusi PDRB pertanian dalam arti luas yakni sebesar 59,10%. Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

Pada tahun 2023, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk mengintervensi pencapaian kinerja ketiga sasaran di atas. Program dan kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain:

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat, terutama 5 komoditi unggulan perkebunan, yaitu Kelapa sawit, karet, kelapa, kakao dan lada. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian. Kegiatan ini melaksanakan Intensifikasi kelapa sawit 200 Ha, Intensifikasi karet 200 Ha, Intensifikasi kelapa 20 Ha, Intensifikasi kakao 180 Ha, Intensifikasi lada 200 Ha, dan Peremajaan Karet 136 Ha.



2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan perluasan kakao 150 ha, perluasan karet 200 Ha, perluasan kelapa 20 Ha, perluasan kelapa sawit 200 Ha, perluasan lada 100 Ha, perluasan pala 50 Ha, dan aren 25 Ha.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Provinsi.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan. Pencapaian program tersebut didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- b. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian; dan
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Selain itu juga dilakukan kegiatan penunjang, seperti sosialisasi maupun pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap budidaya, peningkatan nilai tambah produk olahan komoditi perkebunan, penanganan hama dan penyakit, penyediaan bahan tanaman maupun pengawasan peredaran dan sertifikasi benih.